



Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Rancangan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat. Besarnya kompleksitas permasalahan pembangunan akibat terus bertambahnya tantangan, dinamika lingkungan internal maupun eksternal, serta adanya pergeseran standar atau ukuran-ukuran mengenai kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, menyebabkan upaya pembangunan menjadi suatu proses yang harus terus menerus dilakukan. Sejalan dengan dinamika otonomi daerah, beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi semakin berat. Di sisi lain, daerah dihadapkan pada berbagai kendala antara lain terbatasnya ketersediaan sumberdaya pembangunan terutama sumberdaya finansial. Dengan permasalahan dan tantangan tersebut, maka penyelenggaraan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan daerah untuk jangka

waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

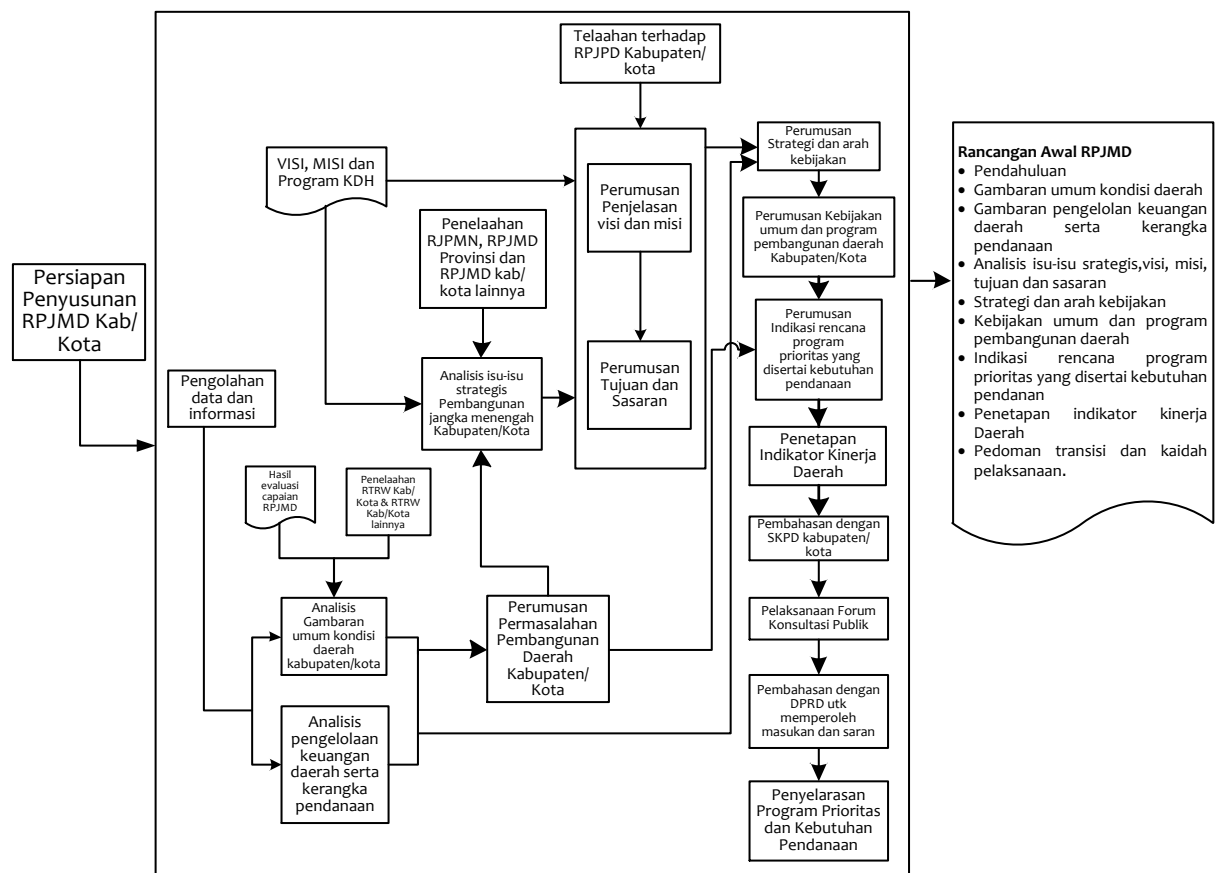
Pada tahun 2015 di Kabupaten Purbalingga telah diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), dan Bupati serta Wakil Bupati terpilih masa bakti 2016-2021 telah dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diwajibkan menyusun RPJMD sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 dilakukan dengan memperhatikan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025. RPJMD Tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran dari tahap III RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025. Selain RPJPD, penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen rencana tata ruang yang telah diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD mencakup pendekatan teknokratik, pendekatan politik, pendekatan partisipatif, dan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas (*top-down and bottom-up*). Melalui pendekatan teknokratis, penyusunan RPJMD dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah sehingga strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah dapat diwujudkan secara efektif dan efisien. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Visi, Misi dan Program prioritas Kepala Daerah yang telah dikomunikasikan secara politis dalam proses Pemilukada menjadi instrumen

pendekatan politik yang harus diintegrasikan dalam RPJMD. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD. Pelibatan pemangku kepentingan dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan menyerap aspirasi sehingga dokumen perencanaan pembangunan tersebut semakin berbobot dan seluruh pemangku kepentingan akan mempunyai rasa memiliki. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan bawah-atas dan atas-bawah adalah bahwa RPJMD disusun dengan memperhatikan masukan masyarakat, serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan analisis setiap urusan pembangunan sebagaimana digambarkan dalam diagram alur di bawah.



Gambar 1 : Diagram Alur Penyusunan RPJMD

RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). RPJMD juga digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta akan menjadi acuan bagi masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan fakta bahwa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau perlu adanya penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025.

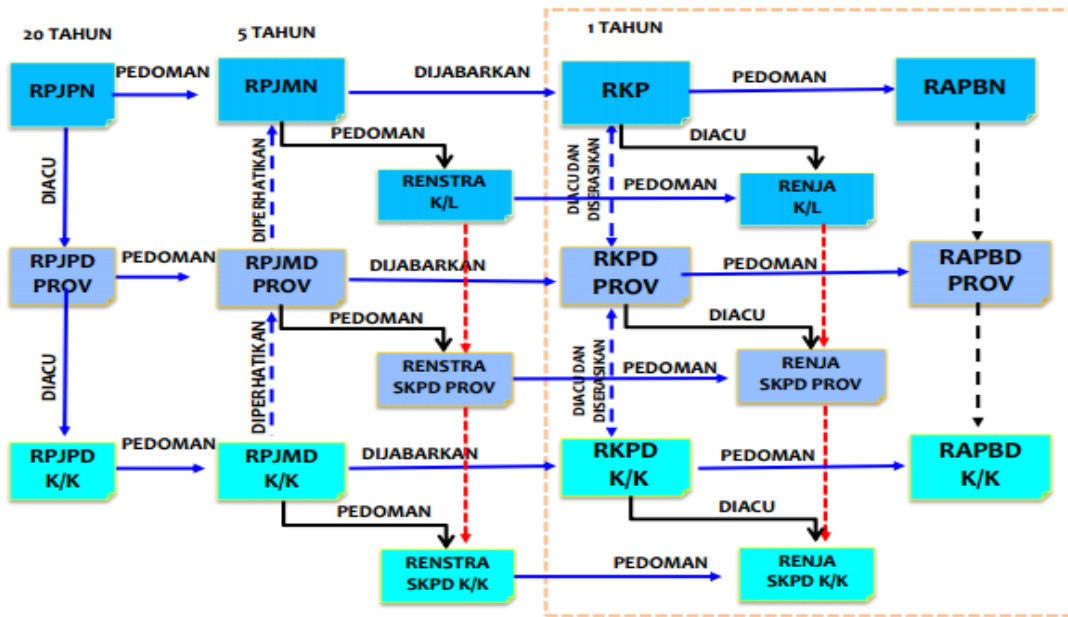
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai ketentuan perundang-undangan, RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019 serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan secara selaras, bersinergi dan saling menunjang dengan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi sehingga seluruh upaya dan pendayagunaan sumberdaya pembangunan dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 juga mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 agar terwujud konsistensi dan keberlanjutan dalam pembangunan Kabupaten Purbalingga. RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 ini selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RPJMD juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahun di tingkat Perangkat

Daerah. Sedangkan Renstra PD akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Hubungan Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.2 Diagram Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan di bawahnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-PD dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Purbalingga.

Renstra PD sebagaimana Permendagri 54 tahun 2010 pasal 93 memuat pendahuluan; gambaran pelayanan SKPD; isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Isi pada bab 9 RPJMD yaitu Penetapan Indikator Kinerja Daerah selaras dengan bab 6 Renstra SKPD yaitu indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

2. Hubungan RPJMD dengan RKPD

RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 99 huruf d, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana tersebut mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai

perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD. RPKD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota.

3. Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, baik di tingkat nasional, provinsi maupun di Kabupaten Purbalingga. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional antara lain: Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) di Indonesia, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), dan Grand Design Reformasi Birokrasi. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral Provinsi Jawa Tengah yang perlu diperhatikan yaitu: RAD *Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi Jawa Tengah, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah, RAD Pangan dan Gizi, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah, RAD Pengurangan Resiko Bencana, dan Pedoman Pelaksanaan PUG di Jawa Tengah. Beberapa dokumen pembangunan sektoral Kabupaten Purbalingga yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga yaitu: RAD Millenium Development Goals (MDGs), dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Purbalingga.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021 disusun dengan maksud untuk menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih hasil pemilihan kepala daerah langsung agar menjadi panduan bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pembangunan selama kurun waktu tahun 2016 – 2021.

Tujuan dari Penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2016 -2021 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong terwujudnya Visi dan terlaksananya Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih periode 2016-2021.
2. Mewujudkan keterkaitan antara setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih.
3. Meningkatkan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi antar bidang, antar program, dan antar wilayah dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumberdaya pembangunan.
4. Menjadi acuan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 2016-2021.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang memuat strategi, arah kebijakan, program dan prakiraan maju pendanaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Daerah, yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Purbalingga secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN menjelaskan tentang Kinerja Keuangan masa lalu, Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan Kerangka Pendanaan (proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama 5 tahun)

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS, berisi tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis dari permasalahan pembangunan daerah dengan memperhatikan dinamika internasional, kebijakan nasional maupun provinsi, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap Kabupaten Purbalingga.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, berisi tentang Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2016-2021, yang disertai dengan tujuan dan sasaran untuk menjawab permasalahan dan isu strategis.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, berisi tentang strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

daerah, arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien.

- BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH,** berisi tentang hubungan antara kebijakan umum berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah.
- BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN,** berisi tentang program prioritas pembangunan daerah dengan indikator kinerja dan target disertai dengan kebutuhan pendanaan program per tahun.
- BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH,** berisi tentang indikator kinerja sasaran yang merupakan tanggungjawab bupati dan bersifat *impact* atau *outcome*.
- BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN,** berisi tentang substansi untuk menghindari kekosongan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah.
- BAB XI PENUTUP,** berisi tentang definisi, fungsi, dan peran dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Aspek Geografis dan Demografi

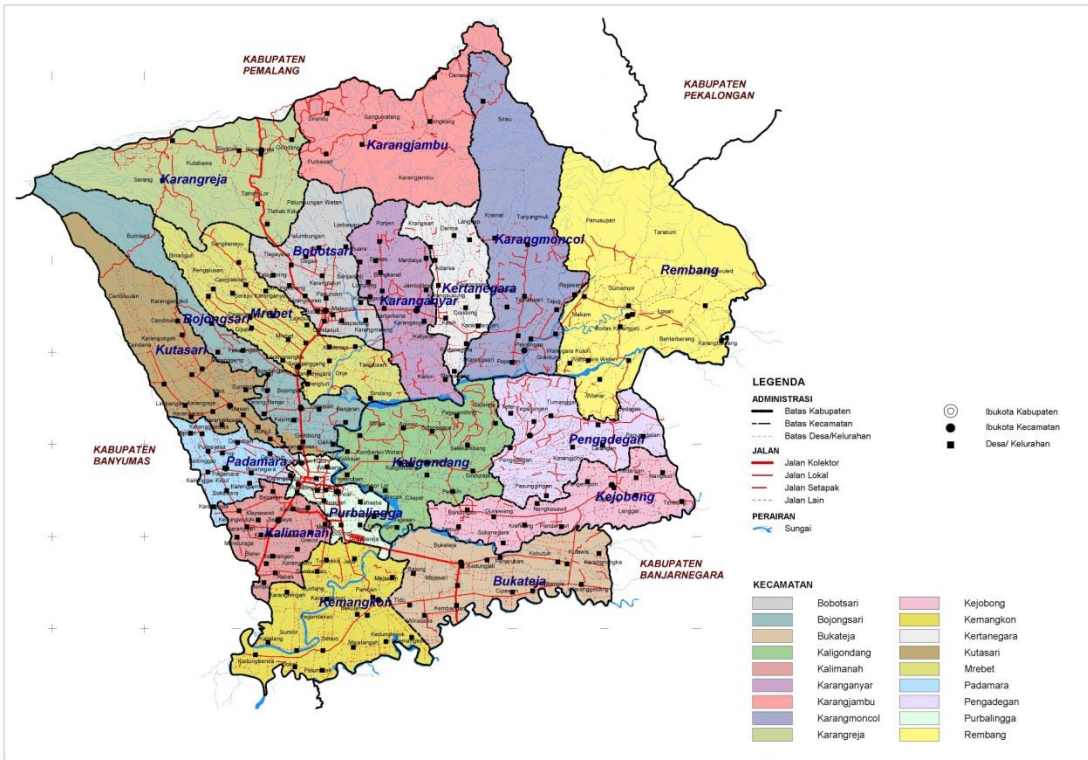
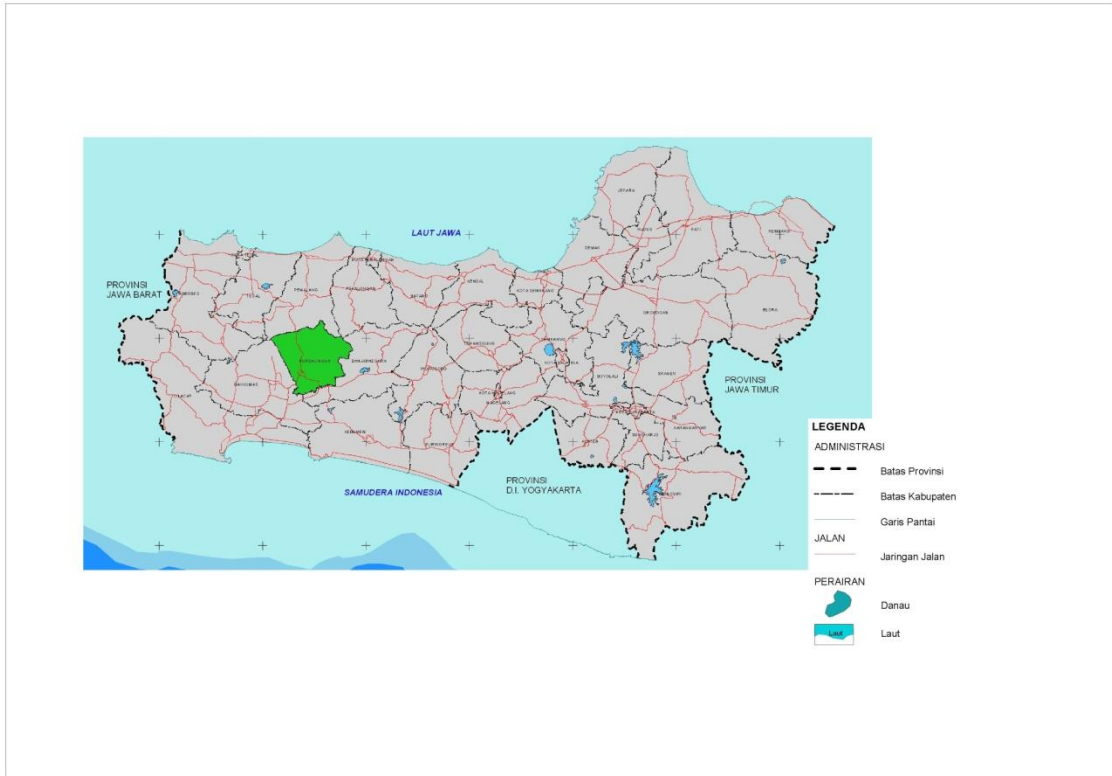
2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Purbalingga memiliki wilayah seluas 77.764,122 ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 224 desa, 15 kelurahan, 886 dusun, 1.530 RW, dan 5.058 RT. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Banyumas.

2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Purbalingga secara geografis terletak di bagian barat daya wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan posisi pada 109⁰11' – 109⁰35' Bujur Timur dan 7⁰10' – 7⁰29' Lintang Selatan.

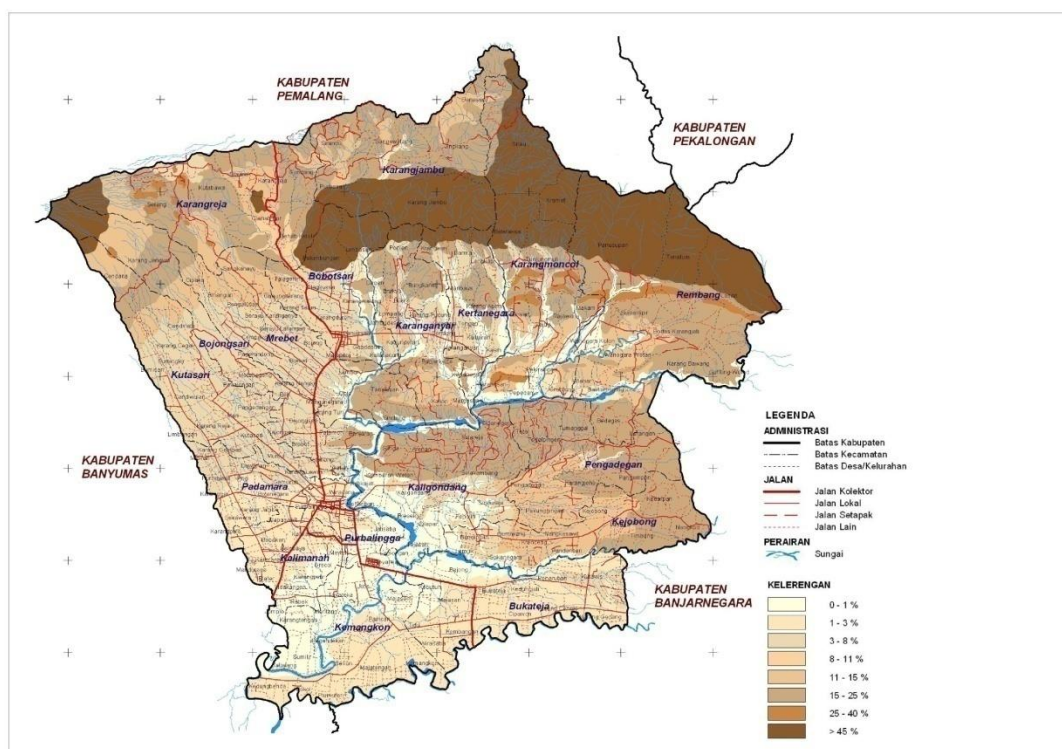


Gambar 2.1. Peta Kabupaten Purbalingga

2.1.3. Kondisi Topografi

Secara fisiografis, Kabupaten Purbalingga terletak pada wilayah perbatasan antara Zona Serayu Utara dan Zona Vulkanik Kwarter. Wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki ketinggian tempat antara 23 meter – 3.432 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan kondisi topografi, wilayah Kabupaten Purbalingga dibagi dalam dua kategori wilayah, yakni :

- a. Bagian utara merupakan wilayah berbukit-bukit dengan kelerengn lebih dari 40 persen. Wilayah ini meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari, dan Mrebet.
- b. Bagian selatan merupakan wilayah dengan tingkat kemiringan berkisar antara 0–25 persen. Wilayah ini meliputi Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari, dan Mrebet.



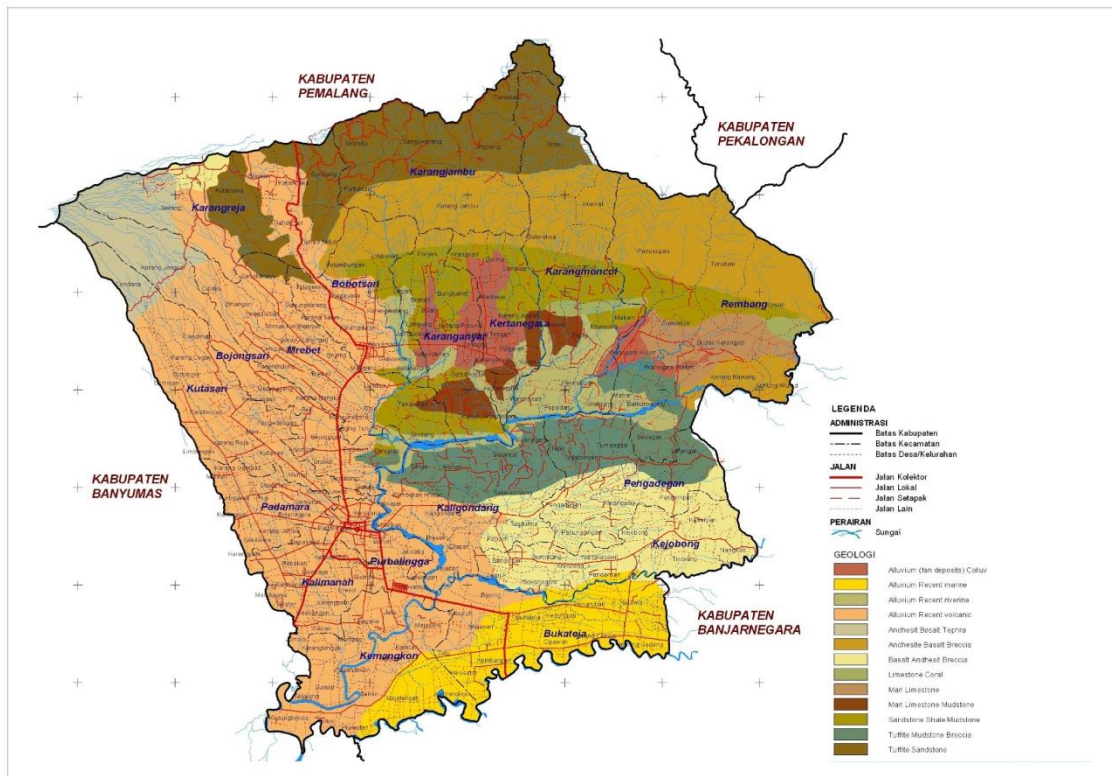
Gambar 2.2. Peta Topografi Kabupaten Purbalingga

2.1.4. Kondisi Geologi

Berdasarkan kondisi geologi, wilayah Kabupaten Purbalingga terdiri dari batuan sedimen klasik berupa batuan andesit, sirtu, batu pasir darat, batu lempung, dan trass dengan persebaran sebagai berikut:

Komposisi litologi batuan yang terdapat di Kabupaten Purbalingga terdiri atas:

- Alluvium endapan rawa dan danau, terutama tersusun oleh lempung, umumnya bersifat kedap air.
- Endapan alluvium gunung api, terdiri dari bahan-bahan tak mengeras, mengandung bongkah-bongkah batuan gunung api, tersusun oleh andesit sampai basalt dengan kelulusan terhadap air rendah sampai tinggi.
- Lava andesit berongga asal Gunung Slamet dengan kelulusan terhadap air tinggi sampai sedang.
- Endapan vulkanik tua yang terdiri dari aliran lava yang bersifat andesit sampai basalt dan breksi. Kelulusan terhadap air rendah sampai sedang.
- Batu pasir tufaan, batupasir, konglomerat, tufa, breksi dan lempung dengan kelulusan terhadap air rendah.
- Napal, napal lempungan dan napal globigerina dengan sisipan tipis tufa pasiran, batu gamping pasiran, batu pasir, batu lempung dan lempung tufaan dengan kelulusan terhadap air rendah



Gambar 2.3. Peta Geologi Kabupaten Purbalingga

Jenis Tanah

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Purbalingga dikategorikan menjadi 9 jenis dengan karakteristik yang berbeda. Jenis tanah yang mendominasi wilayah Kabupaten Purbalingga adalah latosol coklat dan regosol coklat seluas 14.943,75 ha (19,22%) dari seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga dan yang terkecil adalah jenis tanah litosol yang hanya sebesar 568,75 ha (0,73%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.
Jenis Tanah di Kabupaten Purbalingga

NO	Jenis Tanah	Luas Wilayah	
		Ha	%
1	Latosol coklat dan Regosol coklat	14.943,750	19,22
2	Aluvial Coklat tua	13.837,500	17,79
3	Latosol coklat dari bahan induk Vulkanik	8.490,625	10,92

NO	Jenis Tanah	Luas Wilayah	
		Ha	%
4	Latosol merah kuning	4.498,375	5,78
5	Latosol coklat tua	6.237,500	8,02
6	Andosol coklat	5.662,500	7,28
7	Litosol	568,750	0,73
8	Padmolik merah kuning	10.050,000	12,92
9	Gromosol kelabu	13.475,122	17,33
Jumlah		77.764,122	100

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga

- Tanah Latosol

Di Kabupaten Purbalingga tanah latosol dirinci menjadi: Tanah Latosol coklat yang berasosiasi dengan regosol coklat; Tanah Latosol coklat dari bahan induk vulkanik; Tanah latosol merah kuning; dan Tanah Latosol coklat tua

- Tanah alluvial

Tanah ini biasanya berwarna kelabu, coklat, dan hitam, bersifat peka terhadap erosi, karena merupakan endapan tanah liat dan pasir, maka terdapat di sepanjang sungai yang cukup besar, seperti Sungai Gintung bagian tengah dan hilir, Sungai Klawing, Sungai Pekacangan dan Sungai Serayu bagian tengah dan hilir.

- Tanah Andosol

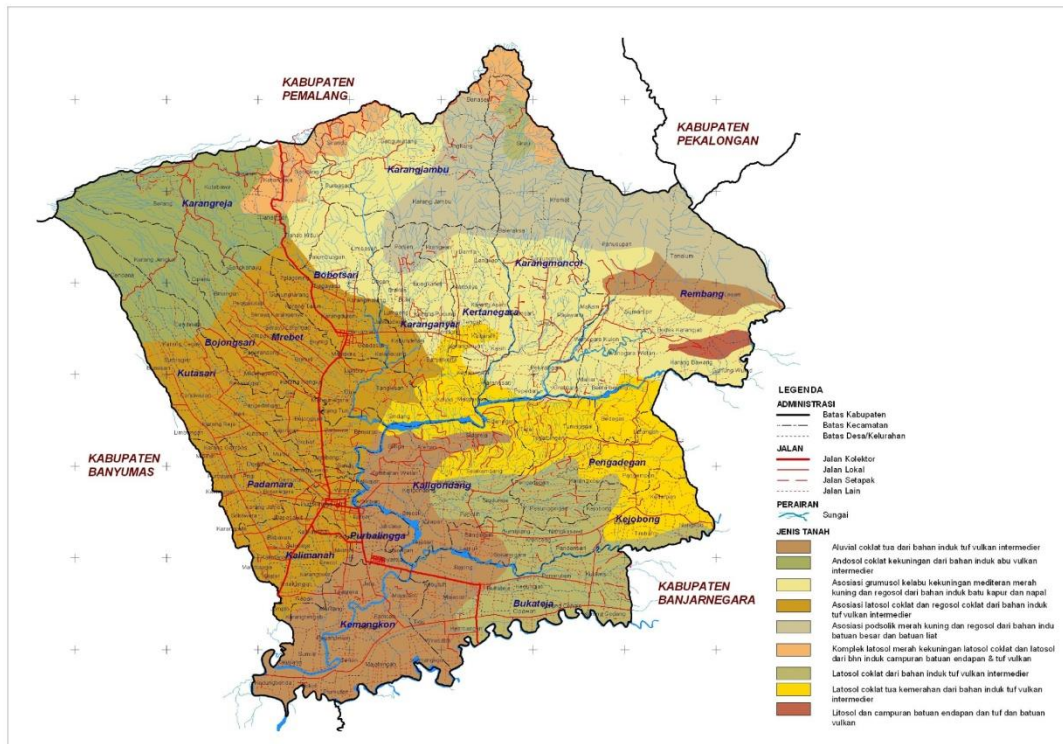
Jenis tanah ini berbentuk dari batuan bekuan dan intermedior, mempunyai sifat peka terhadap erosi, berwarna coklat atau hitam kelabu. Jenis tanah ini banyak terdapat di sekitar puncak Gunung Slamet.

- Tanah litosol

Tanah ini berbentuk dari batuan endapan dan bekuan, sangat peka terhadap erosi, kurang baik untuk pertanian. Jenis tanah ini banyak terdapat di Kecamatan Rembang bagian timur.

- Tanah Gromosol

Tanah ini berbentuk dari endapan liat dan bekuan. Berwarna kelabu sampai hitam, bersifat peka terhadap erosi, dapat dijadikan tanah pertanian dan perkebunan. Jeni tanah ini banyak terdapat di Kecamatan Karangreja, Bobotsari, Karanganyar, Karangmoncol dan Rembang



Gambar 2.4. Peta Jenis Tanah Kabupaten Purbalingga

2.1.5. Kondisi Klimatologi

Wilayah Kabupaten Purbalingga yang terletak di lereng bagian selatan Gunung Slamet sampai dengan dataran rendah di bawahnya memiliki rata-rata curah hujan 3.337 mm/tahun dan suhu udara berkisar antara 22°C – 33°C.

2.1.6. Kondisi Hidrologi

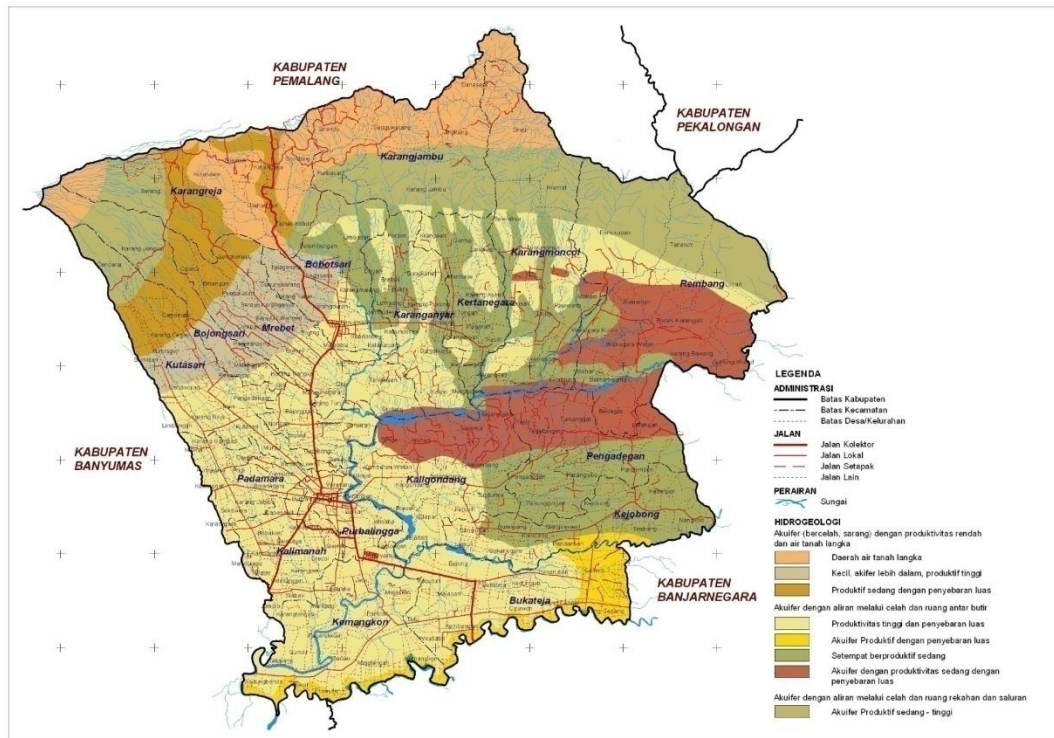
Kabupaten Purbalingga termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu, Sub-DAS Pekacangan dan Klawing dengan anak-anak sungai sebagai berikut :

1. Sungai Ponggawa
2. Sungai Gemuruh
3. Sungai Kajar
4. Sungai Lemberang
5. Sungai Tlahap
6. Sungai Soso
7. Sungai Lebak
8. Sungai Tungtunggunung
9. Sungai Laban
10. Sungai Kuning
11. Sungai Wotan
12. Sungai Gintung
13. Sungai Tambra
14. Sungai Muli

2.1.7 Kondisi Hidrogeologi

Air tanah dan akuifer di Kabupaten Purbalingga menurut peta hidrogeologi Indonesia dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan, terdiri atas:

- Akuifer produktif dengan penyebaran luas
Akuifer ini berupa akuifer dengan keterusan sedang, tinggi psiometri atau air tanah diatas atau dekat muka tanah sampai lebih dari 5 m. Debit sumur umumnya 5 – 10 liter/detik.
- Akuifer dengan produktivitas tinggi dengan penyebaran luas
Akuifer ini berupa akuifer dengan keterusan dan kisaran kedalaman muka air tanah beragam. Debit sumur umumnya lebih dari 5 liter/detik
- Akuifer dengan produktivitas kecil setempat berarti
Akuifer ini berupa akuifer dengan keterusan rendah sampai sangat rendah. Air tanah setempat dalam jumlah terbatas dapat diperoleh pada daerah lembah atau zona pelapukan.
- Daerah air tanah langka



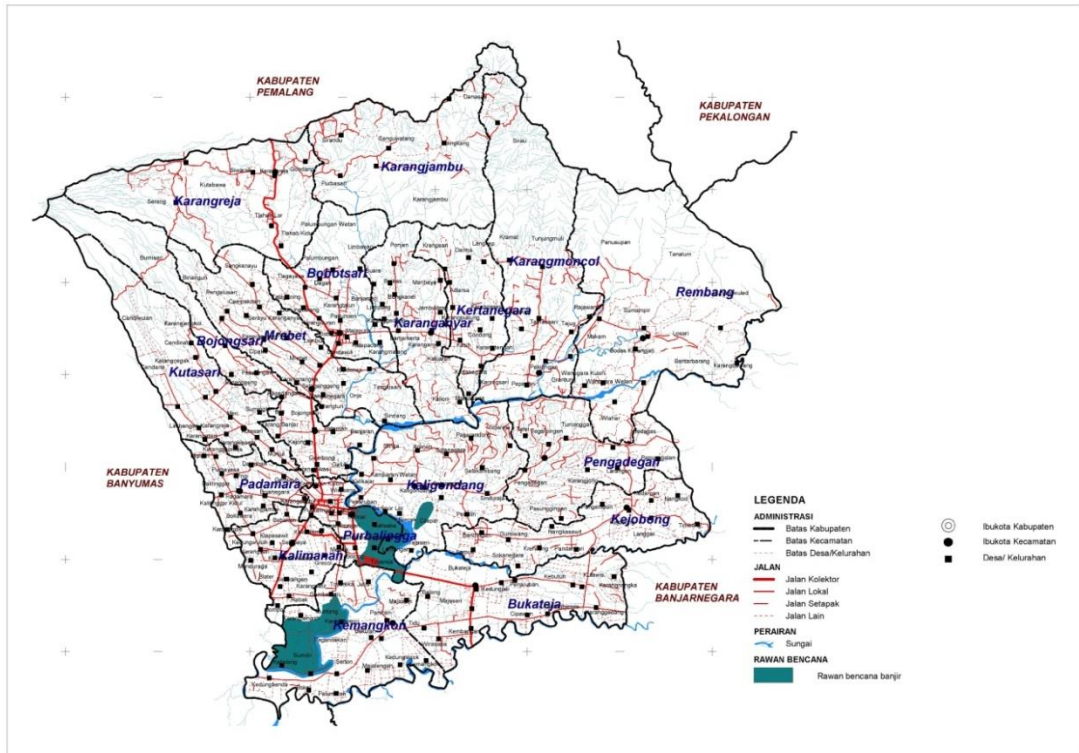
Gambar 2.5. Peta Hidrogeologi Kabupaten Purbalingga

2.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Di Kabupaten Purbalingga terdapat 5 Kawasan rawan bencana alam, meliputi kawasan rawan bencana banjir; kawasan rawan bencana tanah longsor; kawasan rawan bencana kekeringan; kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet; dan kawasan rawan bencana angin topan. Kawasan rawan bencana banjir seluas kurang lebih 12.245 hektar meliputi:

1. Desa Kalialang, Desa Muntang, Desa Sumilir, dan Desa Jetis yang berada di Kecamatan Kemangkong;
2. Desa Toyareja, Desa Jatisaba, dan Kelurahan Bancar yang berada di Kecamatan Purbalingga;
3. Desa Lamongan, Desa Penaruban, Desa Tejasari, dan Desa Cilapar yang berada di Kecamatan Kaligondang;
4. Desa Galuh dan Desa Banjaran yang berada di Kecamatan Bojongsari;

5. Desa Kaliori, Desa Margasana, dan Desa Kalijaran yang berada di Kecamatan Karanganyar;
6. Desa Bajong dan Desa Bukateja yang berada di Kecamatan Bukateja;

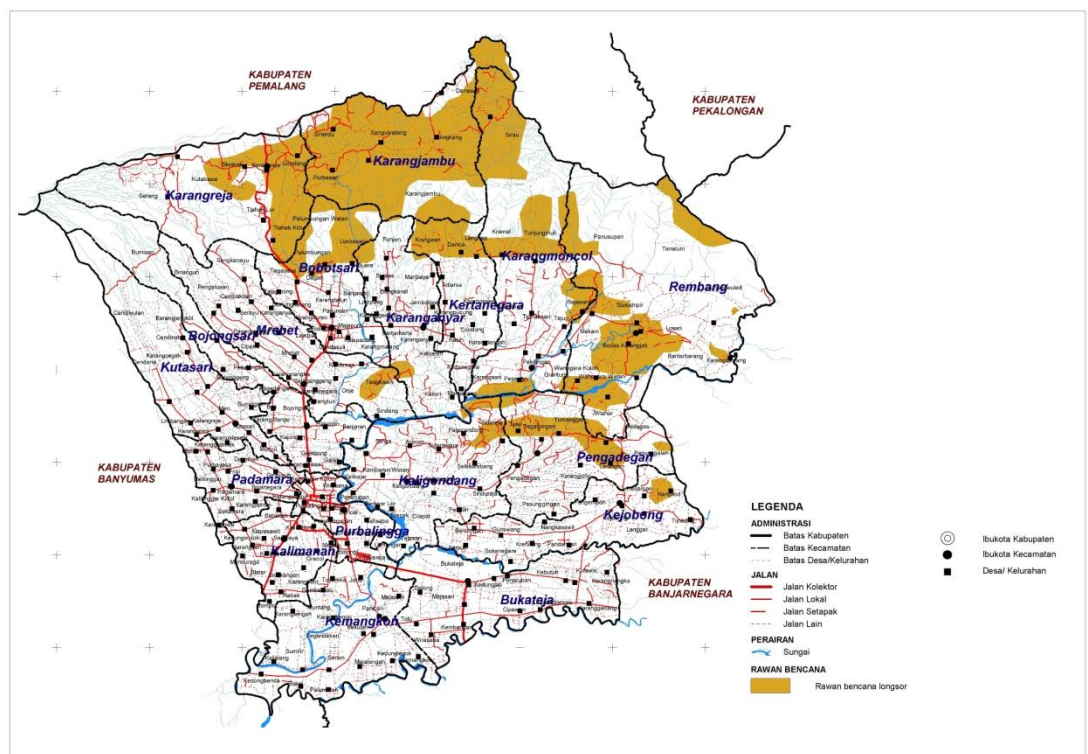


Gambar 2.6. Peta Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana tanah longsor memiliki luas kurang lebih 16.510 hektar meliputi:

1. Desa Jetis, Desa Kedungbenda, dan Desa Pegandekan yang berada di Kecamatan Kemangkon;
1. Desa Sidareja dan Desa Cilapar yang berada di Kecamatan Kaligondang;
2. Desa Karangjambu, Desa Sirandu, Desa Sanguwatang, Desa Purbasari, Desa Jingsang, dan Desa Danasari yang berada di Kecamatan Karangjambu;
3. Desa Kaliori, Desa Kalijaran, Desa Maribaya, Desa Brakas, dan Desa Banjarkerta yang berada di Kecamatan Karanganyar;

4. Desa Kertanegara, Desa Adiarsa, Desa Darma, Desa Langkap, Desa Margasana dan Desa Karangasem yang berada di Kecamatan Kertanegara;
5. Desa Banjaran yang berada di Kecamatan Bojongsari;
6. Desa Banjarsari dan Desa Karangmalang yang berada di Kecamatan Bobotsari;
7. Desa Sindang dan Desa Tangkisan yang berada di Kecamatan Mrebet;
8. Desa Wlahar, Desa Tanalum, Desa Bodaskarangjati, Desa Bantarbarang, Desa Wanogara Wetan, Desa Panusupan, Desa Gunungwuled, Desa Sumampir, Desa Makam, dan Desa Karangbawang yang berada di Kecamatan Rembang;
9. Desa Sirau, Desa Tajug, Desa Kramat, Desa Karangsari, dan Desa Pepedan berada di Kecamatan Karangmoncol.



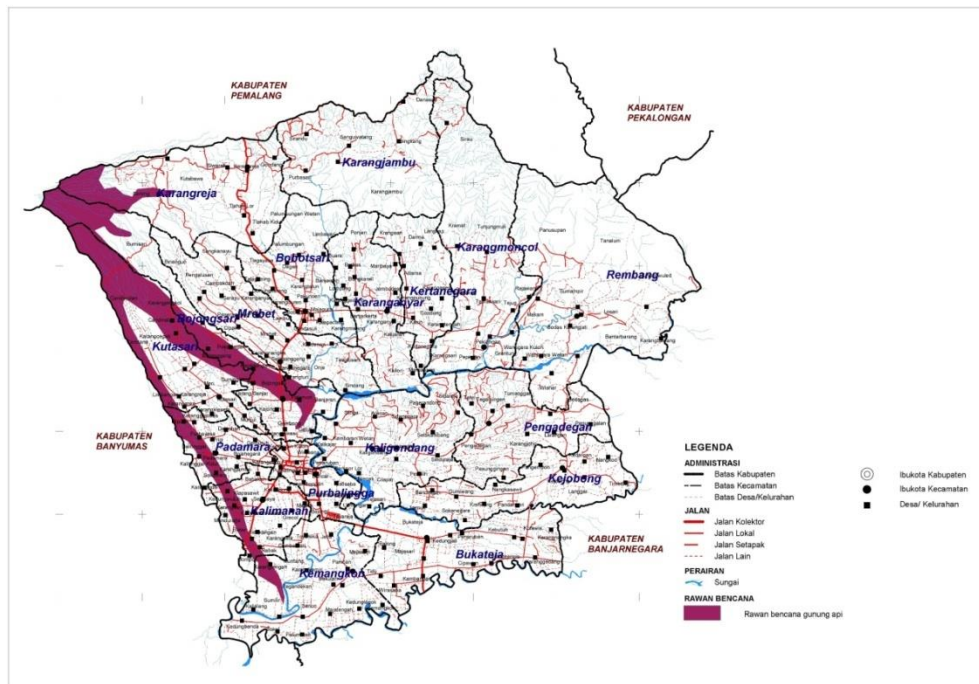
Gambar 2.7. Peta Rawan Bencana Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana kekeringan memiliki luas kurang lebih 29.044 hektar meliputi:

1. Desa Pengadegan, Desa Karangjoho, Desa Larangan, Desa Panunggalan, Desa Bedagas, Desa Tumanggal, Desa Tegalpingen, Desa Tetel, dan Desa Pasunggingan yang berada di Kecamatan Pengadegan;
2. Desa Langgar, Desa Timbang, Desa Nangkasawit, Desa Pandansari, Desa Pangempon, Desa Kejobong, Desa Gumiwang, Desa Krenceng, dan Desa Lamuk yang berada di Kecamatan Kejobong;
3. Desa Kalialang, Desa Muntang, Desa Sumilir, Desa Kedungbenda, Desa Bokol, Desa Pelumutan, Desa Majatengah, dan Desa Kedunglegok yang berada di Kecamatan Kemangkon;
4. Desa Slinga, Desa Arenan, Desa Sidanegara, Desa Pagerandong, Desa Sidareja, Desa Selakambang, Desa Sinduraja, dan Desa Kaligondang yang berada di Kecamatan Kaligondang;
5. Desa Sangkanayu, Desa Sindang, Desa Campakoah, Desa Pengalusan, dan Desa Binangun yang berada di Kecamatan Mrebet;
6. Desa Kalapacung, Desa Gunungkarang, dan Desa Banjarsari yang berada di Kecamatan Bobotsari;
7. Desa Kutabawa, Desa Serang, Desa Siwarak, Desa Karangreja, Desa Tlahab Lor, dan Desa Tlahab Kidul yang berada di Kecamatan Karangreja;
8. Desa Kaliori, Desa Banjarkerta, Desa Karanganyar, Desa Kalijaran, Desa Karanggedang, dan Desa Maribaya yang berada di Kecamatan Karanganyar;
9. Desa Langkap yang berada di Kecamatan Kertanegara;
10. Desa Bumisari, Desa Pekalongan, Desa Banjaran, Desa Metenggeng, dan Desa Pagedangan yang berada di Kecamatan Bojongsari;
11. Desa Wlahar dan Desa Bantarbarang yang berada di Kecamatan Rembang; dan
12. Desa Karangsari, Desa Pepedan, Desa Rajawana, Desa Tajug, Desa Pekiringan, dan Desa Tamansari yang berada di Kecamatan Karangmoncol.

Kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet seluas kurang lebih 8.015 hektar meliputi:

1. Desa Serang, Desa Siwarak, Desa Kutabawa, Desa Karangreja, Desa Tlahab Lor, dan Desa Tlahab Kidul yang berada di Kecamatan Karangreja;
2. Desa Pengalusan, Desa Binangun, dan Desa Sangkanayu yang berada di Kecamatan Mrebet;
3. Desa Bumisari dan Desa Metenggeng yang berada di Kecamatan Bojongsari; dan
4. Desa Karangjengkol, Desa Candinata, Desa Candiwulan, dan Desa Cendana yang berada di Kecamatan Kutasari.



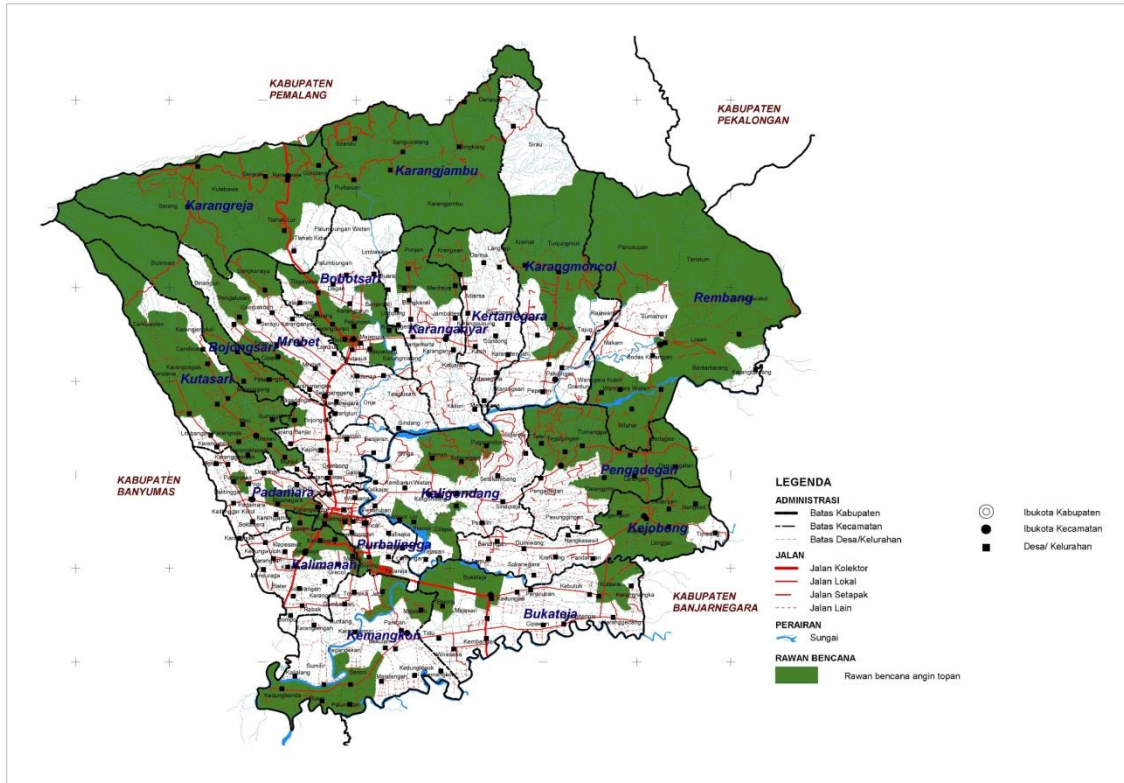
Gambar 2.8. Peta Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi

Kawasan rawan bencana angin topan seluas kurang lebih 41.532 hektar meliputi:

1. Desa Kedungbenda, Desa Bokol, Desa Majasem, Desa Senon, Desa Pelumutan, dan Desa Jetis yang berada di Kecamatan Kemangkon;

2. Desa Pagerandong, Desa Sidanegara, Desa Arenan, Desa Sempor Lor, Desa Brecek, dan Desa Cilapar yang berada di Kecamatan Kaligondang;
3. Desa Karangreja, Desa Candinata, Desa Karangklesem, Desa Karangcegak, Desa Sumingkir, Desa Meri, Desa Kutasari, dan Desa Munjul yang berada di Kecamatan Kutasari;
5. Desa Pekalongan, Desa Beji, Desa Metenggeng, dan Desa Bumisari yang berada di Kecamatan Bojongsari;
6. Desa Banjarsari, Desa Tlagayasa, Desa Majapura, Desa Karangduren, Desa Kalapacung, Desa Pakuncen, dan Desa Gunungkarang yang berada di Kecamatan Bobotsari;
7. Desa Serang, Desa Kutabawa, Desa Karangreja, Desa Siwarak, Desa Tlahab Lor, dan Desa Gondang yang berada di Kecamatan Karangreja;
8. Desa Sanguwatang, Desa Purbasari, Desa Sirandu, Desa Karangjambu, Desa Jinkang, dan Desa Danasari yang berada di Kecamatan Karangjambu;
9. Desa Ponjen, Desa Krangean, Desa Langkap, Desa Kalijaran, Desa Brakas, dan Desa Maribaya yang berada di Kecamatan Karanganyar;
10. Desa Sangkanayu, Desa Pengalusan, dan Desa Cipaku yang berada di Kecamatan Mrebet;
11. Desa Kejobong, Desa Pangempon, Desa Langgar, Desa Nangkod, dan Desa Kedarpan yang berada di Kecamatan Kejobong;
12. Desa Tetel, Desa Tumanggal, Desa Bedagas, Desa Larangan, dan Desa Karangjoho yang berada di Kecamatan Pengadegan;
13. Desa Gunungwuled, Desa Losari, Desa Bantarbarang, Desa Wanogara Wetan, Desa Wlahar, Desa Tanalum, Desa Panusupan, dan Desa Wanogara Kulon yang berada di Kecamatan Rembang;
14. Desa Kramat, Desa Tunjungmuli, dan Desa Tamansari yang berada di Kecamatan Karangmoncol;
15. Desa Purbayasa, Desa Bojanegara, dan Kelurahan Karangsantul yang berada di Kecamatan Padamara;

16. Desa Bukateja, Desa Bajong, dan Desa Kutawis yang berada di Kecamatan Bukateja; dan
17. Kelurahan Kalikabong, Kelurahan Karangmanyar, Kelurahan Mewek, Desa Selabaya, dan Desa Babakan yang berada di Kecamatan Kalimanah.



Gambar 2.9. Peta Rawan Bencana Angin Topan

2.1.9. Kondisi demografi

Penduduk Kabupaten Purbalingga hasil proyeksi BPS tahun 2015 berjumlah 898.376 jiwa yang terdiri dari 443.915 laki-laki dan 454.461 perempuan, atau tumbuh sebesar 0,48 persen dari tahun sebelumnya. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun laju penduduk Kabupaten Purbalingga mengalami perlambatan pertumbuhan dari 1,36 persen pada tahun 2010 turun secara bertahap menjadi 1,14 persen tahun 2011; 1,11 persen tahun 2012; 1,10 persen tahun 2013; 1,06 persen pada tahun 2014 dan 0,48 persen tahun 2015. Secara rinci jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga menurut

Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2012-2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2012-2014

No	Kecamatan	2012			2013			2014		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1.	Kemangkon	26.547	27.587	54.134	26.588	27.665	54.253	26.870	27.959	54.829
2.	Bukateja	33.545	34.239	67.784	33.654	34.322	67.976	34.014	34.689	68.703
3.	Kejobong	21.253	22.548	43.801	21.336	22.612	43.948	21.556	22.848	44.404
4.	Pengadegan	17.928	18.536	36.464	17.993	18.577	36.570	18.176	18.765	36.941
5.	Kaligondang	27.635	29.783	57.418	27.718	29.885	57.603	28.014	30.207	58.221
6.	Purbalingga	28.026	29.621	57.647	28.090	29.663	57.753	28.411	30.000	58.411
7.	Kalimanah	25.602	26.297	51.899	25.750	26.426	52.176	26.048	26.735	52.783
8.	Padamara	20.124	21.121	41.245	20.276	21.256	41.532	20.526	21.515	42.041
9.	Kutasari	28.333	28.572	56.905	28.452	28.726	57.178	28.799	29.075	57.874
10.	Bojongsari	28.914	28.614	57.528	29.064	28.740	57.804	29.415	29.088	58.503
11.	Mrebet	33.546	34.253	67.799	33.708	34.376	68.084	34.056	34.735	68.791
12.	Bobotsari	23.945	24.337	48.282	24.010	24.389	48.399	24.289	24.668	48.957
13.	Karangreja	20.295	20.397	40.692	20.377	20.458	40.835	20.577	20.661	41.238
14.	Karangjambu	12.240	12.078	24.318	12.303	12.116	24.419	12.431	12.241	24.672
15.	Karanganyar	17.539	17.640	35.179	17.562	17.656	35.218	17.721	17.816	35.537
16.	Kertanegara	15.257	15.695	30.952	15.290	15.715	31.005	15.422	15.853	31.275
17.	Karangmoncol	25.412	25.663	51.075	25.466	25.698	51.164	25.678	25.907	51.585
18.	Rembang	29.406	29.303	58.709	29.436	29.330	58.766	29.703	29.594	59.297
	Jumlah	435.547	446.284	881.831	437.073	447.610	884.683	441.706	452.356	894.062

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 sebesar 1.150 jiwa/km², tertinggi di Kecamatan Purbalingga sebesar 3.963 jiwa/km², selanjutnya Padamara 2.436 jiwa/km², dan Kecamatan Kalimanah sebesar 2.434 jiwa/km². Sementara itu kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Karangjambu 571 jiwa/km², selanjutnya Kecamatan Karangreja 839 jiwa/km². Sex ratio atau rasio jenis kelamin rasio jenis kelamin Kabupaten Purbalingga tahun 2014 tercatat sebesar 97,65 yang artinya diantara 100 penduduk perempuan terdapat kurang lebih 98 penduduk laki-laki atau dengan kata lain penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kepadatan dan Sex ratio Penduduk Kabupaten Purbalingga menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.
Kepadatan Penduduk, Sex Ratio dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Tahun 2012-2014

No	Kecamatan	2012			2013			2014		
		KP	SR	LPK	KP	SR	LPK	KP	SR	LPK
1.	Kemangkon	1.200	96,23	1,99	1202	96,11	0,22	1.215	96.11	1.06
2.	Bukateja	1.599	97,97	2,04	1603	98,05	0,28	1.522	98.05	1.07
3.	Kejobong	1.096	94,26	2,26	1099	94,36	0,34	984	94.35	1.04
4.	Pengadegan	8 74	96,72	2,15	876	96,86	0,29	819	96.86	1.01
5.	Kaligondang	1.136	92,79	2,07	1140	92,75	0,32	1.290	92.74	1.07
6.	Purbalingga	3.914	94,62	2,24	3921	94,70	0,18	1294	94.70	1.14
7.	Kalimanah	2.307	97,36	2,54	2319	97,44	0,53	1170	97.43	1.16
8.	Padamara	2.276	95,28	3,13	2292	95,39	0,70	932	95.40	1.23
9.	Kutasari	1.495	99,16	2,20	1502	99,05	0,48	1282	99.05	1.22
10.	Bojongsari	1.967	101,04	2,42	1977	101,13	0,48	1296	101.12	1.21
11.	Mrebet	1.524	97,94	2,22	1530	98,06	0,42	1524	98.05	1.04
12.	Bobotsari	1.853	98,39	2,12	1858	98,45	0,24	1085	98.46	1.15
13.	Karangreja	8 28	99,50	2,10	831	99,60	0,35	914	99.59	0.99
14.	Karangjambu	6 60	101,34	2,52	663	101,54	0,42	547	101.55	1.04
15.	Karanganyar	1.175	99,43	1,96	1176	99,47	0,11	787	99.47	0.91
16.	Kertanegara	1.158	97,21	1,88	1159	97,30	0,17	693	97.28	0.87
17.	Karangmoncol	1.119	99,02	1,46	1121	99,10	0,17	1143	99.12	0.82
18.	Rembang	9 49	100,35	1,47	950	100,36	0,10	1314	100.37	0.90
	Jumlah	1.330	97,59	2,14	1334	97,65	0,32	1150	97.65	1.06

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

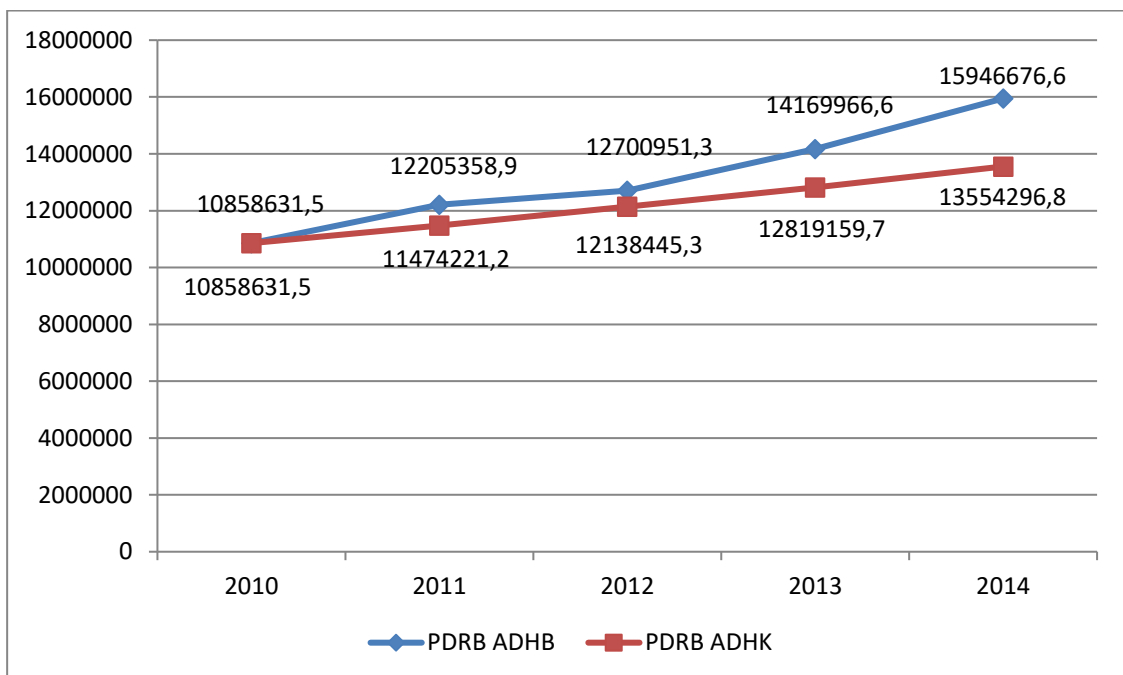
2.2.1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan

(riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi; pada saat ini menggunakan tahun dasar 2010.

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) dimana aktivitas ekonomi dibagi atas 9 sektor lapangan usaha, sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009, yang membagi aktivitas ekonomi menjadi 17 kategori.

Capaian PDRB di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2010-2014. Kenaikan tersebut terjadi baik kepada capaian PDRB ADHB dan ADHK atas Dasar Tahun 2010. Perkembangan capaian PDRB dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2014

Gambar 2.10. PDRB ADHB dan ADHK Tahun Dasar 2010

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Purbalingga telah bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga.

Walaupun demikian kategori Pertanian masih memegang peranan yang cukup besar di Kabupaten Purbalingga, tercatat hingga 2014 peranannya masih bertengger di 30 persen. Peranan terbesar selanjutnya diisi oleh kategori C yaitu Industri Pengolahan yang berada pada kisaran 23,50 persen. Peranan terendah terjadi pada kategori D, Pengadaan Listrik dan Gas hingga 2014 hanya memberikan peran sebesar 0,05 persen.

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran tingkat perubahan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dihitung menggunakan rumusan pertumbuhan PDRB ADHK atas dasar tahun 2010. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga sebesar 6,63% menurun menjadi 5,67% pada tahun 2011. Pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 5,79%, namun pada tahun 2013 menurun menjadi 5,61%, dan pada tahun 2014 naik lagi menjadi sebesar 5,73%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 berada pada peringkat ke-3 diantara kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga sudah diatas capaian Jawa Tengah yaitu sebesar 5,42%.

2.2.2. Laju Inflasi

Inflasi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk melihat stabilitas ekonomi suatu wilayah atau daerah yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dari indeks harga konsumen. Inflasi berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan tetap serta mempengaruhi besarnya produksi barang.

Apabila dilihat perkembangan inflasi tahun kalender setiap tahunnya, tren perubahan yang terjadi di Purbalingga, Purwokerto, Cilacap dan Jawa Tengah serta nasional menunjukkan pola yang hampir sama. Pada tahun 2014 terjadi inflasi yang cukup tinggi pada bulan November dan Desember

yang antara lain disebabkan oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM jenis premium dan solar yang berimbas pada kenaikan harga sejumlah komoditas terutama dikelompok transportasi dan bahan makanan.

Pada tahun 2015 tingkat inflasi di Kabupaten Purbalingga tergolong cukup rendah. Kondisi semacam ini patut dipertahankan pada tahun-tahun mendatang agar inflasi tidak terlalu tinggi yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menjadikan masyarakat yang berpenghasilan rendah menjadi miskin. Beberapa langkah kebijakan dapat diambil antara lain dengan meningkatkan pemantauan pasokan barang dan tingkat harga di pasaran, melakukan operasi pasar pada waktu-waktu tertentu agar harga komoditas pangan utama tetap stabil. Ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tentunya perlu ditingkatkan agar tingkat inflasi dapat terjaga pada level yang wajar.

2.2.3. PDRB Perkapita

Produktivitas penduduk di sebuah wilayah dapat dihitung menggunakan pendekatan PDRB per Kapita, yaitu sebuah model matematis yang membagi antara pendapatan regional terhadap jumlah masyarakat pada tengah tahun. PDRB ADHB per kapita Kabupaten Purbalingga pada kurun waktu 2010-2014 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai Rp. 10.858.631,5 meningkat sebesar 12,40% menjadi Rp. 12.205.358,9 pada tahun 2011. Pada tahun 2012, terjadi kenaikan capaian PDRB per kapita sebesar 4,06% menjadi Rp. 12.700.951,3. Pada tahun 2013 kembali terjadi kenaikan sebesar 11,57% menjadi Rp. 14.169.966,6 dan pada tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar 12,54% menjadi Rp. 15.946.676,6.

2.2.4. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk menghitung ketidakmerataan atau ketimpangan agregat yang angkanya mencakup antara 0 hingga 1. Ketimpangan yang diukur menggunakan Indeks Gini biasanya bervariasi, tergantung kepada kebutuhan. Salah satu indikator yang dapat dihitung menggunakan indeks gini adalah ketimpangan terhadap pendapatan. Capaian Indeks Gini yang menunjukkan angka 0 menunjukkan ketiadaan ketimpangan pendapatan diantara satu penduduk dengan penduduk yang lain, sedangkan apabila menunjukkan angka 1 maka dipastikan terjadi kesenjangan pendapatan yang sangat tinggi antara penduduk satu dengan yang lainnya. Ketimpangan yang terjadi berdasarkan perhitungan menggunakan Indeks Gini dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah apabila capaian Indeks Gini berada dibawah 0,3; sedang apabila capaian Indeks Gini antara 0,3-0,4; dan tinggi apabila capaian Indeks Gini mencapai lebih dari 0,4.

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah gini ratio untuk Kabupaten Purbalingga adalah sebesar 0,30 pada tahun 2014 yang artinya ketimpangan cukup rendah atau pemerataan cukup tinggi karena masih dibawah 0,35. Sementara itu gini ratio untuk Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 0,38 pada tahun 2014.

2.2.5. Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 sebesar 19,75 atau sejumlah 176.040 jiwa, menurun dari tahun 2013 sebesar 20,53 persen atau 181.100 jiwa. Kinerja penurunan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga tahun 2011-2014 cukup baik, hal ini terlihat dari persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin yang selalu menurun setiap tahun.

Tabel 2.4.
Data Kemiskinan Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	196.000	184.900	181.100	176.040
2	Persentase Penduduk Miskin	23,06	21,19	20,53	19,75
3	Garis Kemiskinan (Rp/kp/bln)	230,461	247,508	265,262	275,022
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3,11	3,72	3,20	2,81
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,67	0,96	0,73	0,63

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah (2011-2014).

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga walaupun semakin menurun namun masih tergolong cukup besar. Upaya penanggulangan kemiskinan tentunya perlu ditingkatkan melalui berbagai program yang mengarah pada pemenuhan hak dasar mencakup bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi, dan pangan; perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha; dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Diharapkan dengan adanya program-program yang *pro poor* dapat mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin secara signifikan.

2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2010-2015. Pada tahun 2010, IPM Kabupaten Purbalingga mencapai 63,61 meningkat menjadi 64,33 pada tahun 2011. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2014 dan 2015 dimana masing-masing capaian IPM mencapai 66,23 dan 67,02.

Empat komponen penghitungan IPM adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita. Angka harapan hidup Kabupaten Purbalingga terus mengalami kenaikan dari 72,56 pada tahun 2010 menjadi 72,63 pada tahun 2011, dan terus meningkat lagi hingga menjadi 72,80 pada tahun 2015. Ini memberikan gambaran bahwa ada peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Purbalingga. Begitu juga di bidang pendidikan yang diukur dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Untuk harapan lama sekolah ada peningkatan dari 10,71 pada tahun 2010 menjadi 10,84 pada tahun 2011

dan terus naik pada tahun 2015 menjadi 11,78. Rata-rata lama sekolah untuk penduduk 25 tahun ke atas Kabupaten Purbalingga tahun 2010 adalah 6,22 tahun, naik menjadi 6,68 pada tahun 2013 dan naik lagi menjadi 6,85 pada tahun 2015. Sementara itu besarnya paritas daya beli penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2015 adalah 8.938 ribu rupiah.

2.2.7. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar dan Menengah

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi sekolah penduduk adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Angka ini dihitung berdasarkan perbandingan antara anak yang sekolah pada tingkat pendidikan tertentu dibagi dengan penduduk umur yang seharusnya anak duduk pada tingkat pendidikan tertentu.

Pada kurun waktu 3 tahun terakhir, APK SD terus mengalami kenaikan dari 108,58 pada tahun 2012 meningkat menjadi 112,53 pada tahun 2013 dan 118,84 pada tahun 2014. APK SD berada diatas 100 persen yang artinya jumlah penduduk yang sedang bersekolah di tingkat SD lebih besar dibandingkan jumlah penduduk kelompok umur 7-12 tahun. Hal ini disebabkan adanya siswa yang berumur diatas 12 tahun tetapi saat ini masih bersekolah di tingkat SD dikarenakan kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Selain itu, juga adanya siswa yang lebih muda dibanding umur standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di umur yang lebih muda (kurang dari 7 tahun).

Untuk APK SMP dan SM mengalami penurunan pada tahun 2013 namun dapat kembali meningkat pada tahun 2014. APK SMP yang masih dibawah nilai 100 menunjukkan bahwa pada kelompok umur 13-15 tahun belum keseluruhan penduduknya bersekolah di tingkat SMP. Hal yang sama terjadi juga pada kelompok umur 16-18 tahun yang belum keseluruhan penduduknya bersekolah di tingkat SM (Sekolah Menengah).

Jika dilihat menurut jenis kelamin pada tahun 2014, APK SD dan SMP pada perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa

partisipasi sekolah di SD dan SMP bagi kaum perempuan lebih besar dibanding laki-laki. Sedangkan pada APK SM laki-laki lebih tinggi dari perempuan.

2.2.8. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar dan Menengah

Ukuran lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi sekolah penduduk adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM menunjukkan proporsi anak sekolah di suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka ini dihitung dengan perbandingan antara jumlah murid umur tertentu pada pendidikan tertentu dibagi jumlah penduduk kelompok umur pendidikan yang bersangkutan. APM Kabupaten Purbalingga tahun 2014 untuk tingkat Sekolah Dasar adalah 97,28; untuk SMP adalah 79,78 dan untuk tingkat SM adalah 44,08. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa untuk APM SD 97,28 menandakan penduduk Kabupaten Purbalingga sudah tepat waktu dalam menyekolahkan anak-anaknya ke SD setelah anak berumur 7 tahun.

Selama kurun waktu 2012-2014, angka partisipasi murni di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan terutama APM SD dan SLTP. Pada tahun 2012 ada sebanyak 92,13 persen penduduk umur 7-12 tahun yang sedang bersekolah di SD, sedangkan penduduk 13-15 tahun yang sedang bersekolah di SMP sebanyak 73,44 persen. Pada tahun 2013 persentase penduduk umur 7-12 tahun yang sedang sekolah di SD sebanyak 96,76 persen sedangkan penduduk umur 13-15 tahun yang sedang sekolah di SMP sebanyak 74,07 persen. Sementara itu untuk APM SM mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 34,97 persen namun kembali meningkat pada tahun 2014 menjadi sebesar 44,08 persen.

2.2.9 Angka Kematian Ibu (AKI)

AKI mencerminkan banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganan (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan,

melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa menghitung lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Kecenderungan AKI dalam kurun waktu tahun 2010-2015 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013 sebanyak 26 kasus menjadi 14 kasus pada Tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 terdapat 20 kasus atau 135,78 per 100.000 kelahiran hidup.

Kematian ibu terjadi karena kurangnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, sehingga pelayanan kegawatdaruratan tidak tepat waktu disebabkan keterlambatan mengenal tanda bahaya dan pengambilan keputusan. Selain itu penyebab kematian ibu juga tidak terlepas dari kondisi ibu itu sendiri yang terkait dengan tingkat sosial, ekonomi, dan tingkat pendidikan yang sering diistilahkan dengan 4 (empat) terlalu dan 3 (tiga) terlambat yakni (terlalu tua pada saat hamil; terlalu muda pada saat hamil; terlalu banyak anak; terlalu rapat jarak kehamilan) dan (terlambat mengambil keputusan sehingga terlambat tertangani; terlambat sampai ke tempat rujukan karena kendala transportasi; dan terlambat mendapatkan penanganan karena terbatasnya sarana dan sumber daya manusia).

2.2.10 Angka Kematian Bayi (AKB)

Perkembangan AKB di Kabupaten Purbalingga selama Tahun 2010-2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014, AKB di Kabupaten Purbalingga sebesar 162 kasus. Jumlah tersebut menurun dibandingkan 4 (empat) tahun sebelumnya yaitu tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 secara berturut-turut sebesar 171 kasus, 168 kasus, 182 kasus dan 172 kasus. Pada tahun 2015 AKB tercatat 149 kasus atau 10,18 per 1.000 KH. Namun demikian, angka tersebut masih cukup tinggi disebabkan antara lain kehamilan resiko tinggi, kurangnya asupan gizi pada ibu hamil sehingga menyebabkan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), kelainan konginental pada bayi dan kehamilan yang tidak dikehendaki.

2.2.11 Prevalensi Gizi Buruk

Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2010-2014 cenderung fluktuatif, dari 0,19 persen pada Tahun 2010, 0,07 persen pada Tahun 2011, 0,11 persen pada Tahun 2012, naik lagi menjadi 0,81 persen pada Tahun 2013, dan mengalami penurunan menjadi 0,13 persen pada Tahun 2014. Penurunan tersebut terjadi karena berbagai upaya telah dilakukan diantaranya melalui pemberian makanan tambahan dan perawatan kepada balita gizi buruk.

2.2.12 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dengan angkatan kerja. Data Sakernas 2014 mencatat bahwa tingkat pengangguran Kabupaten Purbalingga sebesar 5,13 yang artinya terdapat sebanyak 5,13 persen penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok penganggur. Menurut Sakernas, pengangguran mencakup mereka yang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena putus asa sudah berkali-kali mencari pekerjaan namun belum berhasil.

Pada tahun 2014 persentase laki-laki yang menganggur lebih banyak dibanding perempuan demikian juga pada tahun 2013. Namun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi penurunan pengangguran yang cukup besar pada perempuan yaitu dari 5,22 persen menjadi 2,80 persen pada tahun 2014. Dengan kata lain penurunan tingkat pengangguran pada tahun 2014 lebih dipengaruhi oleh penurunan tingkat pengangguran perempuan seiring dengan menurunnya penduduk usia kerja perempuan yang mencari pekerjaan.

2.2.13 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan

terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK Kabupaten Purbalingga tahun 2014 tercatat sebesar 70,95 yang mengindikasikan bahwa terdapat 70,95persen penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Purbalingga. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014.

Bila dibandingkan dengan tahun 2013, TPAK Kabupaten Purbalingga tahun 2014 mengalami penurunan sejalan dengan menurunnya persentase penduduk usia kerja yang bekerja yaitu dari 73,76 pada tahun 2013 menjadi 70,95 pada tahun 2014. Jika diamati lebih teliti, maka penurunan TPAK ini lebih banyak terjadi pada tenaga kerja perempuan kurang lebih 4 persen yaitu dari 62,40 menjadi 58,36; sementara TPAK laki-laki hanya turun kurang lebih 1 persen.

2.2.14 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut BPS merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Perkembangan capaian IPG Kabupaten Purbalingga pada kurun waktu 2013-2014 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian IPG Kabupaten Purbalingga pada tahun 2013 adalah 89,12 meningkat sebesar 1,00 pada tahun 2014 menjadi 90,12.

Indikator komposit IPG pada dasarnya sama dengan indikator komposit IPM hanya saja penghitungan capaiannya dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian ini dilakukan dalam rangka mengetahui ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Data yang ada menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan antara laki-laki dan

perempuan pada masing-masing indikator komposit IPG. Dilihat dari capaiannya, perempuan masih tertinggal jauh dibelakang laki-laki dalam bidang pendidikan dan pengeluaran perkapita yang disesuaikan yang ditunjukkan dari masih tingginya kesenjangan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah antara laki-laki terhadap perempuan. Harapan lama sekolah perempuan pada tahun 2014 sebesar 10,74 tahun, sedangkan harapan lama sekolah laki-laki sebesar 12,00 tahun pada tahun 2014. Sementara rata-rata lama sekolah tahun 2014 untuk perempuan sebesar 5,98 tahun, masih jauh tertinggal dengan rata-rata lama sekolah laki-laki sebesar 7,25 tahun. Dari sektor pengeluaran perkapita tahun 2014, perempuan hanya menyumbang sebesar 8.503 ribu sedangkan laki-laki sebesar 11.862 ribu rupiah.

2.2.15 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG atau juga disebut Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang dikembangkan oleh UNDP yang bertujuan untuk mengukur kemajuan perempuan terutama partisipasi dalam forum-forum politik dan ekonomi. IDG menganalisis sejauh mana perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dalam dunia politik dan ekonomi dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Adapun komposit IDG adalah keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan.

IDG Kabupaten Purbalingga mengalami perkembangan yang fluktuatif dalam kurun waktu 2010-2014. Pada tahun 2010 capaian IDG Kabupaten Purbalingga mencapai 63,98 meningkat tajam hingga menjadi 67,47 pada tahun 2012 namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 61,74. Dan meningkat menjadi 71,03 pada tahun 2014. Adapun capaian masing-masing indikator komposit adalah keterlibatan perempuan di parlemen sebesar 26,67 persen, perempuan sebagai tenaga profesional 38,06 persen dan sumbangan pendapatan perempuan sebesar 29,23 persen.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi masyarakat terutama kemampuan memecahkan masalah.

a. Pendidikan Dasar

1) Angka Partisipasi Sekolah

Capaian Angka Partisipasi Sekolah tahun 2011-2014 pada jenjang SD/MI selalu meningkat, dari 97,69 pada tahun 2011 menjadi 100,00 pada tahun 2014a. Pada jenjang SMP/MTs, Angka Partisipasi Sekolah 84,76 (Tahun 2011) menjadi 94,27 (Tahun 2014). Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Purbalingga sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.5.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah
Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Purbalingga
Tahun 2010-2014

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI (7-12 th)	99,38	97,69	98,22	98,67	100,00
2	SMP/MTs (13-15 th)	86,85	84,76	85,42	85,65	94,27

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2015

2) Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah

Rasio Ketersediaan sekolah/ penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah.

Pada kurun waktu 2011-2012 dan sejalannya dengan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) mengalami

peningkatan. Pada jenjang SD/MI dari 646 unit menjadi 647 unit, namun pada Tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 644 unit untuk SD/MI dan 111 unit untuk SMP/MTs. Perkembangan pada tahun 2010-2014, sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.6.
Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah
Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Purbalingga
Tahun 2010-2014

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah SD/MI	647	646	647	647	644
2	Jumlah SMP/MTs	111	112	114	113	111
3	Jumlah penduduk usia 7 s.d 12 th	99.346	97.329	98.383	99.105	89.560
4	Jumlah penduduk usia 13 s.d 15 th	49.201	48.737	49.265	53.222	55.752

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2015 (diolah)

Berdasarkan data rasio ketersediaan sekolah SD/MI per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun, pada kurun waktu tahun 2013-2014, rasio tersebut mengalami peningkatan dari 65,28 menjadi 71,91. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rasio ketersediaan SD/MI di Kabupaten Purbalingga cukup memadai. Sedangkan untuk SMP/MTs, dalam kurun waktu 2012-2014 mengalami penurunan dari 22,56 tahun 2010 menjadi 19,91 pada tahun 2014. Data rasio ketersediaan sekolah selengkapnya tertuang dalam Tabel berikut.

Tabel 2.7.
Rasio Ketersediaan Sekolah
Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Rasio SD/MI per 10.000 penduduk Usia 7-12 tahun	65,13	66,37	65,76	65,28	71,91
2	Rasio SMP/MTs per 10.000 penduduk Usia 13-15 tahun	22,56	22,98	23,14	21,23	19,91

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2015 (diolah)

3) Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan jumlah pendidik dan jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai proses pembelajaran yang berkualitas.

Pada periode waktu tahun 2013-2014, rasio guru terhadap murid SD/MI di Kabupaten Purbalingga meningkat dari 15,49 menjadi 18,54, yang menggambarkan ketersediaan guru belum memenuhi kondisi ideal. Kondisi berbeda pada jenjang SMP/MTs, yaitu rasio menurun dari 21,89 pada tahun 2013 menjadi 19,68 pada tahun 2014. Meskipun demikian rasio tersebut tetap menunjukkan kondisi ketersediaan guru terhadap murid cukup memadai. Permasalahannya adalah belum terwujudnya distribusi guru khususnya antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Perkembangan rasio guru dan murid di Kabupaten Purbalingga selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.8.
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
I SD/MI						
	Jumlah guru	7.614	6.100	5.815	6.555	6.410
	Jumlah murid	104.644	95.304	101.338	101.516	118.831
	Rasio	13,74	15,62	17,43	15,49	18,54
II SMP/MTs						
	Jumlah guru	2.432	2.356	2.309	2.035	2.292
	Jumlah murid	41.645	40.919	44.492	44.546	45.112
	Rasio	17,12	17,37	19,27	21,89	19,68

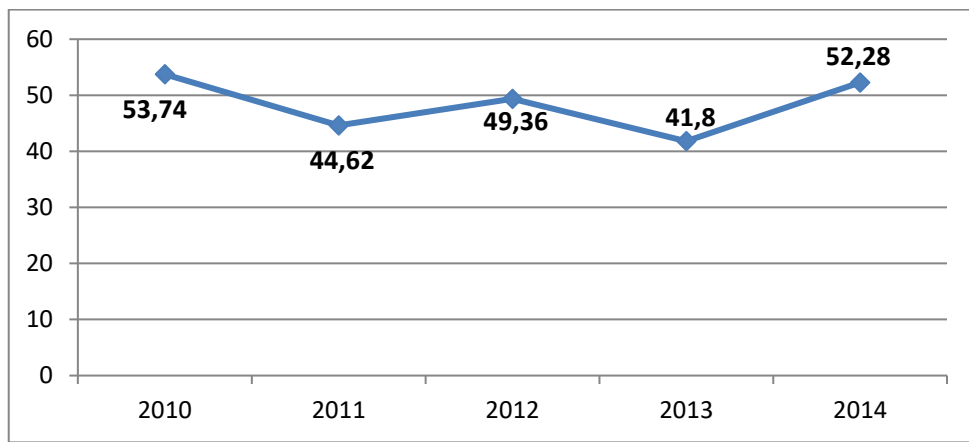
Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2015 (diolah)

b. Pendidikan Menengah

1) Angka Partisipasi Sekolah

Capaian Angka Partisipasi Sekolah pendidikan menengah di Kabupaten Purbalingga bersifat fluktuatif, dari tahun 2010 sebesar

53,74 menjadi 44,62 (Tahun 2011) dan naik di tahun 2014 menjadi 52,28. Namun demikian, kondisi tersebut belum sebanding dengan capaian Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah pendidikan menengah antara lain disebabkan belum memadainya jumlah SMA/SMK/MA di beberapa wilayah kecamatan dan rendahnya tingkat perekonomian masyarakat (sehingga lulusan SMP/MTs sudah harus bekerja). Capaian Angka Partisipasi Sekolah sebagaimana Gambar 2.18



Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2015

Gambar 2.11.

Angka Partisipasi Sekolah pada Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

2) Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk menunjukkan jumlah SMA/SMK/MA per 10.000 penduduk usia sekolah menengah. Rasio ini mengindikasikan sejauhmana ketersediaan SMA/SMK/MA mampu menampung seluruh penduduk usia sekolah menengah.

Pada kurun waktu 2010-2014, jumlah SMA/SMK/MA meningkat dari 49 unit menjadi 53 unit, dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun sebanyak 40.066 orang. Berdasarkan data tersebut, rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan menengah pada tahun 2012-2013 mengalami penurunan dari 14,17 menjadi 11,63, namun pada tahun 2014 meningkat menjadi 13,23. Kondisi tersebut

sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.9.
Rasio Ketersediaan Sekolah SMA/SMK/MA
Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah SMA/ SMK/ MA	49	50	53	53	53
Jumlah penduduk	39.882	40.341	37.394	45.561	40.066
Rasio SMA/SMK/MA per 10.000 penduduk usia 16-18 tahun	12,29	12,39	14,17	11,63	13,23

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2015 (diolah)

3) Rasio Guru terhadap Murid

Pada Tahun 2013-2014 rasio guru terhadap murid menurun dari 16,52 pada tahun 2013 menjadi 15,46 pada tahun 2014. Meskipun demikian rasio tersebut tetap menunjukkan kondisi ketersediaan guru terhadap murid cukup memadai. Permasalahannya adalah belum terwujudnya distribusi guru khususnya antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Rasio guru terhadap murid dalam kurun waktu tahun 2010-2014 sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.10.
Rasio Guru Terhadap Murid SMA/SMK/MA
Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Guru	1.443	1.505	1.484	1.513	1.699
Jumlah Murid	21.796	23.062	24.966	24.997	26.272
Rasio	15,10	15,32	16,82	16,52	15,46

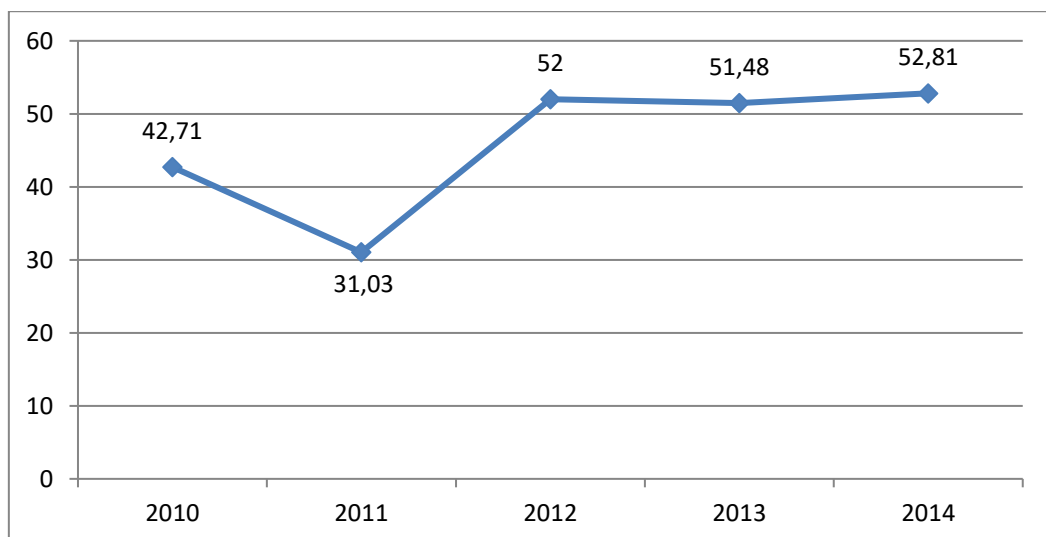
Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2015 (diolah)

c. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran strategis dalam mempersiapkan anak-anak Indonesia, menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter baik. PAUD mempersiapkan pendidikan anak sejak dini sehingga tumbuh kembang anak dan perkembangan emosional dan juga psikomotorik anak menjadi

tarantau dan terbina. PAUD mendidik anak menjadi insan yang berkualitas di kemudian hari.

Keberhasilan kinerja program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diukur melalui Indikator Angka Partisipasi Kasar. Capaian APK PAUD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2014 fluktuatif, namun cenderung meningkat. Pada tahun 2010 capaian APK PAUD sebesar 42,71%, pada tahun 2013 APK PAUD mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2012. Pada tahun 2014 APK PAUD mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 menjadi sebesar 52,81%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja lembaga PAUD dan juga tingkat kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di PAUD.



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, 2015

Gambar 2.12.
Angka Partisipasi Sekolah Kasar PAUD
Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

d. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB) dan menengah (SMA/SMK/MA) pada tahun 2010-2014 fluktuatif. Pada SD/MI/SDLB, dari 0,15 (Tahun

2010) menjadi 0,24 (Tahun 2014); SMP/MTs/SMPLB, dari 1,02 (Tahun 2010) menjadi 0,70 (Tahun 2014); dan SMA/SMK/MA, dari 0,72 (Tahun 2010) menjadi 0,96 (Tahun 2014). Selengkapnya kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11.
Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

No	Jenjang	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI/SDLB	0,15	0,19	0,19	0,65	0,24
2	SMP/MTs/SMPLB	1,02	0,47	0,35	0,29	0,70
3	SMA/SMK/MA	0,72	0,61	0,70	0,29	0,96

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, 2015

e. Angka Kelulusan

Angka kelulusan menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian Angka Kelulusan pada tahun 2013-2014 mengalami peningkatan. Angka kelulusan pada tahun 2010-2014 sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.12.
Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

No	Jenjang	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI/SDLB	99,97	98,93	98,18	99,61	99,91
2	SMP/MTs/SMPLB	79,48	97,89	97,98	99,48	99,96
3	SMA/SMK/MA	99,44	99,60	99,70	99,52	99,90

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

2. Kesehatan

a. Angka Kesakitan

Keadaan kesehatan penduduk pada suatu saat dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang status kesehatan penduduk pada umumnya. Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan, status kesehatan memberikan pengaruh pada tingkat produktivitas. Untuk mengetahui tingkat kesehatan masyarakat dengan melihat persentase keluhan kesehatan yang dialami penduduk pada satu bulan

sebelum pencacahan atau angka kesakitan. Untuk seseorang yang mengalami dua keluhan pada saat yang bersamaan dihitung satu untuk masing-masing keluhan.

Hasil Susenas 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 32,62 persen penduduk di Kabupaten Purbalingga telah mengalami keluhan kesehatan mulai dari panas, batuk, pilek, sakit kepala berulang, sakit gigi, dan lain-lain. Ini berarti bahwa pada satu bulan sebelum pencacahan ada sebanyak 32,62 persen penduduk Kabupaten Purbalingga mengalami gangguan kesehatan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi kesehatan masyarakat sedikit mengalami penurunan dilihat dari angka kesakitan tahun 2013 yaitu 31,42 persen.

Tabel 2.13.
Angka Kesakitan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 dan 2014

Rincian	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Angka Kesakitan 2013	31,82	31,02	31,42
Angka Kesakitan 2014	32,18	33,04	32,62

Sumber : Susenas 2013-2014

Jika dilihat menurut jenis kelamin pada tahun 2014, laki-laki dan perempuan yang mengalami keluhan kesehatan tidak terlalu jauh berbeda yaitu laki-laki 32,18 persen dan perempuan 33,04 persen. Perempuan sedikit lebih rentan terhadap penyakit dibandingkan laki-laki.

Kondisi yang cukup berbeda terjadi pada tahun 2013 dimana laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan lebih banyak dibandingkan kaum perempuan yaitu laki-laki 31,82 persen sementara perempuan 31,02 persen. Namun secara umum kondisi ini sedikit lebih baik dibanding tahun 2014.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa keluhan yang sering dialami oleh penduduk adalah batuk, pilek, panas dan sakit kepala berulang. Kaum perempuan lebih cenderung mengeluh sakit kepala berulang dengan melihat persentase keluhannya yang paling tinggi dibanding penyakit yang lain yaitu 15,71 persen pada tahun 2013 dan 9,98 pada tahun 2014 meskipun secara persentase menurun dalam 2 tahun terakhir. Sementara kaum laki-laki lebih cenderung mengalami keluhan batuk dan pilek yaitu sebanyak 21,43 persen pada tahun 2013 dan 18,70 persen pada tahun 2014.

Disamping itu keluhan kesehatan lainnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah keluhan kesehatan karena penyakit lain seperti campak, telinga berair/congek, sakit kuning/liver, kejang-kejang, lumpuh, pikun, termasuk juga gangguan kesehatan akibat hal lainnya seperti kecelakaan/musibah, bencana alam, tidak nafsu makan, sulit buang air besar, sakit kepala karena demam, dan lain lain. Jenis keluhan kesehatan Lainnya, terjadi kenaikan yang cukup berarti yaitu dari 53,99 persen pada tahun 2013 menjadi 61,09 persen pada tahun 2014 atau naik sekitar 7,10 persen.

Tabel 2.14.

Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Keluhan dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2014

JENIS KELUHAN	2013			2014		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Panas	7,80	5,41	6,61	7,89	4,25	6,10
2. Batuk	8,60	8,44	8,52	9,17	5,16	7,20
3. Pilek	12,83	9,99	11,42	9,53	8,98	9,26
4. Asma/Nafas sesak	3,83	1,32	2,59	2,54	0,43	1,51
5. Diare	2,78	2,09	2,44	3,23	1,84	2,54
6. Sakit Kepala Berulang	7,04	15,71	11,34	6,55	9,98	8,23
7. Sakit gigi	2,29	3,90	3,09	4,63	3,49	4,07
8. Lainnya	54,83	53,14	53,99	56,46	65,87	61,09

JENIS KELUHAN	2013			2014		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2013-2014

b. Lamanya Sakit

Untuk melihat tingkat intensitas penyakit yang diderita penduduk, maka dapat dilihat dari lamanya hari sakit. Tabel 2.14 menunjukkan distribusi penduduk yang sakit yaitu yang mempunyai keluhan kesehatan sampai mengakibatkan pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari terganggu selama sebulan yang lalu menurut lamanya hari sakit.

Tabel 2.15.

Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit Sebulan yang Lalu Menurut Lamanya Sakit dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2014

Lamanya Sakit (Hari)	Jenis Kelamin		Laki-laki+Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
< 4	91,49	91,43	91,46
4 - 7	5,48	6,42	5,96
8 - 14	1,09	1,08	1,09
15 - 21	0,57	0,14	0,35
22 - 30	1,37	0,93	1,14
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2014

Pada tabel tersebut dapat terlihat bahwa sebanyak 91,46 persen penduduk menderita sakit hanya berkisar dibawah 4 hari. Hal ini dikarenakan penyakit yang diderita adalah penyakit ringan (infeksi) seperti batuk, pilek dan sakit kepala. Namun demikian, permasalahan sanitasi lingkungan dan beberapa penyakit degeneratif lainnya tetap harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Secara umum rata-rata lama sakit penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 adalah 3,14 hari dengan rincian laki-laki 3,38 hari dan perempuan 2,90 hari. Walaupun angka kesakitan perempuan lebih tinggi namun lamanya sakit bagi perempuan lebih pendek dibanding laki-laki. Hal ini dimungkinkan kaum perempuan lebih cepat sembuh atau tetap beraktivitas meskipun belum pulih sepenuhnya dari sakit. Dibandingkan tahun 2013 rata-rata lama sakit mengalami kenaikan dari 2,63 hari menjadi 3,14 hari.

c. Pemanfaatan Fasilitas dan Sarana Kesehatan

Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan, sehingga penduduk dapat mengaksesnya dengan mudah tanpa mengalami kesulitan.

Dengan semakin membanjirnya obat-obatan yang beredar bebas di pasaran dan semakin gencarnya promosi atau iklan obat di media cetak maupun elektronik serta semakin meningkatnya pendidikan dan pengetahuan, sangat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengatasi penyakitnya yaitu cara pengobatan yang dilakukan sendiri terutama untuk penyakit-penyakit ringan. Data Susenas 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 51,84 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan pernah mengobati sendiri penyakitnya baik dengan pengobatan tradisional, modern, maupun lainnya. Sementara itu jika dirinci menurut jenis kelamin, ada sedikit perbedaan dimana penduduk perempuan yang mengobati sendiri penyakitnya sebanyak 51,69 persen sedangkan laki-laki lebih banyak yaitu 51,99 persen.

Dari seluruh penduduk yang pernah mengobati sendiri penyakitnya, sebagian besar yaitu 88,15 persen penduduk memilih menggunakan obat modern untuk mengatasi keluhan kesehatannya. Sementara itu penduduk yang memilih menggunakan obat tradisional

sebanyak 6,05 persen dan yang menggunakan obat modern dan tradisional 4,55 persen. Pemilihan obat modern dianggap lebih baik khasiatnya dibanding obat tradisional. Selain itu juga tidak terlalu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang mengobati sendiri penyakitnya dalam pemilihan jenis obat digunakan.

Tabel 2.16.

Persentase Penduduk Yang Berobat Sendiri Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Obat Yang Digunakan Kabupaten Purbalingga Tahun 2014

Jenis Obat Yang Digunakan	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Modern	87,20	89,06	88,15
2. Tradisional	4,99	7,08	6,05
3. Lainnya	0,40	0,88	0,66
4. Modern dan Tradisional	6,52	2,67	4,55
5. Modern dan Lainnya	0,89	0,31	0,59
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2013

Salah satu indikator lain pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kesehatan adalah banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan ke fasilitas kesehatan. Berdasarkan Susenas 2014 penduduk Kabupaten Purbalingga yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan ke fasilitas kesehatan tercatat sebanyak 53,70 persen dengan rincian laki-laki 50,25 persen dan perempuan 56,97 persen. Kenyataannya perempuan lebih cenderung untuk berobat ke pelayanan kesehatan dibanding laki-laki.

Tabel 2.15 memperlihatkan bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan (tempat pengobatan) yang banyak dikunjungi penduduk adalah tenaga kesehatan medis seperti praktek dokter/poliklinik (22,30 persen), puskesmas/pustu (27,16 persen) dan praktek tenaga kesehatan (41,08 persen). Untuk pengobatan non medis seperti praktek pengobatan tradisional, dukun bersalin dan lainnya persentasenya sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran penduduk akan pengobatan pada tenaga medis sudah

cukup baik. Selain itu fenomena ini juga dapat menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan sudah banyak dijumpai di hampir seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga baik di pedesaan maupun perkotaan sehingga akses masyarakat cukup mudah dan murah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan medis. Untuk tempat rawat jalan seperti rumah sakit baik pemerintah maupun swasta, persentasenya tidak terlalu besar. Hal ini dimungkinkan karena lokasinya yang berada di pusat kota sehingga penduduk yang tinggal di pedesaan lebih cenderung berobat jalan ke fasilitas kesehatan terdekat.

Tabel 2.17.
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat Jalan dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2014

Tempat Berobat Jalan	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit Pemerintah	4,08	3,39	3,70
Rumah Sakit Swasta	4,54	2,81	3,59
Praktek Dokter/Poliklinik	23,85	21,03	22,30
Puskesmas/Pustu	24,16	29,65	27,16
Praktek Nakes	41,14	41,03	41,08
Praktek Batra	1,08	0,73	0,89
Dukun Bersalin	0,00	0,00	0,00
Lainnya	1,15	1,36	1,28
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2014

Derajat kesehatan masyarakat diharapkan semakin membaik dengan adanya fasilitas kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat, sehingga dapat secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada perubahan pola pikir tentang pola hidup sehat. Selain itu, akses masyarakat juga semakin mudah, murah dan merata terhadap pelayanan kesehatan.

d. Penolong Kelahiran Terakhir

Selain ketersediaan fasilitas dan sarana kesehatan, data mengenai penolong proses kelahiran dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Jenis tenaga penolong proses kelahiran menentukan keberhasilan kelahiran dan akan berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan bayi yang ditolong pasca kelahiran yaitu mengurangi kematian bayi dan kematian maternal (kematian ibu). Pelayanan yang aman dilakukan oleh dokter atau bidan pada saat proses kelahiran bayi.

Pada tabel 2.17 dapat kita lihat bahwa persentase balita yang proses kelahirannya ditolong oleh bidan sebesar 74,86 persen, ditolong dokter 15,58 persen dan yang ditolong oleh dukun hanya 9,56 persen. Hal yang cukup menarik adalah untuk bayi perempuan yang persalinannya ditolong oleh tenaga dukun bayi persentasenya lebih tinggi dibandingkan bayi laki-laki. Namun secara umum masyarakat lebih cenderung memilih tenaga medis dalam proses penolong kelahiran. Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa tingkat kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Purbalingga selama tahun 2014 sudah cukup baik.

Tabel 2.18.
Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2014

Penolong Kelahiran Terakhir	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Dokter	14,28	16,75	15,58
Bidan	78,96	71,18	74,86
Dukun	6,76	12,07	9,56
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2014

Tenaga kesehatan bidan cenderung lebih banyak dikunjungi dikarenakan bidan praktek maupun bidan desa aksesnya mudah, selain

dekat dan bisa kapan saja, disamping itu biayanya pun dapat terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Masih adanya masyarakat yang menggunakan tenaga dukun dalam menolong proses kelahiran dimungkinkan terjadi di daerah pedesaan yang tingkat pengetahuan kesehatannya masih rendah dan masih percaya dengan tenaga dukun.

e. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Selain penolong kelahiran, pemberian air susu ibu (ASI) sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak. Pola dan lama pemberian ASI memberikan pengaruh yang sangat positif pada kondisi kesehatan dan proses tumbuh kembang anak balita secara optimal. Pemberian ASI di Kabupaten Purbalingga sudah cukup baik. Menurut data Susenas 2014, persentase balita 0-4 tahun yang pernah diberi ASI sebanyak 96,41 persen dari seluruh balita di Kabupaten Purbalingga dengan rincian balita laki-laki 94,98 persen dan balita perempuan 97,70 persen.

Pemberian ASI dianjurkan oleh para ahli kesehatan karena dipercaya mempunyai manfaat yang sangat besar baik bagi ibu maupun untuk kesehatan bayi. Balita 0-4 tahun yang diberi ASI selama lebih dari 24 bulan sebanyak 31,77 persen dimana untuk balita laki-laki 32,39 persen dan balita perempuan 31,22 persen. Secara umum balita laki-laki lebih lama disusui hingga lebih dari 2 tahun.

Tabel 2.19.
Persentase Balita (0-4 tahun) yang Pernah Diberi ASI Menurut Lamanya Pemberian ASI dan Jenis Kelamin Kab. Purbalingga Tahun 2014

Lama Pemberian ASI (bulan)	Jenis Kelamin		Laki- laki+Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 5	13,14	12,42	12,75
6 – 11	14,16	16,48	15,40
12 – 17	16,40	18,45	17,49
18 – 23	23,91	21,43	22,59
24 +	32,39	31,22	31,77
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2014

Sementara itu pemberian ASI untuk balita 2-4 tahun sebagian besar sudah lebih dari 24 bulan yaitu 52,01 persen dengan persentase balita laki-laki lebih tinggi dari balita perempuan. Secara umum rata-rata lama pemberian ASI balita 2-4 tahun di Kabupaten Purbalingga adalah 21,67 bulan dengan perbandingan balita laki-laki 22,03 bulan dan balita perempuan 21,36 bulan.

Tabel 2.20.
Persentase Balita (2-4 tahun) yang Pernah Diberi ASI Menurut Lamanya Pemberian ASI dan Jenis Kelamin Kab. Purbalingga Tahun 2014

Lama Pemberian ASI (bulan)	Jenis Kelamin		Laki- laki+Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 5	2,51	4,05	3,34
6 – 11	6,53	8,76	7,74
12 – 17	11,26	8,75	9,90
18 – 23	25,89	27,96	27,01
24 +	53,81	50,48	52,01
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2014

f. Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2014 mengalami kenaikan dengan demikian beban pelayanan puskesmas semakin berat dan berpengaruh pada kualitas pelayanan. Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk setiap tahunnya belum memenuhi standar Kementerian Kesehatan RI yaitu satu Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Data selengkapnya sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.21.
Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2014

Tahun	Jumlah Puskesmas (unit)	Jumlah Penduduk (orang)	Rasio
2011	22	865.461	1 : 39.339
2012	22	881.831	1 : 39.777
2013	22	884.683	1 : 40.213
2014	22	894.062	1 : 40.639

Sumber: Purbalingga Dalam Angka, 2015

g. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Dalam kurun waktu 2011-2014 rasio dokter gigi per satuan penduduk di Kabupaten Purbalingga lebih kecil dibandingkan dokter spesialis dan dokter umum per satuan penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa dokter gigi paling sedikit dibandingkan dokter umum dan dokter spesialis per satuan penduduk. Disamping itu rasio dokter umum, spesialis, dan gigi cenderung mengalami peningkatan, namun demikian keberadaan dokter tersebut masih perlu ditingkatkan guna meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat. Data perkembangan rasio dokter dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.22.
Perkembangan Rasio Dokter
Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2014

Tahun	Dokter Umum		Dokter Spesialis		Dokter Gigi	
	Jumlah	Ratio	Jumlah	Ratio	Jumlah	Ratio
2011	25	0,03	28	0,03	3	0,00
2012	21	0,02	31	0,04	3	0,00
2013	55	0,06	57	0,06	7	0,01
2014	45	0,05	60	0,07	5	0,01

Sumber: Purbalingga Dalam Angka, 2015

h. Rasio Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk

Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga

paramedis di Kabupaten Purbalingga dari tahun 2011-2014 cenderung meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.22

Tabel 2.23.
Perkembangan Rasio Tenaga Paramedis
Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2014

Tahun	Perawat		Bidan		Tenaga Farmasi		Tenaga Gizi	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
2011	265	0,31	36	0,04	24	0,03	28	0,03
2012	294	0,34	34	0,04	23	0,03	38	0,04
2013	427	0,48	71	0,08	16	0,02	38	0,04
2014	484	0,54	93	0,10	40	0,04	33	0,04

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, 2015 (diolah)

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

Urusan pekerjaan umum merupakan salah satu urusan yang menangani pemenuhan infrastruktur dasar pada suatu daerah. Pelayanan urusan pekerjaan umum difokuskan pada pelayanan urusan Jalan dan Jembatan, Drainase, persampahan. Secara umum kondisi pelayanan urusan pekerjaan umum di Kabupaten Purbalingga masih dalam kondisi yang kurang baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja indikator yang cukup rendah. Capaian fokus pelayanan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diuraikan sebagai berikut.

1). Jembatan dan Jalan

Jalan merupakan salah satu infrastruktur penting di Kabupaten Purbalingga yang perlu mendapat perhatian. Jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Purbalingga tiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2010 Persentase panjang jalan dengan lebar $\geq 6,00$ m mencapai 39,91 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 63,11%. Kondisi panjang jalan di Kabupaten Purbalingga tahun 2010 - 2014 sudah mencapai 710.204 m. Persentase jalan kondisi baik menunjukkan peningkatan dari sebesar 64,21% pada

tahun 2010 menjadi sebesar 86,57% pada tahun 2014. Kerusakan jalan di Kabupaten Purbalingga antara lain disebabkan kondisi tanah di Kabupaten Purbalingga yang cenderung labil. Selain itu kerusakan jalan juga dipengaruhi oleh tonase kendaraan yang seringkali melebihi kapasitas jalan, sehingga mempercepat kerusakan jalan.

2). Drainase

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan.

Drainase di Kabupaten Purbalingga juga perlu mendapatkan perhatian dimana drainase dalam kondisi baik baru mencapai 20% ditahun 2012 dan meningkat menjadi 45,45% pada tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan banyak saluran drainase dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi. Kerusakan drainase ini perlu segera ditangani karena drainase berfungsi sebagai pengendali air permukaan. Drainase yang tersumbat dapat menyebabkan genangan air dan kerusakan jalan serta bangunan yang ada. Pentingnya peningkatan kualitas saluran drainase salah satunya untuk mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir.

3). Sumberdaya Air

Potensi sumberdaya air di Kabupaten Purbalingga cukup baik untuk mendukung penyediaan kebutuhan air baik untuk irigasi maupun untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Capaian kinerja untuk indikator rasio jaringan irigasi selama 5 tahun terakhir 2010-2014 tidak mengalami perubahan/peningkatan yaitu 17,2 m/ha sedangkan panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 32,21% pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 53,1% pada tahun 2012, dan menurun menjadi hanya sebesar 38,1% pada tahun 2013. Selanjutnya dilihat dari ketersediaannya air irigasi untuk pertanian mengalami peningkatan, pada tahun 2010 ketersediaan air irigasi untuk pertanian mencapai angka 62%, dan pada tahun 2014 mencapai sebesar 70%.

4). Penataan Ruang

Kinerja Penataan ruang menunjukkan capaian yang baik, terlihat dari semua kawasan perkotaan telah memiliki RDTRK. Tingkat penyimpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Purbalingga sebesar 0 (nol) persen, artinya tidak terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan ruang. Namun demikian, masih banyak bangunan yang belum memiliki Ijin mendirikan bangunan (IMB). Tentunya kedepan perlu ditingkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dengan optimalisasi perijinan IMB.

Secara rinci capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kurun waktu tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24.
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2015

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Panjang jalan	km	710,204	710,204	710,204	710,204	784,233
2.	Ppanjang jalan dalam kondisi baik / sedang	%	72,49	75,96	80,70	86,57	85,27
3.	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota (lebih dari 30cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali seta	%	20	20	45,45	45,45	45,45
4.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	NA	2,10	10,02	10,56	10,87
5.	Rasio Jaringan Irigasi	m/ha	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
6.	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	33,9	53,1	36,6	38,1	
7.	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	64	66	68	70	
8.	Jumlah Perda rencana detail tata ruang kawasan (RDTRK) perkotaan yang masih berlaku		2 Raperda RDTRK	1	2	2	2
9.	Jumlah kawasan perkotaan yang sudah memiliki RDTRK	80	90	90	100	100	100
10.	Tingkat penyimpangan pemanfaatan ruang	%	0	0	0	0	0

Keterangan: *) angka sementara

Sumber Data : DPU Kabupaten Purbalingga

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pemerintah daerah pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman memiliki kewenangan penyediaan perumahan bagi korban bencana, perbaikan kondisi kawasan permukiman, pencegahan perumahan

dan kawasan permukiman kumuh, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), serta Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kinerja pembangunan perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari beberapa indikator seperti luas kawasan kumuh, persentase rumah tidak layak huni, persentase rumah tangga bersanitasi, dan persentase rumah tangga menggunakan air bersih. Secara umum kondisi perumahan dan permukiman di kabupaten Purbalingga masih perlu ditingkatkan. Jumlah rumah tidak layak huni tahun 2014 masih banyak, yaitu sejumlah 27.533 atau 11 persen. Sedangkan cakupan sanitasi dan air bersih sudah cukup baik dengan capaian lebih dari 70% pada tahun 2014. Walaupun demikian kedepan perlu ditingkatkan agar akses masyarakat terhadap air bersih dan sarana sanitasi semakin baik.

Secara rinci capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam kurun waktu tahun 2010-2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25.
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2013

No	Indikator	Satuan	Capaian			
			2010	2011	2012	2013
1	Luas kawasan kumuh	ha	0	0	0	0
2	Jumlah rumah tidak layak huni	unit	1528	811	94	13.814
3	Persentase rumah tidak layak huni	%	0,01	0,004	0,001	4,7%
4	Persentase rumah tangga bersanitasi	%				74,89
5	Persentase rumah tangga menggunakan air bersih	%				98,48

Sumber Data : DPU Kabupaten Purbalingga

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) di Kabupaten Purbalingga dalam jangka waktu 2010-2014 mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat penyelesaian pelanggaran K3 pada tahun 2012 sebesar 74 persen. Sementara tahun 2013 merupakan yang terendah dengan 41 persen. Sementara angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Purbalingga juga mengalami fluktuasi, dimana angka kriminalitas tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 416 kasus sementara terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 188 kasus. Kasus kriminalitas yang tertangani menunjukkan penurunan dari sebesar 95,26% pada tahun 2010 menjadi sebesar 71,81% pada tahun 2014.

Cakupan patroli petugas Satpol PP dalam 24 jam selama kurun waktu 2010-2014 berjalan secara konsisten yaitu sebesar 162 kali. Dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Satpol PP didukung sejumlah aparat. Sampai dengan tahun 2014 rasio jumlah satpol PP per 10.000 penduduk sebesar 1,5. Tugas Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan dibantu oleh masyarakat yang bertugas sebagai linmas. Tahun 2013 jumlah linmas per 10.000 penduduk sebesar 1,5. Sementara untuk mendukung tugas linmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan tersedia sarana berupa Pos Siskamling. Tahun 2014 rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan sebesar 14,44.

Peningkatan wawasan kebangsaan dilakukan dengan memberikan pengarahan dan sosialisasi terhadap Ormas, LSM dan OKP. Tahun 2012 sebanyak 13 Ormas, LSM dan OKP mendapatkan pengarahan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, dan tahun 2014 sebanyak 13 Ormas, LSM dan OKP mendapatkan pengarahan dan sosialisasi wawasan kebangsaan.

Kebebasan berorganisasi di masyarakat menunjukkan perkembangan yang baik, terlihat dari jumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun. Berkaitan dengan

partisipasi masyarakat dalam pemilu menunjukkan penurunan dari sebesar 71,20% pada Pemilihan Bupati tahun 2010, menjadi hanya 59,02% pada pemilihan Gubernur. Pembinaan politik daerah dilakukan dengan kegiatan pembinaan politik daerah, tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dilaksanakan masing-masing 2 kali.

Perkembangan kinerja urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26.
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2014

No	Indikator	Satuan	Capaian			
			2011	2012	2013	2014
1.	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	%	50,38	60,32	83	84
2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di Kabupaten	%	60	74	41	42
1.	Angka kriminalitas	kasus	416	392	368	188
2.	Angka kriminalitas yang tertangani	kasus	328	274	304	135
		%	78,85	69,90	82,61	71,81
3.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	kali	162	162	162	162
4.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja	per 10.000 penduduk	1,5	1,6	1,5	1,5
5.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	per 10.000 penduduk	1,5	1,5	1,5	1,5
6.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Persen	14,44	14,44	14,44	14,44
1.	Peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM dan OKP	Ormas, LSM dan OKP	NA	13	13	13
1.	Kegiatan pembinaan politik daerah	kali	2	2	2	2
2.	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	-	-	59,02 (Pilgub)	
3.	Jumlah LSM (Lembaga swadaya masyarakat) yang terdaftar	LSM	26	27	46	
4.	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar	Ormas	19	55	82	

Sumber Data : Satpol PP dan Kesbangpol Kabupaten Purbalingga

6. Sosial

Undang-undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa negara menjamin kehidupan yang layak dan bermartabat bagi rakyatnya sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945, serta memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial. Negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Untuk memenuhi amanat tersebut pemerintah daerah wajib melaksanakan urusan sosial yang meliputi kebijakan, perencanaan, kerjasama, pembinaan bidang sosial, identifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), pelaksanaan, pengawasan, pelaporan bidang sosial, sarana dan prasarana bidang sosial dan pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial.

Persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Purbalingga dalam penanganan masalah sosial adalah jumlah PMKS yang semakin meningkat. Tahun 2009 jumlah PMKS mencapai 75.545 jiwa dan tahun 2010 jumlah PMKS menjadi 224.926. Pada tahun 2011 menjadi 219.914, menurun tahun 2012 sebanyak 210.000, tahun 2013 menurun 199.912 dan tahun 2014 menurun menjadi 190.702.

Cakupan PMKS yang menerima bantuan sosial masih relatif sedikit. Partisipasi masyarakat dalam mendukung program bantuan PMKS juga masih perlu didorong untuk perlu ditingkatkan. Meskipun jumlah panti sosial meningkat, namun belum mampu mengatasi masalah PMKS yang juga terus meningkat jumlahnya sangat besar. Partisipasi swasta dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) juga perlu didorong dalam mendukung program

penaanganan PMKS. Capaian kinerja PMKS yang memperoleh bantuan persentasenya masih sangat rendah dari total jumlah PMKS. Rendahnya capaian kinerja ini akibat jumlah PMKS yang harus di cover terlalu banyak. Misalnya jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi mencapai 4.802, keluarga miskin 29.088, lansia terlantar yang baru mendapatkan bantuan hanya 155 orang dari 4.334 lansia terlantar.

Dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial hasil kinerja selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27.
Capaian Kinerja Urusan Sosial Di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2011 – 2014

No	Indikator	Satuan	Capaian			
			2011	2012	2013	2014
	Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Keluarga Miskin.					
1	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	4,51	4,80	4,61	
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	0,058	0,294	0,443	
3	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%				
4	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%		1,534	0,089	
5	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%		1,123	1,145	
6	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	100	100	100	
7	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	%			18	
8	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	0	0	0	

No	Indikator	Satuan	Capaian			
			2011	2012	2013	2014
	Program Penanggulangan Bencana					
9	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	%	100	100	100	100

Sumber Data : Dinsosnakertrans Kab. Purbalingga

2.3.2. Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja 15 tahun ke atas periode Tahun 2010-2014 bersifat fluktuatif dan meningkat dari 52,52% (Tahun 2013) menjadi 67,31% (Tahun 2014). Secara absolut juga mengalami peningkatan dari 337.714 orang menjadi 443.845 orang. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.27

Tabel 2.28.
Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

No	Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang)	Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang)	Rasio Kesempatan Kerja (%)
1	2010	456.686	619.633	73,70
2	2011	418.158	627.858	66,60
3	2012	466.188	641.356	72,69
4	2013	337.714	642.988	52,52
5	2014	443.845	659.371	67,31

Sumber: Purbalingga dalam Angka, 2015 (diolah)

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam

perekonomian Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014.

Tabel 2.29.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2014

Jenis Kelamin	Tahun	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	85,69	84,18
Perempuan	62,40	58,36
Total	73,76	70,95

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan dengan angkatan kerja. Menurut Sakernas, pengangguran mencakup mereka yang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena putus asa sudah berkali-kali mencari pekerjaan namun belum berhasil. Secara rinci kondisi di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 2.30.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2014

Jenis Kelamin	Tahun	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	6,10	6,82
Perempuan	5,22	2,80
Total	5,72	5,13

Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga

d. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Persentase pencari kerja yang ditempatkan terhadap pencari kerja yang terdaftar dalam kurun waktu tahun 2010-2014 mengalami peningkatan dari 16,89% menjadi 37,05%. Namun demikian pada tahun 2012 mengalami penurunan dari 46,43% (2011) menjadi 10,54%. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.30

Tabel 2.31.
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2010-2014

Tahun	Pencari Kerja yang Terdaftar	Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persentase
2010	18.569	3.137	16,89
2011	9.575	4.446	46,43
2012	4.971	524	10,54
2013	13.959	3.128	22,41
2014	12.012	4.450	37,05

Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Purbalingga, 2015

e. Penduduk yang Bekerja

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan/keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Indikator yang mengukur tingkat kesempatan kerja penduduk adalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yaitu perbandingan penduduk usia kerja yang bekerja dengan angkatan kerja. Indikator ini berkebalikan dengan tingkat pengangguran. Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Purbalingga tahun 2014 sebesar 94,87 dan tahun 2013 sebesar 94,28.

Menurut data hasil Sakernas 2014 seperti ditunjukkan pada tabel 2.31, penduduk yang bekerja 60,61 persennya adalah lulusan SD kebawah termasuk diantaranya tidak/belum pernah sekolah sebesar 3,65 persen. Jumlah penduduk yang bekerja dengan pendidikan SLTP sebesar 20,42 persen, berpendidikan SLTA 13,46 persen sedangkan yang berpendidikan diploma hingga srata 2 hanya 5,51 persen. Masih besarnya penduduk bekerja dengan pendidikan SD kebawah menggambarkan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga sebagian besar adalah tenaga kerja terampil yang tidak mengharuskan pendidikan tinggi.

Tabel 2.32.
Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Kabupaten Purbalingga Tahun 2014

Pendidikan Yang Ditamatkan	Jenis Kelamin		Laki-laki+Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum sekolah	2.77	4.83	3.65
Tidak/belum tamat SD	19.88	21.77	20.69
SD/MI	38.40	33.45	36.27
SLTP	18.59	22.86	20.42
SLTA	14.62	11.90	13.46
DI/DII/DIII/S1	5.74	4.91	5.39
S2, S3	0.00	0.27	0.12
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber :Sakernas 2014

Sementara itu jika dilihat menurut lapangan usaha utama maka penduduk usia kerja sebagian besar bekerja di manufaktur yaitu sebesar 40,98 persen, pertanian 30,51 persen, disusul jasa 28,52 persen.

Tabel 2.33.
Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2014

Lapangan Usaha Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	35.38	24.09	30.51
Manufaktur	37.46	45.60	40.98
Jasa	27.16	30.31	28.52
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sakernas 2014

Pada tabel 2.32 juga memperlihatkan bahwa untuk tenaga kerja laki-laki dan perempuan lebih mendominasi di manufaktur namun jika dilihat menurut jenis kelamin proporsi perempuan lebih banyak yang bekerja di manufaktur (industri) yaitu sebesar 45,60 persen, sedangkan tenaga kerja laki-laki di manufaktur 37,46 persen. Kondisi

ini sesuai dengan keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Purbalingga dimana industri pengolahan khususnya industri rambut palsu dan industri bulu mata palsu di Purbalingga banyak merekrut tenaga kerja perempuan.

Tabel 2.34.
Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Kabupaten Purbalingga Tahun 2014

Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki+Permp
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	14.15	11.29	12.91
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tdk dibayar	28.80	11.95	21.53
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	5.38	0.90	3.45
Buruh/Karyawan/Pegawai	32.03	44.51	37.41
Pekerja Bebas Pertanian/Non Pertanian	16.48	6.57	12.20
Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	3.17	24.79	12.50
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sakernas 2014

Selanjutnya penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama pada tabel 2.33. Terlihat bahwa sebanyak 37,41 persen penduduk yang bekerja adalah berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai dengan persentase laki-laki 32,03 persen dan perempuan 44,51 persen. Mayoritas perempuan yang bekerja di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai buruh dan juga sebagai pekerja keluarga yaitu 24,79 persen. Sementara penduduk laki-laki selain sebagai buruh, sebagian besar juga berstatus sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar yaitu 28,80 persen yang bekerja di lapangan pekerjaan pertanian.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan Bekerja Di Swasta

Peningkatan kualitas hidup perempuan dilaksanakan melalui berbagai bidang pembangunan, diantaranya dengan meningkatkan partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga swasta.

Tabel 2.35.
Capaian Kinerja pembangunan Urusan PP dan perlindungan Anak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Pekerja Perempuan (orang)	177.075	172.153	179.403	188.083	189.949
2	Jumlah Pekerja Perempuan di lembaga swasta (orang)	129.024	120.154	111.284	184.732	188.131
3	Persentase Pekerja Perempuan di lembaga swasta (%)	72,86	69,79	62,03	98,22	99,04

Sumber: Sakernas BPS, 2010-2014 (diolah)

b. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Purbalingga berdasarkan data Sakernas menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja perempuan pada Tahun 2013 mengalami penurunan bila dibandingkan periode Tahun 2014. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.35

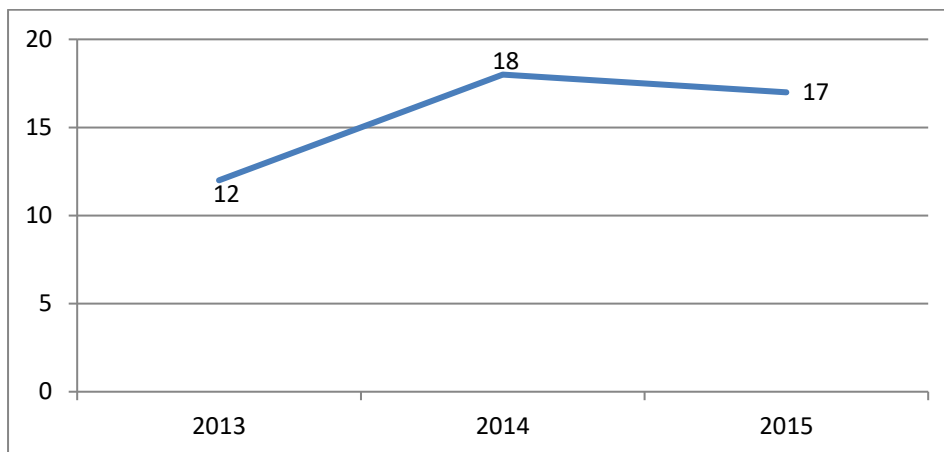
Tabel 2.36.
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah penduduk usia kerja perempuan (orang)	312.851	315.485	314.665	318.028	334.840
2	Jumlah angkatan kerja perempuan (orang)	181.433	184.842	199.920	325.745	195.415
3	Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk usia kerja (%)	57,99	58,59	63,53	102,43	58,36

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga, Sakernas, 2014

c. Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada Gambar 2.20



Gambar 2.13.
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2015

3. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Capaian kinerja pembangunan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat pada tabel 2.37, Tabel 2.38, dan Tabel 2.39

Tabel 2.37.
Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera Tahun 2013-2015

No	Uraian dan Indikator	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Laju pertumbuhan penduduk	0,67	0,32	0,9
2	Jumlah ketersediaan alat dan obat kontrasepsi	143.250	145.670	143.826
3	Persentase kepesertaan KB/ Contraceptive Prevalence Rate	80,12%	79,47%	76,40%
4	Jumlah peserta aktif KB pria	5.368	5.233	4.593
5	Jumlah peserta KB aktif	153.185	153.419	143.826
6	Jumlah penanganan kasus terkait layanan KB	22	5	1
7	Persentase penanganan kasus terkait layanan KB	100%	100%	100%

Sumber: BKBPP Kabupaten Purbalingga, 2015

Tabel 2.38.
Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera
Tahun 2013-2015

No	Uraian dan Indikator	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Jumlah kelompok akseptor/ institusi masyarakat yang aktif	22	23	18
2	Jumlah kelompok akseptor/ institusi masyarakat yang dibina	24	26	28

Sumber: BKBPP Kabupaten Purbalingga, 2015

Tabel 2.39.
Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera
Tahun 2013-2015

No	Uraian dan Indikator	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Jumlah keluarga sesuai norma keluarga kecil bahagia dan sederhana	86.358	86.790	88.005
2	Jumlah keluarga pra sejahtera	73.935	71.844	71.948
3	Jumlah keluarga sejahtera I	54.124	58.112	57.910
4	Jumlah keluarga sejahtera II	73.780	77.140	77.443
5	Jumlah keluarga sejahtera (KS III dan KS III+)	73.774	80.843	81.135

Sumber: BKBPP Kabupaten Purbalingga, 2015

4. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan;(d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan.

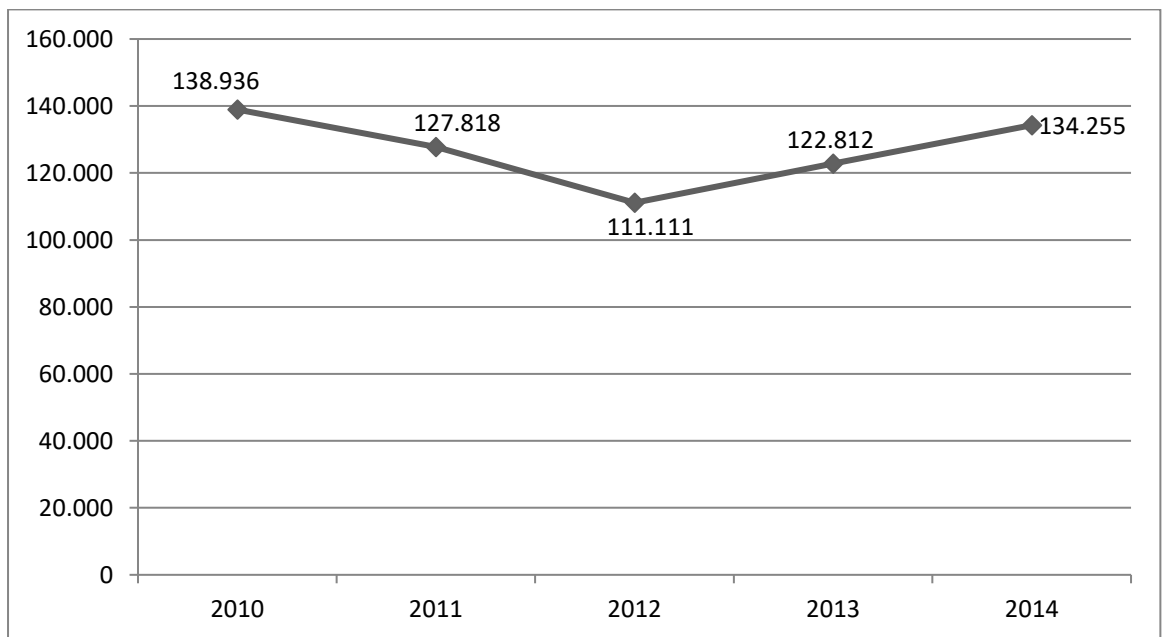
Ketahanan pangan di Jawa Tengah secara umum, semakin baik dan kondusif. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut:

- a. Produksi komoditas pangan strategis menunjukkan pertumbuhan yang positif;
- b. Ketersediaan pangan cukup mantap dan mampu mencukupi kebutuhan bagi seluruh penduduk Jawa Tengah;

- c. Harga pangan relatif stabil dan terjangkau masyarakat baik secara umum maupun menjelang hari besar keagamaan;
- d. Peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan semakin meningkat.

Untuk menjaga ketersediaan pangan telah dilakukan upaya untuk mempertahankan luas lahan sawah di Kabupaten Purbalingga di tahun 2008 dan 2012 secara berturut-turut sebesar 20.961 Ha dan 20.737 Ha dengan luas penurunan lahan sawah sebesar 224 Ha. Sehingga persentase penurunan lahan sawah sebesar 1,07%.

Jumlah penduduk yang bekerja disektor pertanian dalam kurun waktu 2010-2015 mengalami penurunan dari tahun 2010 dan naik kembali ditahun 2013 sampai 2014. Secara rinci dapat dilihat pada gambar 2.21



Sumber : Jawa Tengah dalam Angka 2011-2015

Gambar 2.14.
Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor Pertanian di Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

5. Pertanahan

Pelayanan umum kepa masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara lain dengan memberikan insentif

kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian, serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan lindung dan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

Tabel 2.40.
Luas Wilayah dirinci Menurut Penggunaan Tanah, 2013-2014

Penggunaan Tanah	2013		2014	
	Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)
Sawah	21.895	28,16	21.849	28,1
Perkampungan	19.072	24,53	19.083	24,54
Kebun Campur	4.532	5,83	4.532	5,83
Tegalan	17.344	22,3	17.344	22,3
Perkebunan	16	0,02	16	0,02
Perikanan	95	0,12	95	0,12
Hutan	11.328	14,57	11.328	14,57
Lain-lain	3.481	4,48	3.516	4,52
Jumlah	77.764	100,00	77.764	100,00

Sumber: Purbalingga Dalam Angka 2015

6. Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga dapat ditunjukkan dengan penerapan dan pencapaian target SPM Bidang Lingkungan Hidup, yaitu informasi status mutu air, informasi status mutu udara dan jumlah pengaduan dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti. Selengkapnya untuk kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Kabupaten Purbalingga selama tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel 2.40

Tabel 2.41.
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2015

No	Indikator	2013	2014	2015
1	Informasi status mutu air (SPM) sungai	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu
2	Informasi status mutu udara ambien (SPM)	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu	memenuhi baku mutu
3	Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM) %	100%	100%	100%

Sumber: BLH Kabupaten Purbalingga, 2015

7. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya, Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, sstatus kegiatan, status pekerjaan, status kecacatan dan lain sebagainya.

Tabel 2.42.
Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga
Per Kecamatan Tahun 2015

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA			JUMLAH KEPALA KELUARGA MEMILIKI KARTU KELUARGA					
		L	P	JML	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		KECAMATAN	
					N	%	N	%	N	%
1	Kemangkon	16.325	3.469	19.794	16.088	98,55	3.106	89,54	19.194	96,97
2	Bukateja	19.191	4.082	23.273	18.978	98,89	3.768	92,31	22.746	97,74
3	Kejobong	13.384	2.401	15.785	13.176	98,45	2.094	87,21	15.270	96,74
4	Kaligondang	16.397	3.828	20.225	16.287	99,33	3.617	94,49	19.904	98,41
5	Purbalingga	15.237	3.356	18.593	15.094	99,06	3.173	94,55	18.267	98,25
6	Kalimanah	14.527	2.580	17.107	14.315	98,54	2.304	89,30	16.619	97,15
7	Kutasari	16.068	2.723	18.791	15.875	98,80	2.406	88,36	18.281	97,29
8	Mrebet	20.124	3.117	23.241	19.773	98,26	2.589	83,06	22.362	96,22
9	Bobotsari	13.959	2.669	16.628	13.775	98,68	2.394	89,70	16.169	97,24
10	Karangreja	11.805	1.088	12.893	11.655	98,73	846	77,76	12.501	96,96
11	Karanganyar	10.069	2.055	12.124	9.902	98,34	1.855	90,27	11.757	96,97
12	Karangmoncol	14.200	2.515	16.715	13.920	98,03	2.025	80,52	15.945	95,39
13	Rembang	17.161	2.652	19.813	16.788	97,83	1.994	75,19	18.782	94,80
14	Bojongsari	14.510	2.733	17.243	14.340	98,83	2.432	88,99	16.772	97,27

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA			JUMLAH KEPALA KELUARGA MEMILIKI KARTU KELUARGA					
		L	P	JML	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		KECAMATAN	
					N	%	N	%	N	%
15	Padamara	10.995	1.708	12.703	10.913	99,25	1.573	92,10	12.486	98,29
16	Pengadegan	10.071	1.802	11.873	10.005	99,34	1.680	93,23	11.685	98,42
17	Karangjambu	5.972	831	6.803	5.902	98,83	674	81,11	6.576	96,66
18	Kertanegara	8.671	1.832	10.503	8.590	99,07	1.671	91,21	10.261	97,70
	JUMLAH	248.666	45.441	294.107	245.376	98,68	40.201	88,47	285.577	97,10

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, 2015

Tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 294.107 kepala keluarga di Kabupaten Purbalingga yang sudah memiliki Kartu Keluarga Nasional sampai akhir 2015 sebanyak 285.577 kepala keluarga atau 97,10%. Jika menurut wilayah kecamatan, dapat dilihat bahwa wilayah Kecamatan Kaligondang merupakan wilayah dengan persentase kepemilikan KK tertinggi 98,41% yang diikuti wilayah Kecamatan Purbalingga yakni 98,25%. Sedangkan persentase kepemilikan kartu keluarga terendah terdapat di wilayah Kecamatan Rembang sebanyak 94,80%.

b. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

Seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk hampir selalu menjadi persyaratan publik lainnya di Kabupaten Purbalingga sehingga hampir semua Penduduk (legal) memiliki KTP-el. Sampai dengan akhir tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang memiliki KTP dan telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 654.938 jiwa (91,28%) dari wajib KTP sebanyak 716.907 jiwa sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.42 berikut.

Tabel 2.43.
Hasil Pelaksanaan Perekaman KTP-EL di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015

NO	KECAMATAN	JUMLAH KTP-EL				
		JUMLAH WAJIB KTP KUOTA	TEREKAM			
			JUMLAH	%	KURANG	%
1	KEMANGKON	45.046	43.170	95,84	1.876	4,16
2	BUKATEJA	54.513	51.296	94,10	3.217	5,90
3	KEJOBONG	36.821	33.530	91,06	3.291	8,94
4	KALIGONDANG	45.354	42.884	94,55	2.470	5,45
5	PURBALINGGA	44.250	41.448	93,67	2.802	6,33

NO	KECAMATAN	JUMLAH KTP-EL				
		JUMLAH WAJIB KTP KUOTA	TEREKAM			
			JUMLAH	%	KURANG	%
6	KALIMANAH	41.021	37.669	91,83	3.352	8,17
7	KUTASARI	43.096	39.449	91,54	3.647	8,46
8	MREBET	57.603	48.890	84,87	8.713	15,13
9	BOBOTSARI	39.132	36.272	92,69	2.860	7,31
10	KARANGREJA	34.181	28.048	82,06	6.133	17,94
11	KARANGANYAR	29.152	28.890	99,10	262	0,90
12	KARANGMONCOL	42.677	37.962	88,95	4.715	11,05
13	REMBANG	53.913	46.538	86,32	7.375	13,68
14	BOJONGSARI	43.996	41.576	94,50	2.420	5,50
15	PADAMARA	32.316	29.615	91,64	2.701	8,36
16	PENGADEGAN	28.568	26.484	92,71	2.084	7,29
17	KARANGJAMBU	19.310	16.619	86,06	2.691	13,94
18	KERTANEGARA	25.958	24.058	92,68	1.900	7,32
JUMLAH		716.907	654.398	91,28	62.509	8,72

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, 2015

Tabel diatas menunjukkan bahwa prosentase hasil perekaman KTP-el tertinggi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 adalah Kecamatan Karanganyar sebanyak 28.890 jiwa (99,10%), adapun perekaman terendah adalah Kecamatan Karangreja yaitu sebanyak 28.048 jiwa (82,06%). Untuk mengejar capaian perekaman KTP-el di kecamatan perlu ditingkatkan pelayanan KTP-el jemput bola yang waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

c. Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta kelahiran menimbulkan hukum keperdataan antara anak dan kedua orang tuanya. Akta perkawinan menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara suami dan isteri serta anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Akta kematian merupakan dokumen untuk dapat dibukanya pembagian waris, pensiun, asuransi dan lain-lain. Akta perceraian merupakan dokumen legal yang membuktikan putusya sebuah perkawinan. Akta pengakuan anak merupakan dokumen legal

yang menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara anak yang lahir diluar perkawinan dengan ayah biologis.

Belum lengkapnya informasi yang diberikan oleh penduduk dalam mengisi Formulir F,1,01 khususnya informasi tentang kepemilikan akta pencatatan sipil seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak dan akta pengesahan anak. Hal ini menyebabkan sulitnya memperoleh informasi tentang kepemilikan akta-akta catatan sipil oleh penduduk dari database kependudukan SIAK.

Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjamin setiap anak untuk dicatatkan kelahirannya. Untuk meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran maka pemerintah telah mengeluarkan UU no 24 tahun 2013 dimana terdapat 3 (tiga) item penting yang berkaitan dengan percepatan capaian kepemilikan akta pencatatan sipil yaitu:

- a. Pelayanan gratis untuk memperoleh dokumen akta Pencatatan Sipil
- b. Dihapuskannya denda keterlambatan pembuatan akta pencatatan sipil

Perubahan azas pencatatan sipil yang semula pada asas peristiwa menjadi azas domisili dimana penduduk dapat membuat akta pencatatan sipil di tempat domisili walaupun tempat terjadinya peristiwa penting berbeda.

Kepemilikan akta Kelahiran yang terdapat dalam database SIAK Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.44.
Kepemilikan Akta Kelahiran per Kecamatan
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015

NO	KECAMATAN	Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran		Jumlah Penduduk		Kepemilikan Akta Kelahiran (%)
		N	%	N	%	
1	KEMANGKON	44.130	6,18	59.971	6,44	73,59
2	BUKATEJA	46.109	6,46	73.803	7,93	62,48
3	KEJOBONG	40.409	5,66	48.491	5,21	83,33
4	KALIGONDANG	43.760	6,13	61.500	6,61	71,15
5	PURBALINGGA	45.880	6,43	57.841	6,21	79,32
6	KALIMANAH	39.702	5,56	53.903	5,79	73,65
7	KUTASARI	40.349	5,66	59.474	6,39	67,84
8	MREBET	43.900	6,15	73.951	7,95	59,36
9	BOBOTSARI	42.454	5,95	52.596	5,65	80,72
10	KARANGREJA	40.794	5,72	43.538	4,68	93,70
11	KARANGANYAR	37.468	5,25	38.378	4,12	97,63
12	KARANGMONCOL	40.694	5,70	56.949	6,12	71,46
13	REMBANG	41.362	5,80	66.721	7,17	61,99
14	BOJONGSARI	39.812	5,58	52.753	5,67	75,47
15	PADAMARA	39.523	5,54	39.881	4,28	99,10
16	PENGADEGAN	35.424	4,96	35.514	3,82	99,75
17	KARANGJAMBU	18.912	2,65	21.967	2,36	86,09
18	KERTANEGARA	32.820	4,60	33.493	3,60	97,99
JUMLAH		713.502	100	930.724	100	76,66

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, 2015

Secara umum kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Purbalingga yang tercatat pada database SIAK sebanyak 713.502 jiwa (76,66%). Dari tabel diatas persentase kepemilikan akta kelahiran terbesar adalah Kecamatan Pengadegan yakni sebanyak 99,75% sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Rambang yakni sebanyak 61,99%.

8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Tabel 2.45.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2010	2011	2012	2013	2014
1.	PKK aktif	persen	77,32	77,32	77,32	77,32	77,42
2.	Posyandu aktif	persen	100	100	100	100	100
3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Klpk		80	239	239	120
4.	Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif	%	100	100	100	100	100
5.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	75	75	75	75	75
6.	Jumlah desa menyusun dokumen perencanaan desa (RPJMDes)	desa	195	224	224	239	239
7.	Desa/kelurahan yang telah menyusun profil desa	desa	2	2	224	239	239
8.	Jumlah desa memiliki BUMDes	desa	0	98	224	224	224

Sumber: Bapermasdes Kabupaten Purbalingga

9. Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Akses masyarakat terhadap informasi hasil pembangunan harus dibuka seluas-luasnya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu menyajikan data hasil pembangunan di website milik pemerintah. Cara ini akan memudahkan masyarakat mengakses informasi kapanpun dan dimanapun.

Tabel 2.46.
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2011 – 2015

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah desa belum terjangkau layanan telekomunikasi	Desa	3	3	2	2	2
2.	Jumlah Warnet	Unit	84	106	106	104	60
3.	Jumlah hotspot di ruang publik	Unit	6	8	11	16	80
4.	Jumlah SKPD yang memiliki website	SKPD	17	22	22	27	29

Sumber: Dinhubkominfo Kabupaten Purbalingga

10. Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Urusan penanaman modal dapat digambarkan melalui melalui beberapa indikator antara lain jumlah investor PMA dan PMDN; persetujuan proyek dan nilainya serta realisasi investasi; serta rasio daya serap tenaga kerja. Jumlah investor PMA dan PMDN yang menanamkan modalnya pada Tahun 2013-2015 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari 539 investor menjadi 627 investor. Perkembangan jumlah investor di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47.
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Tahun 2011 – 2015

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah investor	Orang/ unit	89	80	539	533	627
2	Total nilai realisasi investasi	Juta rupiah	339.768	342.500	250.000	314.413	299.003
3	Jumlah PMA	Orang/ unit	20	21	21	22	23
4	Nilai Investasi PMA	Juta rupiah	154.514	35.800	25.000	3.512	14.923
5.	Jumlah PMDN	Orang/ unit	79	78	537	532	625
6.	Nilai Investasi PMDN	Juta rupiah	32.090	306.700	225.000	302.000	214.080
7.	Rata-rata lama proses perijinan	Hari	6	6	6	6	6
8.	Jumlah aduan pelayanan perijinan	kali	12	7	5	5	10

Sumber: KPMPT Kabupaten Purbalingga, 2015

Realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Purbalingga dari Tahun 2013-2014 mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 250.000.000.000 menjadi sebesar Rp. 314.413.853.496. Namun demikian, terjadi penurunan di Tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 299.003.281.000.

11. Koperasi, usaha Mikro, kecil, dan menengah

Koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian daerah karena koperasi dan UMKM terbukti mampu bertahan pada situasi krisis. Peran koperasi tidak hanya dalam hal menghasilkan output, namun juga sebagai penyerap tenaga kerja. Koperasi saat ini juga menjadi alternatif pembiayaan bagi usaha kecil serta masyarakat pada umumnya karena untuk mengakses pembiayaan di koperasi relatif lebih mudah dibandingkan mengakses lembaga keuangan lainnya. Meskipun perkembangannya masih menemui beberapa hambatan,

namun pembentukan koperasi di Kabupaten Purbalingga telah menjangkau semua wilayah dengan jumlah anggota yang cukup banyak.

Pada tahun 2014 jumlah koperasi di Kabupaten Purbalingga tercatat sebanyak 239 unit koperasi primer yang terdiri dari koperasi aktif 218 unit (91,3%) dan tidak aktif 21 unit. Dari jumlah tersebut, 16 unit merupakan koperasi KUD dan 217 unit merupakan koperasi non KUD. Jumlah koperasi yang berbadan hukum sebanyak 65 unit. Pada koperasi usaha simpan pinjam, tingkat kesehatan koperasi masih rendah yaitu sebesar 54% pada tahun 2013. Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya kelembagaan koperasi di Kabupaten Purbalingga. Tentunya kesehatan koperasi ini perlu ditingkatkan.

Tabel 2.48.
Jumlah Koperasi dan Anggota Koperasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2014

No	Jenis	Jumlah Koperasi			Jumlah Anggota		
		Aktif	TdkAktif	Total	Lk2	Pr	Jml
		(Unit)	(Unit)	(Unit)			
I	Koperasi Primer						
1	K U D	16	-	16	11.540	5.182	16.722
2	K S U	56	9	65	5.520	4.883	10.403
3	K S P	23	1	24	1.460	1.307	2.767
4	K P R I	51	1	52	4.782	4.213	8.995
5	Kop Wredatama	8	-	8	871	915	1.786
6	Kop Warung	1	-	1	66	89	155
7	Kop Wanita	4	-	4	-	363	371
8	Kop Veteran	1	-	1	213	64	277
9	Kop Purnawirawan	1	-	1	160	102	262
10	Kop Pemuda	-	2	2	40	9	49
11	Kop Profesi	-	1	1	20	13	33
12	Koperasi Tani	12	-	12	947	32	979
13	Kop Lainnya	4	1	5	218	84	299
14	Kepolisian/Angkatan	4	-	4	1.806	76	1.882
15	Koperasi Angkutan Darat	1	1	2	64	-	64
16	Kopti	1	-	1	213	111	324
17	Kop Pasar	2	2	4	228	160	388
18	Kop Pariwisata	-	1	1	5	16	21
19	Kopontren	8	-	8	202	86	288
20	Kopinkra	1	-	1	38	-	38
21	Koperasi Karyawan	15	2	17	1.041	2.339	3.380
22	Kop Jasa Keuangan Syariah	9	-	9	668	593	1.261
	Jumlah	218	21	239	30.102	20.637	50.744
II	Koperasi Sekunder						
1	PKPRI	1	-	1	-	-	-
	Jumlah	219	21	240	30.102	20.637	50.744

Sumber Data : Dinperindagkop Kab. Purbalingga

Kabupaten Purbalingga mempunyai potensi UMKM yang beragam. Beberapa jenis UMKM yang berkembang di Kabupaten Purbalingga antara lain usaha kerajinan bulu mata, kerajinan sapu glagah, batik, knalpot, tas, alas kaki (sepatu, sandal), kerajinan tempurung kelapa, Kerajinan bambu, pembuatan Gula kristal, Konveksi dan bordir, dan kerajinan Mebel. Pemerintah kabupaten Purbalingga telah melakukan berbagai upaya untuk pemberdayaan UKM, antara lain dengan memberikan bantuan modal/peralatan, dan berbagai pelatihan bagi para pelaku UMKM.

Dalam kurun waktu tahun 2010-2013 terjadi peningkatan jumlah UKM non BPR dari sebanyak 120.650 unit pada tahun 2010 menjadi sebanyak 127.549 unit pada tahun 2014. Berkaitan dengan sertifikasi produk UMKM, Jumlah produk UMKM yang bersertifikat Depkes dan MUI menunjukkan peningkatan dari sebanyak 143 UMKM pada tahun 2010 menjadi 356 UMKM pada tahun 2013.

Tabel 2.49.
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah UKM non BPR/LKM	UKM	120.650	123.750	124.600	125.560	127.549
2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap UMKM	%	43%	95%	96%	98%	99%
3.	Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	0,4%	0,5%	0,5%	0,8%	1%
4.	Persentase omset usaha mikro/ rumah tangga terhadap total omset UMKM (%)	%	40	42	49,22	52	
5.	Jumlah produk UMKM yang bersertifikat Depkes dan MUI	Jenis	143	254	316	356	
1.	Persentase koperasi aktif		89%	91%	91%	91%	88%
2.	Persentase koperasi sehat		55%	56%	54%	54%	52%

Sumber Data : Dinperindagkop Kab. Purbalingga

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Sebagai daerah non pesisir, potensi perikanan di Kabupaten Purbalingga hanyalah perikanan budidaya. Berkaitan dengan perikanan budidaya, dalam undang-undang dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Kinerja pembangunan perikanan salah satunya dapat dilihat dari Produksi perikanan Budidaya. Dalam kurun waktu tahun 2010-2012 terjadi peningkatan produksi perikanan dari sebesar 9.363.470 kg pada tahun 2010 menjadi sebesar 11.357.590 kg pada tahun 2012. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan lahan yang dimiliki oleh para pembudidaya ikan.

Tingkat konsumsi ikan masyarakat di Purbalingga masih belum optimal. Pada tahun 2012 tingkat konsumsi ikan sebanyak 19,9 per kapita pertahun. Kondisi itu masih jauh dengan tingkat konsumsi ikan nasional yang berada di angka 35 kilogram per kapita pertahun. Masih minimnya tingkat konsumsi ikan di masyarakat karena ketersediaan ikan di masyarakat belum maksimal. Salah satunya mengenai akses masyarakat untuk mendapatkan ikan di pasar. Penyebab lainnya yaitu masih belum dikenalnya produk olahan ikan di masyarakat. Selain itu masih ada anggapan olahan ikan masih berbau menyengat (amis). Sehingga masyarakat masih enggan mengonsumsi olahan ikan itu.

Gambaran pencapaian target kinerja indikator urusan perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.50.
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012-2015

No	Indikator	Satuan	Capaian			
			2012	2013	2014	2015
1.	Produksi benih ikan	ton	301.000	365.241	305.068	115.442
2.	Produksi Ikan budidaya	ton		10.895	7.219	7.210
3.	Luas kolam	ha	108	112	112	112
4.	Jumlah pembudidaya ikan	orang		10.711	10.771	11.700
1.	Jumlah produksi ikan tangkap			249,2	242,2	249,5
2.	Jumlah produksi hasil olahan ikan	Ton			2.961	1.590
3.	Jumlah Pasar Ikan	Unit	2	7	9	12
4.	Kapasitas pasar ikan	pedagang	74	96	141	129

Sumber: Dinnakan Kab. Purbalingga

2. Pariwisata

Sektor Pariwisata saat ini sangat penting dalam pengembangan perekonomian daerah. Sektor pariwisata dapat dijadikan sumber pendapatan daerah yang potensial. Pariwisata tumbuh dari upaya memanfaatkan potensi alam maupun dengan membuat obyek wisata buatan yang memiliki kekhasan dan keunggulan suatu daerah.

Kabupaten Purbalingga beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam bidang pariwisata. Kemajuan di sektor pariwisata antara lain dibangunnya taman wisata air Owabong dan Purbasari, taman reptil (reptile park), museum uang, dll. Pendapatan dari sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar bagi APBD Kabupaten Purbalingga.

Kinerja urusan Pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator dibawah ini, diantaranya yaitu pada Program pengembangan destinasi pariwisata ada 4 indikator, yaitu indikator jumlah obyek wisata, jumlah wahana baru pada obyek wisata, jumlah kelompok sadar wisata/pemandu wisata, jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata. Dan pada

program pengembangan promosi pariwisata terdapat indikator yaitu nilai tambah sector-sektor pendukung pariwisata, PDRB sektor hotel dan restoran, PDRB sektor transportasi, jumlah kunjungan wisatawan, rata-rata tingkat hunian hotel, rata-rata lama tinggal wisatawan, jumlah PAD tingkat pariwisata.

Secara rinci pencapaian kinerja urusan pariwisata dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.51.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Purbalingga
Tahun 2011-2014

No	Indikator	Satuan	Capaian			
			2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah obyek wisata unggulan	Unit	5	5	5	5
2.	Jumlah wahana baru pada obyek wisata	Unit	2	3	8	9
3.	Jumlah kelompok sadar wisata / pemandu wisata	kelompok	6	7	7	9
1.	Jumlah kunjungan wisatawan (Wisman dan Wisnus)	Orang	1.412.060	1.507.707	1.530.679	1.458.513
2.	Rata-rata tingkat hunian hotel	Persen	6,93	7,27	14,00	15,00
3.	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1	1	1,5	1,5
4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	2,035	2,069	2,086	2,698
5.	Jumlah restoran	Unit	20	20	20	20
6.	Jumlah penginapan/ hotel	Unit	10	10	10	11

Sumber Data : Dinbudparpora Kabupaten Purbalingga

3. Pertanian

Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan Sarana Pertanian; pengembangan prasarana pertanian; pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian; serta pemberian Perizinan Usaha Pertanian. Kewenangan yang dimiliki tersebut menjadi landasan bagi Kabupaten Purbalingga dalam pengelolaan di sektor pertanian.

Sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga atas dasar harga berlaku yaitu sebesar 29,86%. Potensi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Purbalingga meliputi Padi sebesar 220.695 ton, Jagung 51.945 ton, ubi kayu 2.556 ton, dan kedele hanya 823 ton. Dilihat dari produktivitasnya, baik padi, jagung, ubi kayu maupun kedelai dalam kurun waktu tahun 2010-2013 menunjukkan peningkatan. Hal ini didukung dengan berbagai upaya revitalisasi pertanian serta peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur pertanian. Namun demikian tingkat penggunaan pupuk dan obat kimia di sektor pertanian masih tinggi. Hal ini tentunya perlu dikurangi agar dapat mengurangi pencemaran dan dapat mempertahankan kesuburan tanah pertanian.

Potensi peternakan di Kabupaten Purbalingga yang utama adalah sapi potong, kambing, ayam ras petelur, ayam buras, dan ayam ras potong. Dalam kurun waktu tahun 2010-2014 beberapa jenis hewan ternak populasi ternak mengalami penurunan, seperti sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba, dan puyuh. Sementara beberapa jenis hewan ternak mengalami peningkatan populasi, meliputi: Ayam buras, Ayam Ras petelur, Ayam Ras pedaging, Itik, dan Kelinci. Hasil peternakan di Kabupaten Purbalingga meliputi daging, telur dan susu, dengan kecenderungan mengalami peningkatan.

Secara rinci kinerja pembangunan pada urusan pertanian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.52.
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pertanian
Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 – 2015

No	Indikator	Satuan	Capaian			
			2012	2013	2014	2015
1.	Nilai tukar petani		101,59	103,46	101,76	99,04
2.	Jangkauan pemasaran produk pertanian (lokal, provinsi, nasional, ekspor)		Lokal, Provinsi, Nasional, Ekspor	Lokal, Provinsi, Nasional, Ekspor	Lokal, Provinsi, Nasional, Ekspor	Lokal, Provinsi, Nasional, Ekspor
1.	Produksi pertanian tanaman pangan (per komoditas)					

	<i>Padi</i>	ton	209.654	226.819	213.030	219.211
	Jagung	ton	51.945	53.248	51.945	35.704
	Kedele	ton	823	256	823	211
	Ubi kayu	ton	147.643	149.847	2.556	68.448
2.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar					
	Padi Sawah	Kw/Ha	58.89	58,97	59,23	56,48
	Jagung	Kw/Ha	54.79	54,53	54,73	56,34
	Kedele	Kw/Ha	16.67	16,02	16,11	14,15
	Ubi kayu	Kw/Ha	299.80	281,06	281,19	272,16
3.	Tingkat penggunaan pupuk dan obat kimia di sektor pertanian (Ton)					
	Urea	Ton	15,327	15,237	15.237	14,819
	ZA	Ton	1,098	1,098	1.098	891
	SP36	Ton	1,407	1,407	1.407	1,340
	Phonska	Ton	2,901	2,901	2.901	5,101
	Organik (Pabrik)	Ton	732	732	732	3,172
1.	Jumlah semen	straw	3.350	2.228	2.843	8.500
2.	Jumlah populasi ternak per jenis:					
	sapi potong	ekor	22.150	22.148	15.810	13.522
	sapi perah	ekor	197	205	187	116
	Kerbau	ekor	6.213	5.211	1.513	1.152
	Kambing	ekor	292.725	292.800	272.655	375.471
	Domba	ekor	44.719	44.725	47.260	56.821
	Ayam buras	ekor	1.679.600	1.679.620	1.799.629	2.139.738
	Ayam Ras petelur	ekor	NA	865.600	725.459	738.009
	Ayam Ras pedaging	ekor	NA	6.500.000	3.470.585	4.570.760
	Itik	ekor	132.005	109.096	99.654	119.326
	Puyuh	ekor	102.040	102.040	43.965	57.610
	Kelinci	ekor	3.519	4.675	7.948	9.958
3.	Jumlah produksi hasil peternakan					
	daging	kg	4.871.168	7.138.961	6.817.619	9.346.174
	telur	butir	9.243.349	14.600.100	20.676.201	NA
	susu	liter	24.638	47.000	74.825	NA

Sumber: Dintanbunhut dan Dinakkan Kabupaten Purbalinga

4. Kehutanan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dilihat berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Pemerintah telah menetapkan hutan berdasarkan fungsinya, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Kewenangan Pemerintah daerah kabupaten/kota relatif terbatas, yaitu hanya pada

pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) kabupaten/kota dalam upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Beberapa peran dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten yaitu melakukan pencegahan kerusakan hutan dan lahan, serta penanganan lahan kritis.

Di Kabupaten Purbalingga terdapat hutan lindung dan hutan produksi. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Saat ini luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Purbalingga adalah 14.592 ha. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Produksi hasil hutan kayu di Kabupaten Purbalingga sampai pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan produksi tahun 2012. Peningkatan khususnya pada jenis kayu jati, pinus, albasia, dan jenis kayu lain. Produksi hutan non kayu juga mengalami peningkatan khususnya pada jenis kayu bakar dan kopal.

Luas lahan kritis di area hutan lindung pada tahun 2015 mencapai 758 ha, sedangkan Luas lahan kritis di kawasan budidaya pertanian pada tahun 2014 seluas 5.734.00 ha. Beberapa upaya telah dilakukan dalam rangka penanganan lahan kritis, baik secara sipil teknis maupun vegetatif. Tentunya penanganan lahan kritis ini perlu ditingkatkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan.

Secara rinci perkembangan capaian kinerja urusan kehutanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.53.
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan
Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 - 2015

No	Indikator	Satuan	Capaian			
			2012	2013	2014	2015
	Jumlah produksi Hasil Hutan kayu:					
1.	Jati	M3	444.595	451.987	875.570	1.891,29
2.	Mahoni	M3	409.643	415.564	1.055	1.507,88
3.	Pinus	M3	942.366	955.211	1.914.600	1.940,16
4.	Albasia	M3	5.913.646	5.988.654	7.450.320	13,281,73
5.	Kayu lain	M3	88.948	89.786	773.013	1.707,76
6.	Kopal	M3	99.206	100.675	169.394	17,96
7.	Getah Pinus	M3	972.447	988.167	3.982	753,45
1.	Kawasan Hutan Lindung		14.592	14.592	14.542	14.542
2.	Tingkat sedimentasi	mm/th	2,42	2	2	2
3.	Tingkat erosi	mm/th	35,04	26	26	20
4.	Luas lahan kritis di kawasan lindung	Ha	1.293	1.157	1.157	758
5.	Luas lahan kritis di kawasan budidaya pertanian		7.101	5.734	5.734	NA
6.	cakupan rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara sipil teknis	Ha	34	36	36	NA
7.	cakupan rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif	Ha	1.488	3.342	3.342	NA

Sumber: Dintanbunhut Kabupaten Purbalingga

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kewenangan pemerintah daerah pada urusan energi dan sumberdaya mineral sangat terbatas, hanya terkait dengan pengembangan energi baru dan terbarukan yaitu Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota. Kinerja pembangunan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti rasio elektrifikasi, dan Jumlah sumber energi / pembangkit listrik non PLN.

Rumah tangga yang menggunakan listrik (PLN) selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 136.849 rumah tangga meningkat menjadi 196.378 rumah tangga pada tahun 2015 atau mengalami peningkatan sebesar 43,5 persen. Meningkatnya kebutuhan listrik diikuti pula dengan peningkatan daya listrik terpasang yang semula sebesar

120.195.746 KVA di tahun 2010 naik menjadi 188.049.166 KVA pada tahun 2015.

Namun demikian masih terdapat 16,49 persen rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik PLN. Keterbatasan pelayanan listrik PLN di Kabupaten Purbalingga di wilayah yang agak terpencil menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan listrik. Untuk meningkatkan ketersediaan listrik pada wilayah yang belum terjangkau PLN, telah dikembangkan pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan. Jumlah sumber energi / pembangkit listrik non PLN pada tahun 2015 sebanyak 3 unit. Tentunya diperlukan penambahan pembangkit listrik non PLN agar rasio elektrifikasi rumah tangga meningkat.

Perkembangan capaian kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.54.
Capaian Kinerja Indikator Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah sumber energi / pembangkit listrik non PLN	unit	1	2	3	3	3
2.	Air PDAM yang disalurkan	m ³	7.273.239	7.580.230	7.711.296	8.092.668	8.713.470
3.	Debit mata air	m ³ /dtk	80-1000	699,74	699,74	80-1000	80-1000
4.	Debit sungai	m ³ /dtk	0.026-17,33	0.026-17,33	0.026-17,33	0.026-17,33	0.026-17,33

Sumber : DPU Kabupaten Purbalingga

6. Perdagangan

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang perdagangan mencakup Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; Sarana Distribusi Perdagangan; Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Pengembangan Ekspor; serta Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Di Kabupaten Purbalingga, kinerja urusan

perdagangan menunjukkan perkembangan yang baik. Penyelenggaraan perizinan dan pendaftaran diselenggarakan oleh KPMPT. Berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana, terlihat bahwa Persentase pasar yang memenuhi persyaratan capaiannya hanya sebesar 90%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat pasar yang memerlukan perbaikan sehingga kondisinya menjadi layak. Sementara itu berkaitan dengan PKL kinerjanya sudah baik, dengan capaian persentase PKL yang tertata sebesar 10%.

Total nilai ekspor dalam kurun waktu lima tahun cenderung meningkat dari sebesar Rp 851.016.427.457,80 pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp 1.357.957.424.792,53. Tentunya jumlah ekspor ini perlu ditingkatkan dengan menambah produk yang bisa diterima pasar internasional melalui pemasaran dan perbaikan mutu produk industri. Adapun berkaitan dengan perlindungan konsumen, kinerjanya sudah optimal ditunjukkan dengan indikator Tingkat Terlindunginya konsumen yang mencapai 100%, artinya dari seluruh pasar tradisional dan pasar modern yang ada telah dilakukan pengawasan.

Perkembangan kinerja urusan perdagangan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.55.
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Purbalingga
Tahun 2010-2014

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2010	2011	2012	2013	2014
1.	Tingkat Terlindunginya konsumen	persen	100	100	100	100	100
2.	Penganganan pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100
3.	Total nilai ekspor	Miliar rupiah	851	1.444	1.144	1.357	
4.	Pembangunan promosi perdagangan Internasional	%	10%	10%	10%	10%	10%
5.	Jumlah produk yang bisa diterima pasar internasional	Produk	4	4	4	4	4
6.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	10%	10%	10%	10%	10%

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2010	2011	2012	2013	2014
7.	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan	persen	90%	90%	90%	90%	90%
8.	Persentase lokasi PKL yang tertata		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinperindagkop Kab. Purbalingga

7. Perindustrian

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang perindustrian mencakup Perencanaan Pembangunan Industri; Perizinan; dan Sistem Informasi Industri Nasional. Jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Purbalingga menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu empat tahun dari sebesar 35.868 unit pada tahun 2010 menjadi sebanyak 43.250 unit. Jumlah sentra industri juga menunjukkan peningkatan dari sebanyak 186% pada tahun 2010 menjadi 191% pada tahun 2012.

Berkaitan dengan inovasi iptek, jumlah industri mikro kecil dan menengah menggunakan inovasi teknologi sampai dengan tahun 2012 sebanyak 609 unit. Sementara itu persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi sebanyak 20,96% pada tahun 2013. Berkaitan dengan menggunakan bahan baku, Jumlah industri berbahan baku lokal meningkat dari sebanyak 21,521 unit pada tahun 2010 menjadi 23.115 unit pada tahun 2012. Adapun Persentase klaster industri yang berkembang sebanyak 38,89%. Perkembangan kinerja urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56.
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian
Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	2,08	2,20	2,33	2,46	2,83
2	Jumlah industri (rumah tangga, kecil, menengah) yang menggunakan inovasi teknologi	Unit	566	595	609		

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2010	2011	2012	2013	2014
3	Jumlah penerapan standarisasi produk industri (SNI)	Unit	3	4	5		
1.	Jumlah industri kecil dan menengah	Unit	35.868	38.879	41.530	43.250	
2.	Persentase IKM, yang telah mengikuti pameran promosi produk	Unit	2-3	2-3	2-3	2-2	2-3
1.	Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	persen	15,08	18,65	19,42	20,96	
1.	Persentase kluster industri yang berkembang	persen	32,00	34,48	37,14	38,89	
1	Jumlah sentra-sentra industri	unit	186	189	191		
2	Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	21,521	22.572	23.115		

Sumber: Dinperindagkop Kab. Purbalingga

8. Transmigrasi

Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk salah satunya dilakukan dengan transmigrasi penduduk. Transmigrasi adalah pemindahan penduduk dari daerah yang kepadatan penduduknya tinggi ke daerah yang kepadatan penduduknya rendah. Tujuan dari transmigrasi yaitu melakukan penempatan penduduk secara merata diseluruh daerah. Pemberangkatan transmigran dari Kabupaten Purbalingga cenderung fluktuatif, pada tahun 2011 diberangkatkan 20 KK, dan pada tahun 2014 diberangkatkan sebanyak 15 KK, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.57.
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2014

No	Indikator	Capaian			
		2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah transmigran umum	20 KK / 72 jiwa	30 KK / 106 jiwa	29 KK / 111 jiwa	15 KK / 66 jiwa

Sumber Data : Dinsosnakertrans Kab. Purbalingga

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Keuangan Daerah adalah hal-hal yang terkait dengan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan tata kelolanya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja. Untuk dapat menyusun kerangka pendanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebelumnya harus diketahui gambaran kinerja keuangan daerah pada saat ini. Untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan daerah 5 (lima) tahun terakhir sebagai dasar dalam penyusunan proyeksi keuangan daerah 5 tahun ke depan. Analisis kinerja keuangan dilaksanakan terhadap kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah Kabupaten Purbalingga.

Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dikelola sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali (terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah), serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015, digambarkan berdasarkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, sebagai berikut

3.1 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1.1 Pendapatan Daerah

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga dan rata-rata pertumbuhannya selama kurun waktu tahun 2010 - 2015 secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 3.1 : Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2010 - 2015**

NO	URAIAN	REALISASI (Rp. 000)					Weighted Average
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	PENDAPATAN DAERAH						
1.1	Pendapatan Asli Daerah	94.944.079	112.727.617	122.866.228	202.413.207	210.907.506	1,18
1.1.1	Hasil Pajak Daerah 1)	15.893.794	19.432.288	21.424.649	37.837.517	40.707.801	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	62.832.892	27.425.983	29.293.477	33.296.583	32.466.466	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	8.181.772	6.307.014	10.651.726	12.016.649	12.306.370	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8.035.621	59.562.330	61.496.374	119.262.457	125.426.869	
1.2	Dana perimbangan	630.615.401	757.604.355	830.569.180	868.377.042	901.365.883	1,11
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	41.149.860	41.349.239	44.743.100	33.120.213	23.891.824	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	521.932.241	640.265.476	719.185.020	777.989.499	805.222.229	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	67.533.300	75.989.640	66.641.060	57.267.330	72.251.830	
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	228.617.953	217.379.463	233.104.578	274.651.063	450.599.803	1,12
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.698.307	1.754.884	5.805.148	6.100.074	8.626.737	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov & Pemda lainnya	30.443.220	41.833.062	46.760.115	64.346.027	91.414.187	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	106.652.039	21.945.283	0	173.720.857	249.255.085	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Prov & Pemda	16.988.190	31.167.236	28.636.279	30.484.104	34.696.821	
1.2.6	Dana Penyesuaian Tunjangan Penddkn	71.836.196	120.678.998	151.903.035			
1.2.7	Pendapatan Lainnya					66.606.973	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	954.177.433	1.087.711.435	1.186.539.986	1.345.441.312	1.562.873.192	

Berdasarkan realisasi tersebut, rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2015 sebesar 18 %. Sumber utama PAD Kabupaten Purbalingga meliputi Lain-lain PAD yang Sah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pada periode yang sama rata-rata pertumbuhan dana perimbangan sebesar 11 persen dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar 12 %. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2015, karena adanya kebijakan transfer fiskal kepada desa yang diadministrasikan pada pos ini.

Kontribusi masing-masing sumber pendapatan dapat dilihat dari proporsinya terhadap total pendapatan daerah. Proporsi PAD terhadap total pendapatan Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun (2010 – 2015) relatif rendah, yaitu pada kisaran 11,6 persen. Dana Perimbangan dari pemerintah pusat memberikan kontribusi sangat besar terhadap pendapatan daerah sekitar 67,5 persen, dan sisanya berupa lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.2 : Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015

NO	URAIAN	PROPORSI (%)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11,02	9,95	10,36	10,36	15,04	12,88
1.1	Pajak Daerah	1,57	1,67	1,79	1,81	2,81	2,65
1.2	Retribusi Daerah	7,70	6,59	2,52	2,47	2,47	2,11
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,07	0,86	0,58	0,90	0,89	0,80
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,68	0,84	5,48	5,18	8,86	7,32
2	DANA PERIMBANGAN	76,55	66,09	69,65	70,00	64,54	58,65

2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	6,17	4,31	3,80	3,77	2,46	1,50
2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	64,19	54,70	58,86	60,61	57,82	52,44
2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	6,19	7,08	6,99	5,62	4,26	4,71
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	12,43	23,96	19,99	19,65	20,41	28,47
3.1	Pendapatan Hibah	0,02	0,28	0,16	0,49	0,45	0,19
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov & Pemda lainnya	2,94	3,19	3,85	3,94	4,78	5,45
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7,31	18,71	13,11	12,80	12,91	16,23
3.4	Bantuan Keuangan dari Prov & Pemda	2,16	1,78	2,87	2,41	2,27	2,26
JUMLAH PENDAPATAN		100	100	100	100	100	100

3.1.2 Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan pembelanjaan pada periode Tahun 2011 – 2015 dilakukan melalui analisis belanja daerah.

Adapun kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2015 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi :

- a. Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang undangan;
- b. Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah daerah kepada pihak lainnya;

- c. Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- d. Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- e. Bantuan Sosial, yaitu bantuan sosial kepada perorangan atau kelompok masyarakat yang mengalami resiko sosial;
- f. Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa;
- g. Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun khusus kepada kabupaten/kota, desa, dan partai politik;
- h. Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi :

- a. Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium ASN, uang lembur,
- b. Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan ASN, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas, dan sebagainya;
- c. Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, gedung, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan air bermotor, alat-alat angkutan air tidak

bermotor, alat-alat bengkel, pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, dan sebagainya.

Gambaran tentang perkembangan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga selama Tahun 2010 – 2015 dan persebaran proporsinya dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 3.3 : Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015

NO	URAIAN	2011 (Rp. 000)	2012 (Rp.000)	2013 (Rp.000)	2014 (Rp.000)	2015 (Rp.000)
1	BELANJA TDK LANGSUNG	590.542.533	672.457.302	706.646.863	797.400.583	962.432.093
1.1	Belanja Pegawai	524.363.381	599.311.055	629.339.101	722.485.061	759.987.567
1.2	Belanja Bunga	39.869	32.361	24.687	17.096	9.504.569
1.3	Belanja Hibah	4.241.955	13.174.399	16.624.492	14.535.227	20.284.067
1.4	Belanja Bantuan Sosial	12.497.219	7.273.379	8.446.250	8.132.729	4.167.099
1.5	Belanja Bagi Hasil	14.788	16.834	12.982	13.821	4.467.762
1.6	Belanja Bant. Keuangan	47.699.919	50.539.658	51.722.968	51.816.649	163.521.029
1.7	Belanja Tidak Terduga	1.406.418	1.463.134	76.383	-	
1.8	Belanja Subsidi	278.984	6.446.483	400.000	400.000	500.000
2	BELANJA LANGSUNG	312.001.261	411.629.765	419.910.169	474.439.009	508.496.141
JML	735.286.299	1.084.087.067	1.126.557.032	1.271.839.592	-	1.470.928.23

Tabel 3.4 : Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 - 2015

NO	URAIAN	PROPOSIONAL (%)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	74,72	65,43	62,03	62,73	62,70	65,43
1.1	Belanja Pegawai	65,00	58,10	55,28	55,86	56,81	51,67
1.2	Belanja Bunga	0,006	0,004	0,003	0,002	0,001	0,65
1.3	Belanja Hibah	1,74	0,47	1,22	1,48	1,14	1,38
1.4	Belanja Bantuan Sosial	1,05	1,38	0,67	0,75	0,64	0,28
1.5	Belanja Bagi Hasil	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,30
1.6	Belanja Bantuan Keuangan	6,62	5,29	4,66	4,59	4,07	11,12
1.7	Belanja Tidak Terduga	0,25	0,16	0,13	0,01	0,00	-
1.8	Belanja Subsidi	0,05	0,03	0,59	0,04	0,03	0,03
2	BELANJA LANGSUNG	25,28	34,57	37,97	37,27	37,30	34,56

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Belanja Tidak Langsung lebih besar dibandingkan dengan Belanja Langsung, dengan komposisi terbesar dari Belanja Tidak Langsung digunakan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Keuangan.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dengan arah :

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. Penyertaan modal perusahaan milik daerah dengan prinsip kehati-hatian;
- c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;
- d. Pembentukan dana cadangan apabila dibutuhkan.

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga selama Tahun 2011 – 2015 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.5 : Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2015

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN (Rp.000)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah					
1	SILPA Tahun Tahun lalu	35.885.671	86.000.570	83.912.615	132.878.402	168.283.609
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	28.683.393
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	556.816	469.154	1.067.076	294.765	154.971
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	36.442.487	86.469.724	84.979.691	133.173.167	197.121.973

3.1.4 Neraca Daerah

Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi

keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumberdaya keuangan yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kinerja Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu Tahun 2010 – 2015 yang telah di audit dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.6
Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2010 – 2015

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2014 (ACRUAL)	2015 (ACRUAL)
1	ASET							
1.1	ASET LANCAR							
	Kas	37.458.239.346	90.732.504.196	93.600.203.104	140.834.042.371	156.925.539.432	156.925.539.432	254.791.990.560
	KAS di Kas Daerah	37.366.533.604	90.444.928.264	89.604.895.053	136.691.152.993	148.325.489.985	148.325.489.985	244.477.316.993
	Kas di Bendahara Penerimaan	70.819.000	43.860.800	575.830.073	1.149.197.715	913.729.871	913.729.871	256.757.364
	Kas di Bendahara Pengeluaran	20.886.742	243.715.132	41.782.729	145.559.667	47.777.818	47.777.818	33.975.002
	Kas di BLUD	-	-	3.377.695.249	2.848.131.996	3.988.554.425	3.988.554.425	1.703.088.698
	Kas JKN	-	-	-	-	3.649.987.333	3.649.987.333	7.095.678.207
	Kas Lainnya	-	-	-	-	-	-	1.225.174.296
	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	23.300.000.000	23.300.000.000	20.000.000.000
	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	23.300.000.000	23.300.000.000	20.000.000.000
	Piutang	7.177.214.251	6.481.998.720	7.454.295.407	15.289.635.234	7.504.373.193	7.094.269.507	10.245.191.980
	Piutang Pendapatan	-	-	-	-	-	8.288.612.460	11.518.889.227
	Piutang Pajak	1.000.763.103	1.119.131.415	1.149.376.362	1.471.951.833	48.538.569	-	-
	Piutang Retribusi	3.628.276.188	3.138.461.807	1.086.883.720	2.721.130.406	2.939.898.020	-	-
	Piutang Lainnya	2.548.174.960	2.224.405.498	558.260.722	555.548.725	410.103.686	-	-

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2014 (ACRUAL)	2015 (ACRUAL)
	Piutang Jasa Pelayanan BLUD	-	-	4.659.774.603	10.541.004.270	5.300.175.871	-	-
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-	-	1.194.342.953	1.194.342.953	1.273.697.247
	Persediaan	12.283.820.854	13.866.611.056	14.703.373.539	14.044.025.736	21.904.872.686	21.904.872.686	17.813.483.071,24
	Persediaan ATK	159.310.264	159.342.504	184.726.691	198.171.527	214.903.984		
	Persediaan Alat Listrik	819.265.050	926.174.805	598.663.537	483.178.437	263.434.809		
	Persediaan Material Bahan	10.921.398.123	12.202.396.770	13.399.649.453	13.012.872.823	13.209.640.857		
	Persediaan Bahan Bakar	-	-	10.347.000	3.732.500	3.053.000		
	Persediaan Bahan Makanan Pokok	21.894.992	30.303.602	47.749.586	55.021.792	45.057.495		
	Persediaan Barang Cetak & Benda Berharga	361.952.425	548.256.375	462.092.272	257.638.157	436.206.941		
	Persediaan Benda Pos	-	137.000	145.000	33.410.500	14.484.600		
	Persediaan Lain-lain	-	-	-	-	7.718.091.000		
	Beban Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	437.868.677,67	482.312.215,50
	JUMLAH ASET LANCAR	56.919.274.451	111.081.113.972	115.757.872.050	170.167.703.341	209.634.785.311	209.662.550.302,67	303.332.977.826,74
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG							
	Investasi Non permanen							
	Dana Bergulir	-	-	-	-	-	3.218.503.745	-
	Investasi Pada Lembaga Keuangan	2.215.847.296	2.151.380.502	1.300.000.000	775.078.000	-	-	-
	Penyertaan Modal Pada Pegadaian	-	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2014 (ACRUAL)	2015 (ACRUAL)
	Investasi dikelola SKPD	167.200.000	166.000.000	-	-	-	-	-
	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	255.485.000	-	-	-
	Jumlah Investasi Non Permanen	2.383.047.296	2.317.380.502	1.300.000.000	1.030.563.000	-	3.218.503.745	-
	Investasi Permanen							
	Penyertaan Modal Pemda	73.995.324.199	90.354.969.065	109.310.805.044	126.174.617.699	138.472.009.808	138.472.009.808	163.028.336.334,53
	Jumlah Investasi Permanen	73.995.324.199	90.354.969.065	109.310.805.044	126.174.617.699	138.472.009.808	138.472.009.808	163.028.336.335
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	76.378.371.495	92.672.349.567	110.610.805.044	127.205.180.699	138.472.009.808	141.690.513.553	163.028.336.334,53
1.3	ASET TETAP							
	Tanah	357.006.576.386	257.687.713.016	401.108.940.580	407.324.188.861	413.644.421.123	413.644.421.123	417.224.619.195
	Tanah	357.006.576.386	257.687.713.016	401.108.940.580	407.324.188.861	413.644.421.123	413.644.421.123	417.224.619.195
	Peralatan & Mesin	140.198.370.679	192.382.684.282	204.562.891.012	215.029.925.487	227.018.795.230	227.018.795.230	281.639.668.241
	Alat-alat Besar	4.886.657.550	3.644.322.750	6.387.594.100	6.917.561.100	8.791.512.810		
	Alat-alat Angkutan	30.208.318.915	43.407.174.084	40.598.380.550	42.555.405.635	49.057.831.470		
	Alat-alat Bengkel	1.113.194.165	2.349.283.398	2.459.616.294	2.264.407.235	4.377.953.721		
	Alat-alat Pertanian	2.120.261.343	2.485.852.919	2.325.391.519	1.340.275.473	1.208.327.239		
	Alat-alat Kantor & Rumah Tangga	63.945.810.762	76.737.881.682	79.451.686.770	86.988.288.148	87.228.589.363		
	Alat-alat Studio & Komunikasi	4.987.206.022	7.231.773.280	6.573.684.775	6.891.519.713	8.736.155.483		
	Alat-alat Kedokteran	12.617.883.932	19.830.700.983	23.122.832.533	23.749.899.116	29.538.431.591		

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2014 (ACRUAL)	2015 (ACRUAL)
	Alat-alat Laboratorium	20.317.427.990	36.424.148.836	43.408.495.621	44.249.731.217	38.007.720.553		
	Alat-alat Persenjataan	1.610.000	271.546.350	235.208.850	72.837.850	72.273.000		
	Gedung & Bangunan	481.622.913.583	434.550.833.673	461.191.280.978	471.745.494.320	527.353.557.494	527.353.557.494	637.338.882.723
	Bangunan Gedung	479.453.778.083	430.492.718.630	457.045.170.235	467.455.545.475	522.617.331.503		
	Monumen	2.169.135.500	4.058.115.043	4.146.110.743	4.289.948.845	4.736.225.991		
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	403.780.352.021	484.480.099.740	531.552.649.385	574.209.381.426	627.522.765.466	627.522.765.466	747.657.668.675
	Jalan dan Jembatan	349.451.297.171	425.382.335.357	467.728.325.307	517.432.171.820	566.459.917.311		
	Bangunan Air(Irigasi)	46.856.824.900	35.804.607.602	36.264.817.528	35.945.857.639	38.300.189.928		
	Instalasi	3.199.017.200	13.486.847.971	17.307.600.870	9.138.550.187	9.876.200.747		
	Jaringan	4.273.212.750	9.806.308.810	10.251.905.680	11.692.801.780	12.886.457.480		
	Aset Tetap Lainnya	30.898.006.256	43.768.170.347	46.973.305.590	49.766.062.762	38.149.830.059	38.149.830.059	42.677.703.614
	Buku Perpustakaan	25.977.409.107	37.286.650.959	40.734.989.251	42.951.474.912	30.578.309.344		
	Barang Bercorak Kesenian dan Budaya	3.929.373.399	4.277.784.066	4.850.263.367	5.796.999.428	6.570.135.293		
	Hewan dan Ternak serta Tanaman	991.223.750	2.203.735.322	1.388.052.972	1.017.588.422	1.001.385.422		
	Kontruksi Dalam Pengerjaan	-	328.465.500	19.062.770.844	16.986.999.078	443.646.600	443.646.600	8.043.302.023
	Kontruksi Dalam Pengerjaan	-	328.465.500	19.062.770.844	16.986.999.078	443.646.600		
	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-	616.185.957.768,59	711.488.932.749,37
	JUMLAH ASET TETAP	1.413.506.218.925	1.413.197.966.558	1.664.451.838.389	1.735.062.051.934	1.834.133.015.972	1.217.947.058.203,41	1.423.092.911.721,63

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2014 (ACRUAL)	2015 (ACRUAL)
1.4	DANA CADANGAN							
	Dana Cadangan	-	-	-	-	27.508.000.000	27.508.000.000	13.824.606.959
	JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-	27.508.000.000	27.508.000.000	13.824.606.959
1.5	ASET LAINNYA							
	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	25.638.189	25.638.189
	Tuntutan Perbendaharaan	25.638.189	25.638.189	25.638.189	25.638.189	25.638.189	-	-
	Tuntutan Ganti Rugi	318.000	-	-	-	-	-	-
	Dana Bergulir	576.567.331	550.564.870	2.916.461.033	2.482.705.480	3.218.503.745	-	-
	Aset Tidak Berwujud	-	-	826.216.515	684.371.590	2.263.986.083	2.263.986.083	1.769.471.083
	Aset Lain-lain	232.180.628	298.816.599	26.404.489.928	87.275.786.276	17.301.533.216	17.301.533.216	22.154.467.357,45
	JUMLAH ASET LAINNYA	834.704.148	875.019.658	30.172.805.665	90.468.501.535	22.809.661.233	19.591.157.488	23.949.576.629,45
	JUMLAH ASET	1.547.638.569.019	1.617.826.449.755	1.920.993.321.148	2.122.903.437.509	2.232.557.472.324,00	1.616.399.279.547,08	1.927.228.409.471,35
2	KEWAJIBAN							
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK							
	Hutang PFK	1.501.749.742	4.687.198.080	9.110.816.372	6.806.440.280	10.028.199.920	10.003.173.920	8.791.403.635
	Utang Bunga	39.869.274	32.361.288	24.686.920	17.095.745	9.504.569	9.504.569	1.913.390
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri- Pemerintahan Pusat	63.720.745	63.720.746	63.720.746	63.720.746	63.720.745	-	-

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2014 (ACRUAL)	2015 (ACRUAL)
2.2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	63.720.745	31.860.374
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	8.213.844	23.973.495
	Utang Belanja	-	-	-	-	-	9.090.016.514	6.136.181.774
	Hutang Jangka Pendek Lainnya	484.080.599	496.038.932	524.658.930	489.422.265	534.556.116	509.106.599	841.893.199
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.089.420.360	5.279.319.046	9.723.882.968	7.376.679.036	10.635.981.350	19.683.736.191	15.827.225.867
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG							
	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	333.020.115	236.938.081	187.815.569	106.999.078	33.773.764	33.773.764	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	8.471.410.478	7.987.329.879	7.503.249.280	7.019.168.681	6.535.088.082	6.535.088.082	6.051.007.483	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	8.804.430.593	8.224.267.960	7.691.064.849	7.126.167.759	6.568.861.846	6.568.861.846	6.051.007.483	
JUMLAH KEWAJIBAN		10.893.850.953	13.503.587.006	17.414.947.817	14.502.846.795	17.204.843.196	26.252.598.037	21.878.233.350
3	EKUITAS DANA							
3.1	EKUITAS DANA LANCAR							
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	35.885.670.604	86.000.569.847	83.912.614.590	132.878.401.876	169.283.609.641		
	Pendapatan Yang Ditangguhkan	70.819.000	44.736.269	576.772.142	1.149.200.215	913.729.871		
	Cadangan Piutang	7.177.214.251	6.481.998.720	7.454.295.407	15.289.635.234	7.504.373.193		
	Cadangan Persediaan	12.283.820.854	13.866.611.056	14.703.373.539	14.044.025.736	21.904.872.686		
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	587.670.618	592.120.966	613.066.596	570.238.756	607.781.430		

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2014 (ACRUAL)	2015 (ACRUAL)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		54.829.854.091	105.801.794.926	106.033.989.082	162.791.024.305	198.998.803.961		
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI							
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	76.378.371.495	92.672.349.567	110.610.805.044	127.205.180.699	138.472.009.808		
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.413.506.218.925	1.413.197.966.558	1.664.451.838.389	1.735.062.051.934	1.834.133.015.972		
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	834.704.148	875.019.658	30.172.805.665	90.468.501.535	22.809.661.233		
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	8.804.430.593	8.224.267.960	7.691.064.849	7.126.167.759	6.568.861.846		
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		1.481.914.863.975	1.498.521.067.823	1.797.544.384.249	1.945.609.566.409	1.988.845.825.167		
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN							
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	27.508.000.000		
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN		-	-	-	-	27.508.000.000		
JUMLAH EKUITAS DANA		1.536.744.718.066	1.604.322.862.749	1.903.578.373.331	2.108.400.590.714	2.215.352.629.128	1.590.146.681.510,08	1.905.350.176.121,35
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS DANA		1.547.638.569.019	1.617.826.449.755	1.920.993.321.148	2.122.903.437.509	2.232.557.472.324	1.616.399.279.547,08	1.927.228.409.471,35

Sedangkan untuk mengetahui kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dilakukan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.7 : Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Puralingga Tahun 2010 – 2015

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	RasioLikuiditas:						
1.1	Rasio Lancar	27,24	21,04	11,90	23,07	19,71	19,17
1.2	Rasio Quick	21,36	18,41	10,39	21,16	17,65	18,04
2	Solvabilitas:						
2.1	Rasio Total hutang terhadap Total asset	0,007	0,008	0,009	0,007	0,008	0,113

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis yaitu :

1. Rasio Lancar

Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada Tahun 2015 adalah sebesar 19,17. Hal ini berarti kemampuan membayar hutang Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebesar 19 kali lebih.

2. Rasio *Quick*

Rasio *Quick* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel di atas, Rasio *Quick* pada Tahun 2015 adalah sebesar 18,04. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

Sedangkan Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio

Solvabilitas dapat diukur melalui Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset pada Tahun 2015 sebesar 0,11. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

3.1.5 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2011-2015

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Keuangan daerah merupakan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan anggaran daerah. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundangundangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, maka dilakukan analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan.

3.1.5.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Purbalingga bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Adapun belanja daerah terdiri dari :

- a. Belanja Langsung : Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal.
- b. Belanja Tidak Langsung : Terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan ASN, Bupati, Wakil Bupati dan Anggota DPRD), hibah, bantuan sosial, bagi hasil kepada kabupaten/kota, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa serta belanja tidak terduga.

Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu lima tahun (2010 – 2015) cenderung mengalami peningkatan, baik belanja langsung maupun tidak langsung. Secara proporsional, belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung. Hal tersebut dikarenakan dalam struktur belanja tidak langsung terdapat gaji guru, gaji tenaga medis, belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan bagi hasil dengan persentase yang relatif besar.

Guna mengetahui proporsi penggunaan anggaran belanja daerah, dilakukan analisis belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Purbalingga, sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.8 dan Tabel 3.9 Pada Tabel 3.10 digambarkan bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama Tahun 2015-2016 mengalami peningkatan seiring dengan kebijakan kenaikan gaji setiap tahun. Sedangkan pada Tabel 3.9 digambarkan bahwa selama Tahun 2015 – 2016 proporsi gaji pegawai dibandingkan dengan total belanja daerah semakin kecil tetapi proporsi belanja pegawai pada belanja langsung semakin besar. Sedangkan total belanja pegawai proporsinya semakin meningkat yakni dari 51,37 persen menjadi 51,40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan anggaran daerah dalam pemenuhan kebutuhan aparaturnya masih perlu perbaikan.

**Tabel 3.8 : Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 – 2016**

URAIAN	ANGGARAN	
	2015	2016
Total Belanja Pegawai		

URAIAN	ANGGARAN	
	2015	2016
	907.288.335.000	934.672.432.000
Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung	859.034.799.000	883.579.664.000
Gaji dan Tunjangan Guru & tenaga kependidikan	647.557.746.000	648.079.040.000
Gaji dan Tunjangan tenaga kesehatan	66.104.392.000	73.699.227.000
Gaji dan Tunjangan non Guru dan tenaga medis	145.372.661.000	161.801.397.000
Belanja Pegawai pada Belanja Langsung	48.253.536.000	51.092.768.000
Belanja Pegawai Guru & Tenaga Pendidikan	17.495.308.000	17.227.728.000
Belanja Pegawai Tenaga Kesehatan	5.379.306.000	6.727.582.000
Belanja Pegawai Non Pendidikan & Kesehatan	19.664.028.000	21.671.774.000
Belanja Pegawai BLUD	5.714.894.000	5.465.684.000
Total Belanja	1.766.323.134.000	1.818.252.096.000

Tabel 3.9 : Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 – 2016

URAIAN	PROPORSI ANGGARAN	
	2015	2016
Total Belanja Pegawai		
	51,37%	51,40%
Gaji Pegawai	48,63%	48,60%
Gaji dan Tunjangan Guru & tenaga kependidikan	36,66%	35,64%
Gaji dan Tunjangan tenaga kesehatan	3,74%	4,05%
Gaji dan Tunjangan non Guru dan tenaga medis	8,23%	8,90%
Belanja Pegawai pada Belanja Langsung		
	2,73%	2,81%
Belanja Pegawai Guru & Tenaga Pendidikan	0,99%	0,95%
Belanja Pegawai Tenaga Kesehatan	0,30%	0,37%
Belanja Pegawai Non Pendidikan & Kesehatan	1,11%	1,19%
Belanja Pegawai BLUD	0,32%	0,30%

3.1.5.2 Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisit maka diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Selama ini defisit APBD selalu ditutup dengan Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebagai penerimaan pembiayaan dan pelampauan pendapatan yang telah diketahui.

3.2 KERANGKA PENDANAAN

3.2.1 Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2017 – 2021

Melihat capaian kinerja pendapatan daerah Tahun 2010 - 2015, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi sehingga kinerja penyelenggaraan pembangunan dapat lebih ditingkatkan. Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah selama Tahun 2016 - 2021, yaitu sebagai berikut :

- a. Intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Menambah jenis obyek retribusi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Menyesuaian tarif pajak dan penyesuaian dasar pengenaan pajak tertentu;
- d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat;
- e. Membangun sistem dan prosedur administrasi beberapa pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis *online system*;
- f. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur terkait pemungutan pajak dan retribusi;
- g. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;

- h. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah dan optimalisasi pendayagunaan aset daerah;
- i. Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah melalui peningkatan kinerja BUMD;
- j. Menyempurnakan dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan kebijakan tersebut dan dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi, maka proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021 disusun dengan asumsi :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan mendasarkan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Tahun 2010 - 2015;
- b. Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil pajak dan bukan pajak dihitung mendasarkan kenaikan rata-rata Tahun 2010 - 2015;
- c. Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Penyesuaian yang pengalokasiannya berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat diasumsikan sama dengan penerimaan tahun lalu.

Dari Tabel 3.10 dapat dilihat proyeksi pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan akan mengalami peningkatan PAD rata-rata sebesar 6 persen per tahun melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Selain itu peningkatan PAD dilakukan dengan meningkatkan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan melalui peningkatan kinerja BUMD, serta lain-lain PAD sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan penerimaan DAU dan DAK belum dapat diprediksi karena berkaitan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat. Di samping itu, informasi alokasi DAU dan DAK untuk tahun berikutnya baru akan disampaikan pada akhir tahun.

3.2.1 Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2016 – 2021

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Pemenuhan kebutuhan belanja wajib, belanja periodik dan belanja mengikat yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional untuk menunjang kelancaran

- pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan belanja kegiatan dengan dukungan dana yang sudah ditentukan penggunaannya dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas;
- b. Membiayai program dan kegiatan pembangunan manusia yang berkualitas serta memiliki tingkat religius yang mampu meningkatkan kerukunan antar umat dan inter umat beragama.
 - c. Membiayai program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pemenuhan hak dasar masyarakat miskin, antara lain pemenuhan kebutuhan papan, pangan, kesehatan dan pendidikan;
 - d. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat miskin atau rentan miskin dan pemerataan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi; pengembangan, peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM serta peningkatan akses tenaga kerja terhadap lapangan pekerjaan;
 - e. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah guna menunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat;
 - f. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan sosial dasar dan pelayanan umum lainnya;
 - g. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan potensi sumberdaya lokal antara lain melalui pengembangan kepariwisataan dalam rangka mendorong perekonomian daerah;
 - h. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
 - i. Membiayai program dan kegiatan untuk mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai yang digariskan Pemerintah Pusat.

Tabel 3.10
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021

URAIAN		2016	2017	2018	2019	2020	2021
PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH		1.846.792.383.000	1.862.129.252.778	1.876.018.370.874	1.890.740.836.055	1.906.346.649.148	1.922.888.811.026
1	PAD	218.382.360.000	231.485.301.600	245.374.419.696	260.096.884.878	275.702.697.970	292.244.859.849
2	DANA PERIMBANGAN	1.270.384.508.000	1.272.618.436.178	1.272.618.436.178	1.272.618.436.178	1.272.618.436.178	1.272.618.436.178
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	358.025.515.000	358.025.515.000	358.025.515.000	358.025.515.000	358.025.515.000	358.025.515.000
BELANJA PERIODIK WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA							
1	BELANJA PERIODIK	1.001.233.119.670	999.537.526.670	999.537.526.670	999.537.526.670	999.537.526.670	1.028.287.526.670
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	915.574.049.670	913.878.456.670	913.878.456.670	913.878.456.670	913.878.456.670	942.628.456.670
	a BELANJA PEGAWAI	913.478.456.670	913.478.456.670	913.478.456.670	913.478.456.670	913.478.456.670	913.478.456.670
	b BELANJA BUNGA	24.688.000,00					
	c BELANJA HIBAH						
	- Hibah TMMD	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
	- Hibah Pelaksanaan Pemilukada	1.670.905.000					28.750.000.000
	d BELANJA TAK TERDUGA	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
B	BELANJA LANGSUNG	85.659.070.000	85.659.070.000	85.659.070.000	85.659.070.000	85.659.070.000	85.659.070.000
	a BELANJA JASA KANTOR	35.489.848.000	35.489.848.000	35.489.848.000	35.489.848.000	35.489.848.000	35.489.848.000
	c BELANJA DIKLAT	2.837.612.000	2.837.612.000	2.837.612.000	2.837.612.000	2.837.612.000	2.837.612.000
	d RAPAT-RAPAT KOORDINASI	6.483.557.000	6.483.557.000	6.483.557.000	6.483.557.000	6.483.557.000	6.483.557.000
	e PENGELOLAAN UPTD/TPA/TERMINAL/BLK/PASAR/GOR/BPP/OBYEK WISATA	4.338.818.000	4.338.818.000	4.338.818.000	4.338.818.000	4.338.818.000	4.338.818.000
	f BELANJA RUTIN PEMELIHARAAN	36.509.235.000	36.509.235.000	36.509.235.000	36.509.235.000	36.509.235.000	36.509.235.000
2	BELANJA WAJIB	249.183.842.200	255.368.618.527	261.964.518.903	269.000.614.893	276.508.206.808	284.521.010.723
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG						

URAIAN		2016	2017	2018	2019	2020	2021
a	BELANJA BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA	7.279.539.900	8.080.289.289	8.969.121.111	9.955.724.433	11.050.854.121	12.266.448.074
b	BELANJA DANA DESA & ALOKASI DANA DESA	239.260.802.300	244.644.829.238	250.351.897.792	256.401.390.460	262.813.852.687	269.611.062.649
c	BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000
d	BELANJA SOSIAL	1.743.500.000	1.743.500.000	1.743.500.000	1.743.500.000	1.743.500.000	1.743.500.000
3	BELANJA MENGIKAT	446.077.211.951	458.416.458.690	458.416.458.690	458.416.458.690	458.416.458.690	458.416.458.690
a	BELANJA SHARE PROGRAM PUSAT						
	- PAMSIMAS	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
b	BELANJA YANG SDH DITENTUKAN PERUNTUKANNYA						
	- Belanja DAK	121.266.776.000	121.266.776.000	121.266.776.000	121.266.776.000	121.266.776.000	121.266.776.000
	- Hibah dari Pemerintah Pusat/Lainnya	11.201.158.000	11.201.158.000	11.201.158.000	11.201.158.000	11.201.158.000	11.201.158.000
	- Belanja DBH-CHT (50 persen)	3.123.473.000	3.123.473.000	3.123.473.000	3.123.473.000	3.123.473.000	3.123.473.000
	- Belanja Pajak Rokok (50 persen)	17.646.413.500	17.646.413.500	17.646.413.500	17.646.413.500	17.646.413.500	17.646.413.500
	- Bantuan Gubernur	84.227.800.000	84.227.800.000	84.227.800.000	84.227.800.000	84.227.800.000	84.227.800.000
	- PAD dari Kesehatan	128.233.629.000	142.339.328.190	142.339.328.190	142.339.328.190	142.339.328.190	142.339.328.190
	- Belanja Pendidikan	23.000.000.000	23.000.000.000	23.000.000.000	23.000.000.000	23.000.000.000	23.000.000.000
	- Penyertaan Modal	15.511.510.000	15.511.510.000	15.511.510.000	15.511.510.000	15.511.510.000	15.511.510.000
c	Belanja Pelaksanaan 34 Urusan Pemerintahan	40.766.452.451	39.000.000.000	39.000.000.000	39.000.000.000	39.000.000.000	39.000.000.000
TOTAL BELANJA PERIODIK WAJIB DAN MENGIKAT		1.696.494.173.821	1.713.322.603.887	1.719.918.504.263	1.726.954.600.253	1.734.462.192.168	1.771.224.996.083
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MEMBIAYAI 34 URUSAN DAN 8 FUNGSI PENDUKUNG		150.298.209.179	148.806.648.891	156.099.866.611	163.786.235.803	171.884.456.980	151.663.814.944

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan karena tujuan serta sasaran prioritas pembangunan daerah dalam suatu periode belum tentu terkait dengan seluruh urusan pemerintahan. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat. Analisis permasalahan pembangunan diseluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan guna menjamin diperolehnya identifikasi permasalahan penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, diluar permasalahan program pembangunan daerah.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan analisis Gambaran Umum selama 5 tahun, maka Permasalahan Pembangunan Kabupaten Purbalingga dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Kemiskinan

Salah satu indikator utama dari tingkat kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan. Pada saat ini jumlah penduduk miskin Kabupaten

Purbalingga sebesar 176.040 atau 19,75 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga. Dari jumlah tersebut, sebagian menempati rumah yang tidak layak huni. Data tahun 2015, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga sebanyak 27.533 rumah, dan 3.526 (12,8 persen) diantaranya menyatu dengan kandang ternak, serta 13.894 (37,3 persen) diantaranya tidak memiliki jamban yang layak. Dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan, tingkat konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Purbalingga masih di bawah standar pola pangan harapan, yaitu sebesar 87,90.

Pendidikan

Kinerja pembangunan pendidikan menjadi salah satu indikator utama untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan manusia. Indikator kinerja utama pembangunan pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Berdasarkan data tahun 2015, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Purbalingga sebesar 11,78 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 6,85 tahun. Berdasarkan strata pendidikan, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar di Kabupaten Purbalingga sudah cukup baik yaitu sebesar 109 sedangkan APK SMP/Sederajat sebesar 100, dan APK Sekolah Menengah/Sederajat baru sebesar 52,47. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Purbalingga, maka pembangunan pendidikan harus terus ditingkatkan. Dengan meningkatnya kualitas manusia antara lain melalui peningkatan pendidikan dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan dan daya saing setiap individu dalam mengakses sumberdaya sosial dan ekonomi. Oleh karena itu dengan meningkatnya pendidikan masyarakat dalam jangka panjang akan dapat mengurangi angka kemiskinan.

Meskipun layanan pendidikan di Kabupaten Purbalingga sudah menjangkau seluruh wilayah, tetapi masih dibutuhkan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan baik dari sisi kapasitas maupun kualitasnya antara lain berupa ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium, ruang guru, kamar mandi dan WC, meubelair, alat peraga dan

sebagainya. Pada tahun 2015 jumlah ruang kelas Sekolah Dasar dalam kondisi baik sebanyak 3.033 ruang, dalam kondisi rusak ringan sebanyak 311 ruang, dalam kondisi rusak sedang 67 ruang, dan dalam kondisi rusak berat sebanyak 32 ruang. Sedangkan untuk SMP masih terdapat 14 ruang dalam kondisi rusak berat, 6 ruang dalam kondisi rusak sedang, 74 ruang dalam kondisi rusak ringan dan 1.067 ruang dalam kondisi baik. Dalam penyediaan fasilitas perpustakaan, pada saat ini masih terdapat 180 SD, 73 MI, dan 10 SMP, serta 30 MTs yang belum memiliki ruang perpustakaan. Sementara itu dalam penyediaan ruang laboratorium IPA, 59 SMP dan 8 MTs yang memiliki ruang laboratorium. Demikian juga dalam penyediaan prasarana lainnya masih banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas kamar mandi dan WC yang layak dan terpisah antara kamar mandi/WC murid dan kamar mandi/WC guru. Dalam hal ketersediaan tenaga pendidik juga masih perlu untuk ditingkatkan baik dari sisi jumlah maupun kompetensinya. Pada tahun 2015, guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D4 baru mencapai 74,65 persen, guru SMP/MTs baru 35,82 persen, sedangkan guru SMA/SMK/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D4 baru mencapai 28,32 persen.

Permasalahan penting lainnya dalam pembangunan bidang pendidikan adalah terkait pemerataan akses layanan pendidikan khususnya bagi keluarga miskin. Pada saat ini masih terdapat 1.159 orang anak usia sekolah SD dan 2.167 orang anak usia sekolah SMP yang tidak sekolah dimana sebagian besar disebabkan karena faktor ekonomi (hasil pendataan oleh TKSK Tahun 2015). Data yang ada menunjukkan bahwa sebagian anak usia sekolah pendidikan dasar yang tidak sekolah merupakan penderita cacat, baik cacat fisik maupun cacat mental. Sehubungan dengan hal tersebut dibutuhkan kebijakan afirmatif agar anak-anak usia sekolah pendidikan dasar yang tidak sekolah dapat menikmati layanan pendidikan termasuk layanan pendidikan luar biasa.

Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan menduduki posisi yang sangat penting dalam rangka peningkatan kualitas manusia. Kinerja pembangunan kesehatan menjadi penentu utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator utama untuk menilai kinerja pembangunan manusia. Pada tahun 2015, IPM Kabupaten Purbalingga sebesar 67.02 dan menduduki peringkat ke 26 di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu komponen IPM adalah Usia Harapan Hidup (UHH). Usia Harapan Hidup masyarakat Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 72,80 tahun. Relatif rendahnya UHH Kabupaten Purbalingga antara lain karena beberapa indikator kinerja pembangunan kesehatan masih relatif rendah. Angka morbiditas di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 16,5 persen, Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan sebesar 132 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH), sedangkan Angka Kematian Bayi sebesar 10,12 per 1000 KH.

Kinerja pembangunan kesehatan tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Pada tahun 2015, dari 22 Puskesmas yang ada, belum ada Puskesmas yang terakreditasi. Sedangkan jumlah rumah sakit yang terakreditasi juga belum ada. Sementara itu jumlah Puskesmas yang melakukan layanan rawat inap Puskesmas baru sebanyak 11 puskesmas, dan jumlah Puskesmas mampu bersalin sebanyak 12 unit. Terkait dengan layanan persalinan, cakupan Puskesmas mampu PONEK sesuai standar baru mencapai 5 unit dan cakupan rumah sakit mampu PONEK sesuai standar baru mencapai 1 unit.

Akses sanitasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2015 cakupan akses air bersih di Kabupaten Purbalingga baru mencapai 72,4 persen, sedangkan cakupan kepemilikan jamban baru mencapai 74,1 persen. Relatif rendahnya ketersediaan prasarana dan sarana sanitasi serta masih adanya budaya buang air besar di tempat terbuka memerlukan upaya sungguh-sungguh dalam rangka peningkatan akses sanitasi masyarakat. Cakupan desa Open

Defecation Free (ODF) Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 baru mencapai 11 desa (4,6 persen).

Adanya prevalensi HIV-AIDS di tingkat nasional dan khususnya di Kabupaten Purbalingga yang cukup tinggi merupakan permasalahan yang harus segera ditanggulangi. Hal ini disebabkan karena HIV – AIDS merupakan *silent killer*, pembunuh tersembunyi yang pelan tapi pasti. Tren jumlah penderita HIV-AIDS terus meningkat dengan penderita usia produktif, reproduktif, dan bayi. Hal ini berdampak sangat luas baik berupa dampak medis, psikologis, sosial, ekonomi, dan budaya/ agama. Dikhawatirkan adanya fenomena gunung es pada kasus HIV-AIDS karena terdapat orang berperilaku resiko tinggi antara lain wanita/ pria pekerja seks, pelanggan pekerja seks, pasangan pelanggan pekerja seks, pengguna NAPZA suntik dan pasangannya, LSL, waria, narapidana, dan anak jalanan. Diperlukan upaya maksimal guna mengendalikan epidemi HIV-AIDS, di samping juga perlu penanganan secara profesional pada orang yang telah terjangkit HIV-AIDS serta tersedianya antiretroviral (ARV).

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Meskipun kondisi prasarana jalan di Kabupaten Purbalingga terus mengalami peningkatan, tetapi masih perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan termasuk pembangunan jalan dan jembatan baru guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas transportasi antar wilayah. Pada tahun 2015 kondisi jalan di Kabupaten Purbalingga dalam kondisi baik sebesar 72,55 persen, Sedangkan jembatan dalam kondisi baik sebesar 93,36 persen.

Kondisi prasarana irigasi juga masih perlu mendapatkan perhatian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian khususnya padi. Pada tahun 2015 sawah beririgasi teknis di Kabupaten Purbalingga seluas 5.962 ha, setengah teknis seluas 6.029 ha, dan sawah tadah hujan seluas 2.407 ha.

Sementara itu untuk mewujudkan ketertiban pengelolaan tata bangunan gedung dan keamanan pemanfaatan gedung, diperlukan adanya

produk hukum terkait penataan bangunan dan lingkungan serta peningkatan pelaksanaan sertifikasi laik fungsi gedung.

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat perlu peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana wilayah dan prasarana permukiman. Pada tahun 2015 di Kabupaten Purbalingga masih terdapat kawasan kumuh taraf ringan seluas 30,17 ha, dan kawasan kumuh taraf sedang seluas 2,22 ha. Di sisi lain masih banyak warga masyarakat yang belum memiliki akses terhadap sanitasi dan air bersih. Cakupan jamban masyarakat di Kabupaten Purbalingga baru mencapai 71,4 persen, sedangkan cakupan akses air bersih baru mencapai 72,4 persen. Penanganan persampahan di Kabupaten Purbalingga juga belum optimal, dengan rasio sampah yang ditangani baru sebesar 10 persen. Terkait pemenuhan kebutuhan listrik, pada saat ini masih ada sebagian masyarakat yang belum menikmati fasilitas listrik, dengan rasio elektrifikasi sebesar 81 persen.

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Purbalingga dalam Pemilu masih dibawah 80 persen. Meskipun masih relatif lebih tinggi dibanding daerah lain, namun masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat.

Dalam rangka mencapai tujuan akhir pembangunan yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia mengharuskan adanya keseimbangan dalam penyelenggaraan pembangunan, yang meliputi keseimbangan antara pembangunan prasarana fisik dengan pembangunan manusia serta antara pemenuhan kebutuhan fisik manusia dengan pemenuhan kebutuhan moral spiritual termasuk pembangunan karakter dan pengembangan wawasan kebangsaan. Pada saat ini semakin nampak adanya fenomena sosial dimana masyarakat semakin permisif terhadap perilaku yang menyimpang dari norma dan etika sosial maupun keagamaan. Di sisi lain juga

semakin dirasakan adanya penurunan kesetiakawanan sosial serta semangat patriotisme dan nasionalisme yang ditandai dengan menurunnya semangat gotong royong serta menurunnya kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa dan negara.

Sosial

Sesuai dengan landasan ideal dan konstitusional, pembangunan yang dilaksanakan harus melibatkan dan memberi manfaat secara merata bagi seluruh rakyat baik dalam perspektif kewilayahan maupun dalam perspektif strata sosial ekonomi masyarakat agar seluruh rakyat dapat ditingkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupannya secara layak dan bermartabat. Realita yang ada menunjukkan bahwa terdapat kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, mental, sosial maupun ekonomi dengan berbagai sebab yang menyebabkan terbatasnya kemampuan untuk memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat. Terhadap kelompok masyarakat seperti ini yang lazim disebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) perlu dilakukan kebijakan intervensi yang bersifat afirmatif.

Sampai dengan tahun 2015, jumlah dan persentase PMKS yang terlayani, dalam hal ini PMKS yang mendapatkan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar masih sangat terbatas. Demikian juga jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya masih sangat terbatas. Sesuai target SPM, jumlah PMKS yang harus ditangani pada tahun 2015 sebesar 80%.

Tenaga kerja

Meskipun lebih rendah dari angka pengangguran Provinsi Jawa Tengah, upaya untuk mengurangi angka pengangguran perlu terus dilakukan antara lain melalui peningkatan ketrampilan tenaga kerja dan fasilitasi penempatan tenaga kerja. Disisi lain Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk

meningkatkan kesejahteraan dan melindungi buruh melalui upaya pemenuhan hak-hak normatif buruh. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 sebesar 5,13 persen. Terkait pemenuhan hak normatif buruh, pada saat ini cakupan tenaga kerja di Kabupaten Purbalingga yang mendapat perlindungan jaminan sosial tenaga kerja sebesar 70 persen. Sedangkan rasio Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2016 sebesar Rp. 1.377.500,- atau 103,55 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tahun 2016.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Dalam rangka pembangunan yang berkeadilan, perlu terus ditingkatkan upaya pengarusutamaan gender dan adanya kebijakan khusus terkait pemenuhan hak-hak anak. Indikator keberhasilan pengarusutamaan gender antara lain adalah Indek Pembangunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG). Pada tahun 2014, IPG Kabupaten Purbalingga sebesar 90,12 (menempati urutan ke 24 di Provinsi Jawa Tengah). Sedangkan IDG Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 sebesar 71,03 (menempati urutan ke 11 di Provinsi Jawa Tengah). Isu gender dan anak selama ini harus diakui masih kurang memperoleh perhatian. Anak-anak sebagai generasi penerus dan pewaris masa depan merupakan kelompok masyarakat yang rentan dan oleh karena itu harus ada kebijakan dan program yang nyata dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak. Masih adanya pekerja di bawah umur dan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tengah masyarakat yang sebagian besar diantaranya tidak diketahui (tidak dilaporkan) mengharuskan adanya peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data yang ada menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah pekerja dibawah umur (5 – 14 tahun) di Kabupaten Purbalingga sebanyak 533 orang dan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dan ditangani sebanyak 16 kasus.

Pertanahan

Pembangunan fasilitas umum yang semakin pesat membutuhkan ketersediaan lahan yang memadai. Adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan lahan bagi pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan dsb. Namun tidak semua kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sudah tersedia lahannya. Pada beberapa kasus bangunan fisik sudah selesai namun lahannya belum selesai dibebaskan. Hal tersebut seringkali menjadi penghambat dalam proses pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga memiliki aset tanah yang cukup banyak dan jumlahnya menyebar, tapi belum semua aset tersebut terpetakan sehingga belum semua Tanah Milik Pemerintah Kabupaten bersertifikat.

Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkungan hidup sangat penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Fungsi lingkungan hidup yang terjaga dan lestari akan mampu mendukung kehidupan manusia pada saat ini dan yang akan datang. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk maka terjadi ancaman degradasi lahan khususnya lahan pertanian. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian tak terelakan. Lahan pertanian basah maupun kering berupa kebun hortikultura ataupun tegalan selain berfungsi menopang ketahanan pangan juga menjadi komponen ekosistem dan komponen daur hidrologi, sehingga apabila tidak ada pengendalian penggunaan lahan baik untuk permukiman maupun industri akan mengancam ketahanan pangan dan keseimbangan ekosistem dan daur hidrologi. Berdasarkan data Status Lingkungan Hidup daerah (SLHD), pada tahun 2015 terjadi pengurangan tanah kering/tegalan sebanyak 8.367 ha, dan pengurangan sawah sebanyak 1.385,81 ha. Sedangkan lahan permukiman bertambah 7.748 ha (67 persen).

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Efektivitas fungsi lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan akan sangat mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tingkat kemajuan desa mencerminkan efektivitas fungsi lembaga pemerintahan desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 0,6394.

Pengendalian Penduduk dan KB

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 masih cukup tinggi yaitu sebesar 1,06 persen. Hal ini tentu membutuhkan upaya sungguh-sungguh dalam rangka peningkatan kepesertaan KB. Cakupan kepesertaan KB aktif di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 sebesar 76,22 persen, sedangkan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB dan tidak terpenuhi (unmetneed KB) sebesar 12,5 persen, dan angka *drop out* KB sebesar 30 persen. Di sisi lain tingkat kesejahteraan keluarga masih perlu untuk terus ditingkatkan dimana jumlah keluarga sejahtera baru mencapai 55,01 persen dan jumlah keluarga pra sejahtera masih sebesar 24,9 persen.

Perhubungan

Semakin meningkatnya jumlah kendaraan dari tahun ke tahun yang tidak sebanding dengan peningkatan kapasitas prasarana jalan membutuhkan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan angkutan darat guna meningkatkan kenyamanan layanan angkutan dan keselamatan lalu lintas.

Komunikasi dan Informatika

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi pada saat ini menjadi sebuah keniscayaan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan dan komunikasi publik. Sampai dengan tahun 2015 jumlah SKPD yang memiliki website baru mencapai 25 SKPD dengan intensitas updating informasi rata-rata sebanyak 320 hari per tahun.

Sementara itu jumlah Sistem Informasi Manajemen (SIM) milik Pemerintah Daerah yang berfungsi dan aktif sebesar 26 unit. Sedangkan jumlah pelayanan publik perangkat daerah yang telah dilaksanakan secara online baru 1 unit.

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat akan meningkatkan kemampuannya dalam mengakses sumberdaya sosial dan ekonomi guna meningkatkan kesejahtraannya. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga relatif tinggi dibanding daerah lain, tetapi pendapatan perkapita masyarakat Purbalingga masih relatif rendah. Pada tahun 2014 PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 15,95 juta, masih jauh lebih rendah dibanding PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp. 27,61 juta, dan PDB per kapita Nasional sebesar Rp. 41, 81 juta. Hal ini antara lain disebabkan karena belum optimalnya pendayagunaan potensi ekonomi yang ada.

Kondisi agro ekologis wilayah Kabupaten Purbalingga yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya berbagai komoditas pertanian masih perlu untuk ditingkatkan pendayagunaannya antara lain melalui pengembangan komoditas pertanian yang bernilai tinggi sehingga akan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Pengembangan kepariwisataan juga sangat memungkinkan untuk ditingkatkan termasuk pengembangan desa wisata yang dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan perkapita masyarakat karena memiliki efek multiplier yang luas.

Secara umum masih perlu peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat yang meliputi sektor pertanian dalam arti luas, industri rakyat, dan sebagainya. Di sektor perdagangan, perlu peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana perdagangan terutama melalui revitalisasi pasar-pasar tradisional. Di sektor koperasi masih perlu pengembangan kehidupan berkoperasi dan peningkatan kualitas manajemen koperasi.

Sementara itu untuk mendorong investasi di Kabupaten Purbalingga perlu peningkatan iklim investasi sehingga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan angka pengangguran semakin berkurang.

Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu pendukung upaya pembangunan manusia. Salah satu tujuan dari pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga adalah memupuk dan mengembangkan semangat kepeloporan, patriotisme, nasionalisme serta mengembangkan jiwa sportifitas disamping juga dalam rangka meningkatkan kualitas jasmani generasi muda. Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga masih perlu untuk ditingkatkan. Dalam tahun 2015, fasilitasi kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebanyak 6 (enam) kegiatan, sedangkan fasilitasi kegiatan olahraga sebanyak 26 kegiatan. Adapun prestasi olahraga Kabupaten Purbalingga di tingkat regional sebanyak 6 (enam) kejuaraan dan di tingkat nasional sebanyak 1 (satu) kejuaraan.

Salah satu tantangan dalam upaya pembangunan manusia khususnya dalam pembangunan kepemudaan adalah adanya kecenderungan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba. Untuk itu perlu peningkatan sosialisasi bahaya narkoba khususnya di kalangan generasi muda.

Kebudayaan

Pembangunan bidang seni budaya merupakan salah satu upaya pembangunan karakter bangsa. Seni budaya, khususnya seni budaya nasional merupakan wahana internalisasi nilai-nilai luhur yang perlu untuk terus ditanamkan dan dikembangkan untuk memperkuat karakter dan integritas bangsa. Disamping itu, seni budaya secara umum dapat menjadi media untuk mengembangkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Di tengah kehidupan yang semakin materialistis dan semakin menguatnya gelombang globalisasi, ada kecenderungan semakin menurunnya apresiasi terhadap seni budaya bangsa. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan dan program yang

nyata dalam rangka peningkatan apresiasi terhadap seni budaya khususnya yang bersifat tradisional. intensitas kegiatan kajian, fasilitasi, pementasan serta pengiriman duta seni maupun pembinaan organisasi dan kelompok kesenian yang ada perlu terus ditingkatkan. Demikian juga berbagai kekayaan warisan sejarah berupa benda-benda cagar budaya yang sangat banyak di Kabupaten Purbalingga perlu terus dipelihara dan dijaga agar tetap lestari sehingga generasi yang akan datang dapat mengetahui akar budayanya.

Perpustakaan

Peningkatan kualitas manusia tidak hanya diukur dari tingkat pendidikan masyarakat. Ilmu yang dapat diserap oleh peserta didik di bangku pendidikan sangatlah terbatas dan lebih bersifat sebagai bekal dasar dan stimulasi bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu perlu dikembangkan semangat untuk menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi serta wawasan pengetahuan lainnya dalam masyarakat khususnya bagi anak-anak dan generasi muda antara lain melalui pengembangan budaya membaca. Peran perpustakaan sangat penting dalam rangka mendorong dan mendukung pengembangan budaya membaca. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Purbalingga pada saat ini sebanyak 312 unit yang terdiri dari 2 unit perpustakaan umum, 255 unit perpustakaan sekolah, 48 unit perpustakaan desa, dan 5 unit perpustakaan lainnya.

4.2. ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu Strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, meliputi : 1) Isu strategis dari dinamika internasional, nasional maupun regional yang berpengaruh terhadap Kabupaten Purbalingga 2) Isu strategis daerah lainnya yang berpengaruh terhadap Kabupaten Purbalingga 3) Isu strategis dari kebijakan pembangunan berupa RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025, dan isu strategis dengan melihat kondisi sosial, ekonomi,

kependudukan, sarana prasarana dan pemerintahan umum pada masa kini serta melihat kemungkinan yang akan terjadi masa mendatang.

Selain itu Isu strategis yang patut diangkat dalam RPJMD ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria yang meliputi : 1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; 4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Isu Strategis yang diangkat dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 meliputi :

Kemiskinan

Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu indikator utama untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah/daerah. Keluarga yang miskin hampir dapat dipastikan sulit untuk memperoleh kesejahteraan dan kehidupan yang berkualitas karena rendahnya kemampuan untuk mengakses sumberdaya sosial dan ekonomi guna menunjang kehidupannya. Rendahnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup antara lain ditandai dengan kurang terpenuhinya kebutuhan pangan, papan (termasuk sanitasi), sandang (dalam batas yang memadai), akses untuk memperoleh layanan kesehatan dan layanan pendidikan serta kesempatan untuk mengaktualisasikan pikiran, gagasan, aspirasi dan sebagainya. Oleh karena itu kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat strategis sehingga harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan agar dapat dicapai tujuan pembangunan dan tujuan penyelenggaraan negara sesuai amanat konstitusi.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang multi kompleks. Dilihat dari aspek penyebab, terjadinya kemiskinan dapat disebabkan karena faktor-faktor

internal maupun eksternal. Penyebab yang bersifat internal antara lain : 1) keterbatasan kondisi fisik seperti kecacatan (termasuk kecacatan mental); 2) terbatasnya kapasitas dan kompetensi akibat rendahnya tingkat pendidikan dan sebagainya; 3) keterbatasan kepemilikan aset yang menyebabkan terbatasnya akses terhadap sumberdaya sosial dan ekonomi. Berdasarkan penyebab yang bersifat eksternal, kemiskinan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu : 1) kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena adanya kebijakan yang tidak *pro poor* ; 2) kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena adanya budaya yang tidak produktif; 3) kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena kondisi lingkungan alam yang kurang menunjang kehidupan masyarakat seperti tanah yang tandus, rawan bencana dan sebagainya.

Kompleksitas permasalahan kemiskinan menyebabkan upaya penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Artinya upaya penanggulangan kemiskinan harus mampu menyentuh akar penyebabnya tidak hanya menangani gejala yang nampak, harus mencakup seluruh strata keluarga miskin dengan sasaran yang jelas dengan melibatkan seluruh sektor terkait dan dilaksanakan secara terus-menerus. Berdasarkan kondisinya, keluarga miskin dikelompokkan menjadi 4 (empat) klaster. Klaster 1 yaitu keluarga miskin yang tidak memiliki potensi untuk diberdayakan agar mampu melakukan aktivitas produktif seperti misalnya orang lanjut usia yang tidak memiliki pengampu, anak terlantar, penyandang cacat ganda, dan sebagainya. Untuk keluarga miskin klaster 1, satu-satunya intervensi yang harus diberikan oleh pemerintah adalah upaya yang bersifat karitatif yaitu dengan memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan bermartabat termasuk di dalamnya memberikan akses layanan kesehatan dan pendidikan. Keluarga miskin klaster 2 adalah keluarga miskin yang masih memungkinkan untuk diberdayakan meskipun dalam skala yang terbatas. Termasuk dalam klaster 2 adalah keluarga miskin dalam usia produktif yang sehat secara jasmani dan mental meskipun tidak memiliki aset produktif atau memiliki dalam skala yang sangat terbatas. Intervensi pemerintah yang dapat diberikan kepada keluarga

miskin klaster 2 adalah berupa upaya pemberdayaan yang dilakukan bersamaan dengan upaya karitatif yaitu pemberian bantuan/stimulan bagi pemenuhan kebutuhan hidup pokok, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan sebagainya. Keluarga miskin klaster 3 adalah keluarga miskin yang memiliki aktivitas produktif meskipun dalam skala mikro sehingga masih memungkinkan untuk dientaskan. Di samping pemberian bantuan stimulan untuk mengurangi beban pengeluarannya, upaya pengentasan keluarga miskin klaster 3 dapat dilakukan melalui peningkatan keterampilan usaha, fasilitasi permodalan, fasilitasi sarana dan prasarana usaha, dan sebagainya. Adapun klaster 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang membutuhkan dukungan dan fasilitasi pemerintah melalui berbagai program pembangunan agar tidak jatuh miskin terutama ketika terjadi gejolak ekonomi yang menimbulkan kenaikan harga kebutuhan hidup pokok.

Di samping intervensi dalam rangka pengurangan pengeluaran dan peningkatan pendapatan keluarga miskin, yang paling bersifat strategis adalah upaya pencegahan pewarisan kemiskinan dari keluarga miskin kepada anak keturunannya untuk memutus rantai kemiskinan. Agar tidak mewarisi kemiskinan orang tuanya, anak-anak keluarga miskin harus tercukupi kebutuhan hidupnya secara memadai berupa pemenuhan kebutuhan pangan dalam jumlah dan kualitas yang memadai, hidup dalam lingkungan yang sehat, serta memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian diharapkan anak-anak keluarga miskin dapat mengalami tumbuh kembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani serta cukup memiliki bekal ilmu dan keterampilan sehingga memiliki daya saing untuk memperoleh lapangan pekerjaan atau berusaha secara mandiri.

Berdasarkan data Susenas BPS, jumlah keluarga miskin di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 sebesar 19,75 persen. Sedangkan pada tahun 2010 angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga sebesar 24,58 persen. Meskipun mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga masih menempati peringkat ke-5 di Provinsi Jawa Tengah. Relatif tingginya angka kemiskinan di Kabupaten

Purbalingga menyebabkan relatif rendahnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya.

Pembangunan Manusia

Pada hakekatnya tujuan utama pembangunan adalah membangun manusia melalui upaya peningkatan kualitas manusia baik dari aspek lahiriah maupun dalam dimensi yang lebih luas termasuk aspek intelektual, moral, dan spiritual. Pembangunan fisik prasarana, ekonomi, sosial dan sebagainya dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas manusia dan mewujudkan kehidupan manusia yang bermartabat.

Pembangunan manusia juga menjadi isu strategis karena menyangkut pemenuhan hak dasar rakyat yang dijamin konstitusi. Pemenuhan hak dasar ini antara lain meliputi hak untuk mendapatkan identitas/ legalitas, akses layanan kesehatan, akses layanan pendidikan, pangan, perumahan sehat dan layak, serta fasilitas sanitasi dan akses terhadap air minum. Pembangunan manusia dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia sejak janin dalam kandungan sampai lanjut usia.

Nilai akhir dari seluruh aktivitas pembangunan diukur dengan pencapaian tingkat kesejahteraan rakyat. Metode lain untuk mengukur keberhasilan pembangunan, khususnya terkait pembangunan manusia di suatu daerah dengan menggunakan tolok ukur *Physical Quality of Life Index* (PQLI) atau yang lebih dikenal Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator komposit yang di bentuk oleh Indeks Kesehatan yang dicerminkan dengan Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan yang terdiri dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, serta Indeks Hidup Layak yang digambarkan melalui Pengeluaran Rill per Kapita. Capaian IPM Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 sebesar 66.23 dan mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi sebesar 67.02. Meskipun mengalami kenaikan, namun masih di bawah rata – rata capaian Provinsi Jawa Tengah yakni sebesar 68.78 pada tahun 2014 dan 69.49 pada tahun 2015. Capaian IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2014 menempati urutan ke-26 se Jawa Tengah,

sedangkan capaian IPM tahun 2015 menempati urutan yang ke-27 se Jawa Tengah.

Perubahan angka yang terjadi pada komponen IPM sangat dipengaruhi oleh beberapa variabel atau indikator pendukung. Variabel pertama adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan rata-rata perkiraan lama kehidupan yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Oleh karena itu AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka harapan hidup diharapkan mencerminkan lama hidup dan hidup sehat. Lama hidup seseorang tidak terlepas dari kesehatan orang tersebut. Usia hidup panjang tanpa didukung oleh kesehatan yang baik tentunya akan menjadi beban. Dengan kata lain, usia harapan hidup tidak terlepas dari upaya peningkatan taraf kesehatan. Angka Harapan Hidup tinggi merupakan salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan. Pernyataan tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa lama hidup seseorang dipengaruhi oleh tingkat kesehatan yang tinggi, asupan gizi yang baik dan kepedulian terhadap kesehatan melalui pemeliharaan kesehatan. Faktor kesehatan balita, ibu hamil dan penyebab kematian pada usia balita saat ibu melahirkan sangat perlu diperhatikan. Semakin dini kesehatan balita dan ibu hamil diperhatikan dan dengan bekal gizi yang baik, diharapkan taraf kesehatan juga akan semakin baik. Dengan demikian harapan hidup panjang akan lebih terwujud.

Capaian AHH Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 sebesar 72.80 dan capaian pada tahun 2015 tetap, tidak mengalami kenaikan. Capaian AHH ini masih berada di bawah capaian rata – rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 73.88 pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 73.98 pada tahun 2015. Capaian AHH Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 menempati posisi ke - 29 / 30 se-Jawa Tengah dan pada tahun 2015 berada pada urutan 30.

Indikator bidang pendidikan yang pertama adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Asumsinya dalah bahwa kemungkinan anak tersebut akan tetap

bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja pembangunan pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Pada tahun 2014 capaian HLS Kabupaten Purbalingga sebesar 11.51 dan meningkat menjadi 11.78 pada tahun 2015. Capaian HLS ini masih berada di bawah capaian rata – rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 12.17 pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 12.78 pada tahun 2015. Capaian HLS Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 menempati posisi ke – 28 se Jawa Tengah, sedangkan capaian tahun 2015 menempati urutan ke – 31.

Indikator pembangunan pendidikan selanjutnya adalah Rata – rata Lama Sekolah (RLS). RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP. Awal perhitungan RLS dilakukan dengan menyeleksi penduduk pada usia 25 tahun ke atas, baru selanjutnya menghitung lamanya sekolah. Apabila dalam partisipasi sekolah seseorang tidak/belum pernah bersekolah, maka skor lama sekolahnya 0 (nol). Jika partisipasi sekolah yaitu masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi, maka perhitungan lama sekolah disesuaikan dengan cara konversi ijazah ke dalam tahun lama sekolah. Untuk yang tidak mempunyai ijazah, maka skor konversi tahun lama sekolahnya 0 tahun, SD sederajat 6 tahun, SMP sederajat 9 tahun, SMA sederajat 9 tahun, D1/D2 sederajat 14 tahun, D3 sederajat 15 tahun, D4/S1 sederajat 16 tahun, dan S2/S3 sederajat 18 tahun. Adapun capaian RLS Kabupaten Purbalingga sebesar 6.84 pada tahun 2014 dan meningkat

menjadi 6.85 pada tahun 2015. Capaian RLS ini masih berada di bawah capaian rata – rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 6.93 pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 7.03 pada tahun 2015. Capaian RLS Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 menempati posisi ke – 19 se Jawa Tengah, dan pada tahun 2015 berada pada urutan ke – 21.

Sementara itu, kemampuan daya beli memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat dikatakan memenuhi standar hidup layak. Dengan meningkatnya pendapatan seseorang diharapkan kemampuan daya beli akan meningkat pula, dengan syarat kenaikan pendapatan tidak dibarengi dengan kenaikan harga barang dan jasa yang jauh lebih tinggi dari kenaikan pendapatan tersebut. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Rata-rata pengeluaran per kapita konstan kemudian disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Pengeluaran yang telah dibagi dengan PPP ini disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

Capaian paritas daya beli Kabupaten Purbalingga sebesar 8.539 ribu pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 8.838 ribu pada tahun 2015. Capaian paritas daya beli ini masih berada di bawah capaian rata – rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 9.640 ribu pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 9.930 ribu pada tahun 2015. Capaian paritas daya beli Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 menempati posisi ke 27 se Jawa Tengah, dan pada tahun 2015 berada pada peringkat ke 25.

Salah satu agenda pembangunan yang telah disepakati secara global yang dapat menjadi referensi dan menjadi dasar dalam perumusan isu strategis adalah komitmen *Millenium Development Goals* (MDGs) yang ditetapkan pada United Nation Summit tahun 1990 oleh PBB. MDGs

menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan dan mengartikulasi satu gugus tujuan yang berkaitan satu sama lain ke dalam agenda pembangunan dan kemitraan global. Setiap tujuan dijabarkan ke dalam satu sasaran atau lebih dengan indikator yang terukur yaitu terkait pengurangan kemiskinan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, perbaikan kesehatan ibu dan anak, pengurangan prevalensi penyakit menular, pelestarian lingkungan hidup, dan kerjasama global. MDGs yang didasarkan pada konsensus dan kemitraan global ini, juga menekankan kewajiban negara maju untuk mendukung penuh upaya tersebut. Dengan telah diadopsinya komitmen MDG's oleh Indonesia, merupakan keharusan bagi seluruh daerah di Indonesia untuk menggunakan target yang dicanangkan dalam MDG's sebagai referensi dalam penetapan target pembangunan daerah.

Pencapaian tujuan dalam MDGs telah berakhir pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs, dikembangkan suatu konsepsi dalam konteks agenda pembangunan pasca 2015, yang disebut *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015 – MDGs, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *deflation* sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

Sustainable Development Goals (SDGs) didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. Berbeda dengan MDGs yang lebih bersifat birokratis dan teknokratis, penyusunan butir-butir SDGs lebih inklusif melibatkan banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil atau *Civil Society Organization (CSO)*. Penyusunan SDGs sendiri memiliki beberapa tantangan karena masih terdapat beberapa butir-butir target MDGs yang belum bisa dicapai dan harus diteruskan di dalam SDGs. Seluruh tujuan, target dan indikator dalam dokumen SDGs juga perlu mempertimbangkan perubahan situasi global saat ini. Berbeda halnya dengan MDGs yang ditujukan hanya pada negara-negara berkembang, SDGs memiliki sasaran yang lebih universal dan dihadirkan untuk menggantikan MDGs dengan tujuan

yang lebih memenuhi tantangan masa depan dunia. Adapun 17 *global goals* dari SDGs adalah sebagai berikut :

1. Tanpa Kemiskinan

Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.

2. Tanpa Kelaparan

Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.

3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan

Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.

4. Pendidikan Berkualitas

Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

5. Kesetaraan Gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.

6. Air Bersih dan Sanitasi

Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

7. Energi Bersih dan Terjangkau

Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.

8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak

Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.

10. Mengurangi Kesenjangan

Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas

Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab

Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.

13. Aksi Terhadap Iklim

Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

14. Kehidupan Bawah Laut

Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.

15. Kehidupan di Darat

Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian

Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Mengingat bahwa pembangunan manusia mencakup begitu banyak aspek dan menjadi komitmen global, maka pembangunan manusia ditetapkan sebagai isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga. Pembangunan manusia sangat berkaitan erat dengan pembangunan bidang pendidikan,

kesehatan, penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, dan peningkatan apresiasi terhadap seni budaya daerah dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa. Berdasarkan data hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015, diketahui bahwa jumlah anak usia sekolah setingkat SD sampai dengan SMA yang berasal dari keluarga tidak mampu (tingkat kesejahteraan 40 persen terendah) di Kabupaten Purbalingga sebanyak 87.492 anak. Dari jumlah tersebut terdapat 1.970 anak usia sekolah setingkat SD (usia 7 – 12 tahun) yang tidak sekolah (4.46 persen), dan 5.450 anak usia sekolah setingkat SMP (usia 13 – 15 tahun) yang tidak sekolah (22,75 persen). Sedangkan pada usia sekolah SM (usia 16 – 18 tahun) yang tidak sekolah sebanyak 13.265 anak (68.45 persen). Tetapi berdasarkan hasil pendataan inisiatif pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), jumlah anak usia sekolah SD yang tidak sekolah sebanyak 1.159 anak, dan anak usia sekolah SMP yang tidak sekolah sebanyak 2.167 anak. Berbagai hal yang harus diprioritaskan dalam pembangunan pendidikan antara lain memperluas dan pemerataan akses pendidikan dalam rangka mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah terutama bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, proses pendidikan harus menjadi sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang melalui internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran dan sistem penilaian dalam pendidikan.

Dalam pembangunan kesehatan, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah perlunya peningkatan upaya promotif dan preventif, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu anak, perbaikan gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Disamping itu, perlu untuk terus ditingkatkan upaya

pemenuhan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan serta pemberian fasilitas layanan jaminan kesehatan untuk seluruh warga masyarakat terutama bagi warga miskin. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Disamping capaian AHH yang masih rendah, berdasarkan hasil PBDT 2015 masih terdapat 16.150 orang yang menderita penyakit kronis. Selanjutnya, dari 98.371 rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terendah hasil PBDT 2015, masih terdapat 34.245 rumah tangga atau 34.81 persen yang tidak memiliki akses jamban baik jamban sendiri maupun jamban bersama.

Selanjutnya dalam rangka memperkuat karakter dan jatidiri warga masyarakat perlu adanya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menangkal penetrasi budaya global yang kurang konstruktif serta meningkatkan apresiasi terhadap bahasa nasional dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif melalui pendidikan formal, non formal maupun informal.

Ekonomi Kerakyatan

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pilar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2014 PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 15,95 juta, masih jauh lebih rendah dibanding PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp. 27,61 juta, dan PDB per kapita Nasional sebesar Rp. 41, 81 juta

Dalam struktur PDRB Kabupaten Purbalingga, Sektor Pertanian masih memberi kontribusi terbesar yaitu sebesar 30,00 persen disusul Sektor Industri Pengolahan (23,50 persen), serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (14,21 persen). Meskipun angka PDRB per kapita relatif kecil tetapi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga dari tahun ke tahun cukup baik yaitu rata-rata 5,7 persen per tahun dalam lima tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan Sektor Pertanian cenderung

mengalami penurunan (lebih rendah dibanding pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dan Jasa). Menurunnya pertumbuhan Sektor Pertanian adalah wajar dan menunjukkan dinamika perekonomian yang positif. Dengan terbatasnya ketersediaan lahan pertanian, maka meskipun terus dilakukan upaya peningkatan produktivitas melalui intensifikasi pertanian, pada saatnya akan sampai pada titik maksimal sehingga produktivitasnya sulit untuk ditingkatkan lagi. Di sisi lain sektor sekunder dan tersier terus bertumbuh dengan lebih cepat seiring dengan perkembangan teknologi dan permintaan produk-produk manufaktur dan jasa.

Meskipun pertumbuhan ekonomi perlu untuk terus lebih didorong tetapi apabila tidak diiringi dengan peningkatan pemerataan pendapatan maka tidak banyak memberi pengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan per kapita masyarakat maka kebijakan yang perlu diambil adalah pengembangan serta peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor ekonomi rakyat seperti pertanian dalam arti luas, perdagangan, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), industri kecil dan industri rumah tangga, serta koperasi. Dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan mengendalikan pencemaran lingkungan hidup, pengembangan investasi harus diarahkan pada pengembangan industri padat karya dan ramah lingkungan. Pada tahun 2014 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Purbalingga sebesar 5,13 persen, lebih rendah dibanding TPT tahun 2013, yaitu sebesar 5,72 persen. Tingkat pemerataan pendapatan masyarakat di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 berada pada tingkat ketimpangan sedang dengan angka Indeks Gini sebesar 0,32.

Salah satu aktivitas ekonomi yang dipandang memberi efek *multiplier* yang luas dan dapat menjadi *prime mover* perekonomian daerah adalah pariwisata. Berkembangnya kepariwisataan akan dapat mengungkit pertumbuhan berbagai sektor ekonomi seperti sektor perhotelan dan restoran, sektor angkutan, sektor perdagangan, sektor industri, sektor pertanian, dan sebagainya termasuk sektor-sektor informal. Besarnya potensi kepariwisataan Kabupaten Purbalingga terutama potensi alam yang tersebar

di seluruh wilayah perlu untuk didayagunakan secara optimal untuk pengembangan kepariwisataan baik melalui pengembangan obyek-obyek wisata baru oleh pemerintah kabupaten maupun melalui pengembangan desa wisata.

Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, prasarana irigasi, prasarana perkotaan, prasarana permukiman, serta prasarana pelayanan sosial dan ekonomi dengan kapasitas dan kualitas yang memadai mutlak dibutuhkan untuk menunjang kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan infrastruktur secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan sangat dibutuhkan untuk kelancaran distribusi barang dan jasa. Kondisi jalan dan jembatan yang tidak memadai akan menyebabkan terhambatnya angkutan barang dan orang sehingga akan menghambat aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Sampai dengan saat ini, meskipun seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga telah dapat diakses melalui angkutan kendaraan bermotor roda empat, tetapi masih perlu peningkatan kapasitas jalan untuk meningkatkan akses ke beberapa wilayah tertentu. Di samping itu, untuk meningkatkan efisiensi transportasi, juga perlu dilakukan pembangunan beberapa jalan dan jembatan baru untuk menghubungkan beberapa wilayah tertentu agar diperoleh jarak tempuh yang lebih pendek. Untuk meningkatkan umur ekonomi jalan juga diperlukan pembuatan saluran drainase dan talud pengaman jalan pada titik-titik tertentu di seluruh wilayah.

Posisi geografis wilayah Kabupaten Purbalingga yang jauh dari dua jalur utama lalu lintas di Pulau Jawa baik jalur utara maupun jalur selatan dengan akses jalan yang relatif sempit dan naik-turun serta berkelok menyebabkan akses angkutan barang dan jasa dari dan menuju wilayah Kabupaten Purbalingga menjadi kurang efisien. Pada era globalisasi di mana segala aktivitas ekonomi menuntut untuk diselenggarakan secara cepat dan

tepat waktu, maka kendala akses wilayah menjadi hambatan bagi pertumbuhan wilayah. Permasalahan ini menyebabkan wilayah kabupaten Purbalingga dan wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan pada umumnya relatif tertinggal dibanding dengan wilayah-wilayah lain. Untuk mendorong pertumbuhan wilayah Kabupaten Purbalingga dan wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan secara umum agar tidak tertinggal dibanding dengan wilayah lain, dibutuhkan adanya moda transportasi cepat yaitu transportasi udara. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Purbalingga akan terus berupaya dan berpartisipasi aktif untuk melakukan koordinasi dan memberikan dukungan bersama-sama dengan daerah lain di wilayah Jawa Tengah bagian Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Perhubungan, dan TNI Angkatan Udara untuk terwujudnya pengembangan Pangkalan TNI Angkatan Udara Wirasaba menjadi Bandar Udara.

Pembangunan serta peningkatan kapasitas dan kualitas bendung dan saluran irigasi juga masih perlu untuk dilaksanakan guna meningkatkan kelancaran penyediaan air bagi kepentingan budidaya pertanian dalam arti luas. Ketersediaan air sangat vital bagi budidaya pertanian sehingga produksi pertanian tidak mungkin dapat ditingkatkan atau setidaknya dipertahankan apabila tidak tersedia jaringan irigasi yang mampu mengalirkan air pada seluruh lahan pertanian.

Sementara itu, untuk meningkatkan kenyamanan, ketertiban, dan keindahan serta meningkatkan kelancaran aktivitas sosial ekonomi masyarakat di perkotaan diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana perkotaan serta penataan kawasan perkotaan. Dengan terwujudnya kawasan perkotaan yang tertib, indah, nyaman, dan aman, dengan sendirinya juga akan menciptakan daya tarik wilayah bagi kunjungan pariwisata maupun peningkatan daya tarik investasi.

Pengelolaan persampahan merupakan permasalahan penting yang selama ini belum mampu ditangani secara optimal. Saat ini pelayanan persampahan baru mencapai 10 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga. Jumlah potensi timbulan sampah jika dihitung berdasarkan

jumlah penduduk mencapai 1.942,6 m³ per hari atau 58.278 m³ per bulan atau melebihi volume candi Borobudur (55.000 m³). Besarnya timbulan sampah yang tidak tertangani di samping akan mengganggu keindahan dan kenyamanan juga akan memberi dampak buruk terhadap lingkungan hidup seperti pencemaran air, tanah, udara serta gangguan kesehatan dan estetika. Keterbatasan kapasitas penanganan sampah di samping karena keterbatasan kapasitas armada, tempat penampungan sementara dan jumlah tenaga kebersihan yang ada juga karena terbatasnya daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ada pada saat ini. Berdasar hasil kajian, kapasitas sisa lahan TPA Banjaran pada tahun 2016 tinggal 31.855 m³, tahun 2017 tinggal 17.422 m³, dan tahun 2018 sampai bulan Pebruari tinggal 2.989 m³, sehingga pada tahun 2018 harus dipindah ke lokasi lain atau dilakukan treatment khusus untuk meningkatkan kapasitas dan/atau merubah manajemen pengelolaan sampah sehingga umur ekonomi TPA dapat diperpanjang. Pemindahan TPA ke lokasi lain dihadapkan pada kesulitan menentukan lokasi baru yang memenuhi syarat teknis serta adanya kendala akses angkutan sampah (jarak tempuh dan kapasitas jalan yang akan dilalui) dan efisiensi dalam operasionalisasinya. Di samping itu, pemindahan TPA juga harus memperhatikan aspek sosiologis, ekologis dan ekonomis agar permasalahan yang terjadi pada TPA yang lama tidak terulang kembali. Hal lain yang penting untuk dilakukan dalam rangka peningkatan efektivitas pengelolaan persampahan adalah terkait sistem pengelolaan dan kelembagaan pengelola. Untuk mengurangi volume sampah yang masuk TPA, perlu implementasi konsep 3 R (reuse, reduce, recycle) mulai dari hulu (tingkat rumah tangga), tingkat kelompok masyarakat, sampai dengan pengelolaan akhir di TPA. Selama ini pengelolaan sampah di TPA dilaksanakan dengan sistem open dumping yang kemudian pada beberapa tahun terakhir dilaksanakan dengan sistem *controlled landfill* (dan itupun belum dilaksanakan secara konsisten). Kelembagaan pengelolaan sampah yang selama ini dilaksanakan oleh Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum perlu ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT). Apabila permasalahan persampahan tidak segera

ditangani secara sistematis, maka dalam jangka panjang akan menjadi permasalahan yang sangat besar dan semakin sulit untuk dicarikan solusi pemecahannya.

Wawasan Kebangsaan dan Kehidupan Beragama

Salah satu permasalahan penting pembangunan pada saat ini adalah adanya kecenderungan menurunnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Kebanggaan terhadap jatidiri bangsa semakin terkikis oleh nilai-nilai budaya asing yang dianggap lebih superior. Identitas nasional meluntur akibat cepatnya penyerapan budaya global, sementara nilai-nilai positif budaya bangsa yang lebih relevan bagi pembangunan karakter bangsa justru diabaikan. Berkembangnya budaya materialisme, konsumerisme dan hedonisme menjadi salah satu penyebab menurunnya semangat patriotisme. Berkembangnya semangat materialisme dan hedonisme juga menyebabkan berkembangnya mentalitas menerabas dan kurangnya penghargaan terhadap kerja keras, inovasi, dan pencapaian prestasi yang pada tahap berikutnya berdampak terhadap meningkatnya tindak kekerasan, premanisme dan kriminalitas. Kesemarakkan kehidupan beragama yang nampak pada saat ini ternyata belum sejalan dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama terbukti dengan banyaknya perilaku asusila, pornografi dan pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, meningkatnya kriminalitas serta praktik-praktik lain yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Disisi lain kecenderungan meningkatnya radikalisme dalam pemahaman agama juga menjadi ancaman tersendiri bagi tegaknya integritas nasional. Sementara itu kecenderungan berkembangnya sektarianisme agama dan fanatisme golongan yang berlebihan menjadi ancaman tersendiri bagi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Oleh karena itu pengembangan wawasan kebangsaan serta penanaman nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme perlu terus ditingkatkan pada saat ini dan yang akan datang. Demikian juga perlu dilakukan upaya pengembangan dan penanaman nilai-nilai moral yang positif baik yang berpijak pada nilai agama maupun nilai

budaya bangsa. Internalisasi nilai-nilai moral yang positif dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal, non formal, informal maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan beragama perlu terus didorong guna meningkatkan pengamalan dan penghayatan nilai-nilai agama bersamaan dengan upaya mewujudkan kerukunan inter dan antar umat beragama.

Lingkungan Hidup

Eksplorasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup akibat aktivitas manusia yang tidak berwawasan lingkungan telah menimbulkan dampak negatif yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan manusia seperti pencemaran air dan udara, meningkatnya angka kesakitan penyakit degeneratif, meningkatnya kerusakan lahan, menurunnya populasi ikan di perairan umum, hilangnya populasi berbagai spesies flora dan fauna, terjadinya banjir dan tanah longsor, serta meningkatnya pemanasan global yang semakin terasa. Peningkatan pemanasan global dipicu meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) yang bersumber dari kegiatan manusia dalam menggunakan energi fosil, pengelolaan lahan dan pertanian, serta pengelolaan limbah. Pemanasan global memicu terjadinya perubahan iklim yang berdampak pada peningkatan intensitas hujan dan kemarau serta terjadi pergeseran musim. Dampak perubahan iklim berakibat terjadinya gagal panen pada sektor pertanian dan meningkatnya intensitas bencana seperti banjir, angin ribut, dan kemarau berkepanjangan. Diperlukan upaya mengurangi perubahan iklim tersebut melalui aksi-aksi mitigasi (pengurangan) emisi gas rumah kaca di sektor transportasi, peningkatan tutupan lahan, pertanian rendah emisi, dan pengelolaan limbah.

Sementara itu pesatnya peningkatan jumlah penduduk bersamaan dengan menurunnya daya dukung lingkungan menyebabkan semakin cepatnya penurunan kualitas lingkungan hidup. Peningkatan populasi manusia bersamaan dengan peningkatan aktivitasnya serta peningkatan pemanfaatan bahan-bahan hasil sintesa kimiawi mengakibatkan meningkatnya dengan pesat produksi bahan pencemar lingkungan hidup (polutan) seperti sampah plastik, asap kendaraan bermotor, limbah kimia dan sebagainya. Di sisi lain

peningkatan populasi penduduk menyebabkan peningkatan desakan terhadap sumberdaya lahan yang ditandai dengan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian maupun lahan yang memiliki fungsi lindung. Memburuknya kondisi hutan lindung dan kawasan lindung lainnya seperti kawasan tangkapan air, kawasan sekitar mata air, sempadan sungai, lahan dengan kelerengan tinggi telah mengakibatkan berbagai permasalahan dan ancaman bagi kehidupan manusia seperti mengeringnya beberapa mata air akibat menurunnya keseimbangan tata air, terjadinya tanah longsor, terjadinya banjir yang besar ketika musim penghujan dan kekeringan yang ekstrim ketika musim kemarau dan sebagainya.

Untuk mencegah terjadinya kerusakan fungsi lingkungan hidup yang lebih cepat perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan fungsi lingkungan hidup serta rehabilitasi terhadap lingkungan hidup yang telah mengalami kerusakan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.

Tata kelola Pemerintahan

Visi Pemerintah Daerah akan dapat dicapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan baik sesuai prinsip-prinsip *good governance* antara lain efektif, efisien, transparan, akuntabel dan memiliki visi strategis (*strategic vision*). Luasnya cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dipikul pemerintah daerah dengan kemampuan keuangan yang terbatas mengharuskan pemerintah daerah untuk mampu mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus menghasilkan output secara optimal agar seluruh elemen organisasi pemerintah daerah dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara efektif dengan mendayagunakan sumberdaya secara efisien. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga harus dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengetahui serta dapat memberikan masukan dan evaluasi dalam

rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tata kelola keuangan dan aset Kabupaten Purbalingga mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Diharapkan pada masa yang akan datang kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah akan semakin meningkat sehingga dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara itu sesuai hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) untuk menilai Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD) yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam tiga tahun berturut-turut masuk dalam peringkat 10 besar nasional, dengan mendapat skor dengan kategori sangat tinggi sehingga mendapatkan tropi Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha dari kementerian Dalam Negeri. Sedangkan penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan setiap tahun oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), pada tahun 2015 nilai SAKIP Kabupaten Purbalingga baru berada pada kategori CC (cukup baik) dengan skor 50,5.

Aktivitas seluruh elemen pemerintah daerah harus mengarah kepada visi yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Elemen organisasi dan struktur jabatan yang bersifat koordinatif harus berperan optimal dalam mengarahkan dan menggerakkan lini organisasi dalam rumpun koordinasinya agar masing-masing dapat berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan visi daerah. Untuk itu seluruh elemen pemerintah daerah harus memahami visi daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap elemen organisasi pemerintah daerah harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sehingga secara efektif akan mendukung pelaksanaan program-program pembangunan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dan tujuan

pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan maka pada gilirannya akan dapat diwujudkan visi pemerintah daerah.

Agar setiap elemen pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat melaksanakan program-program dan kegiatan pembangunan yang secara efektif mampu mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah, harus didukung dengan aparatur pemerintah daerah yang profesional. Profesionalitas aparatur pemerintah daerah mensyaratkan adanya integritas, kapasitas dan kompetensi. Oleh karena itu sistem karir aparatur harus benar-benar dilaksanakan berdasarkan *meryt system*. Organisasi perangkat daerah harus disusun dengan struktur yang ramping tetapi mampu melaksanakan seluruh fungsi secara optimal dengan sistem tata kelola yang efektif.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2016-2021

Visi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 merupakan Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kabupaten Purbalingga. Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 adalah **"PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"**.

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi

keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah pula disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai dalam RPJMD 2016-2021, dapat dirumuskan sebagai berikut :

A. Misi 1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat

Untuk mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efisien dan efektif, dibutuhkan dukungan aparatur pemerintahan dengan jumlah yang cukup dan dengan kompetensi yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas, dan sikap dan perilaku aparatur yang baik, serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Di sisi lain, meningkatnya kesadaran politik rakyat sejalan dengan adanya proses demokratisasi, mengakibatkan semakin menguatnya tuntutan masyarakat untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Di samping

itu, adanya kebijakan pemerintah berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah : Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, dengan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah.

Perangkat daerah yang terkait dengan pencapaian Misi ke-1 meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, serta unsur penunjang urusan pemerintahan Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan, dan dinas-dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Statistik, Kearsipan, dan Urusan Persandian.

B. Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.

Salah satu prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah terwujudnya lingkungan sosial yang tertib, aman, damai dan tenteram. Kondisi ini harus diciptakan agar berbagai upaya pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dijalankan. Adanya keragaman agama dan budaya, perbedaan kondisi sosial-ekonomi, masalah kemiskinan dan pengangguran, dan berbagai permasalahan sosial lain seperti merebaknya miras dan narkoba, prostitusi, perjudian, dan premanisme, serta meningkatnya kejadian kriminalitas, merupakan faktor-faktor potensial untuk timbulnya gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Selain itu, meningkatnya kesadaran politik masyarakat harus diimbangi dengan upaya-upaya untuk mengembangkan etika politik sehingga dapat diwujudkan kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat. Pembangunan karakter dan paham kebangsaan mutlak diperlukan guna terwujudnya rasa nasionalisme yang tinggi.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-2 adalah : Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban dan Rasa Aman dalam Masyarakat, dengan **Sasaran** :

1. Meningkatnya paham dan wawasan kebangsaan.
2. Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati.
3. Menurunnya resiko bencana.

Perangkat daerah yang terkait dengan pencapaian Misi ke-2 meliputi dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

C. Misi 3 : Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak

Salah satu indikator keberhasilan penanggulangan kemiskinan adalah tercukupinya kebutuhan pokok manusia khususnya pangan dan papan bagi seluruh masyarakat. Tercukupinya pangan dan papan secara layak juga merupakan landasan yang harus di bangun secara kokoh agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih cepat, lebih adil dan lebih merata. Pemerintah daerah memiliki kewajiban yang besar dalam upaya menurunkan kasus kerawanan pangan dan gizi buruk serta pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan sehat, utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3 adalah :

1. Meningkatnya Status Ketahanan Pangan, dengan Sasaran meningkatnya Status Pangan Masyarakat.
2. Meningkatnya Ketersediaan dan Kepemilikan Rumah Layak Huni, dengan Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat.

Perangkat daerah yang terkait dengan pencapaian Misi ke-3 meliputi dinas yang melaksanakan Urusan Pangan dan sub urusan Perumahan.

D. Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

Kualitas manusia dan kualitas kehidupan manusia merupakan tujuan yang sebenarnya dari upaya pembangunan. Kualitas manusia dapat diukur dari aspek-aspek yang bersifat lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Kualitas manusia yang dicita-citakan di samping diukur dari beberapa hal tersebut, juga diukur dari kepribadian/jatidiri dan kecintaan terhadap kebudayaan dan tanah air serta tertanamnya semangat nasionalisme. Sedangkan kualitas kehidupan manusia diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar serta tersedianya secara memadai berbagai prasarana dan sarana guna terwujudnya kehidupan yang berkualitas.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-4 adalah Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan Sasaran :

1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
3. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.
4. Meningkatnya kesejahteraan keluarga.
5. Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS, korban bencana dan kelompok masyarakat rentan lainnya.
6. Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Meningkatnya budaya gemar membaca.
8. Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian Benda Cagar Budaya (BCG) serta Prestasi Seni.
9. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga.

Perangkat daerah yang terkait dengan pencapaian Misi ke-4 meliputi dinas yang melaksanakan Urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, serta Uruan Perpustakaan.

E. Misi ke-5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja

Pembangunan ekonomi menduduki posisi yang sangat strategis karena keberhasilan pembangunan ekonomi akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat sebagai hasil dari pembangunan ekonomi akan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses berbagai sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan semakin meningkatkan aktifitasnya dalam bidang ekonomi.

Upaya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan pendapatan per kapita riil seluruh masyarakat apabila tidak terdistribusi secara merata.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 5 adalah Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan Sasaran :

1. Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.
2. Meningkatnya daya saing pariwisata.
3. Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri.
4. Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial.
5. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Mikro.
6. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sektor Pertanian.
7. Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sub Sektor Perikanan.

8. Terdistribusinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata dan terjangkau.
9. Meningkatkan pelayanan transmigrasi.

Perangkat daerah yang terkait dengan pencapaian Misi ke-5 meliputi perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Tenaga kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Mikro, Penanaman Modal, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan Urusan Transmigrasi.

F. Misi ke-6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial dan ekonomi mutlak memerlukan dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai. Implementasi misi ini diwujudkan melalui pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi berbagai prasarana dan sarana yang meliputi prasarana jalan, jembatan, irigasi dan pengairan, perumahan dan permukiman, prasarana persampahan, pemerintahan, perhubungan, serta berbagai prasarana wilayah lainnya.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 6 adalah :

1. Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman, Produktif dan Berkelanjutan, dengan Sasaran :
 - a. Meningkatnya Akses dan Konektivitas Wilayah.
 - b. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sumberdaya Air yang Memadai.
 - c. Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Efektif.
 - d. Meningkatnya Bangunan Gedung Laik Fungsi.

- e. Meningkatnya Akses Aman Air Minum yang Berkelanjutan.
 - f. Meningkatnya Akses Air Limbah Domestik / Rumah Tangga.
 - g. Meningkatnya Akses Pelayanan Persampahan.
 - h. Meningkatnya Layanan Sistem Drainase Perkotaan.
 - i. Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Kualitas jasa konstruksi.
2. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman, dengan Sasaran Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman.
 3. Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Orang Dan Barang, dengan sasaran Meningkatnya Manajemen, Kapasitas dan Kualitas Angkutan Jalan dan Udara.
 4. Meningkatkan Kualitas dan Keterbukaan Informasi Publik, dengan sasaran Meningkatnya Implementasi e-Government dan Keterbukaan Informasi Publik.
 5. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Desa, dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa.
 6. Terwujudnya Tertib Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah, dengan sasaran Meningkatnya Kepastian Status dan Pemanfaatan Tanah.

Perangkat daerah yang terkait dengan pencapaian Misi ke-6 meliputi perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Urusan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pertanahan, serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

G. Misi ke-7 : Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Eksplorasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup akibat aktifitas manusia yang tidak berwawasan lingkungan telah menimbulkan dampak negatif yang langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti pencemaran air dan udara, timbulnya berbagai penyakit, merosotnya hasil tangkapan ikan sungai, hilangnya populasi berbagai spesies flora dan fauna khas/langka, munculnya lahan rusak termasuk deforestasi, terjadinya banjir dan tanah

longsor, sulitnya mendapatkan air pada musim kemarau, berpindahnya aliran sungai, dan sebagainya.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai salah satu sumberdaya yang potensial juga belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun mendatang. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Untuk mengantisipasi berbagai hal tersebut di atas dibutuhkan kebijakan besar yang bersifat kolaboratif dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 7 adalah Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati, dengan sasaran Terkendalinya Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Perangkat daerah yang terkait dengan pencapaian Misi ke-7 meliputi perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 5.1**Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga pada Misi 1 :**

Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih Dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima Kepada Masyarakat

Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM)	Angka	77,6	78	78,5	79	79,5	80	80,5
		Opini audit keuangan BPK		WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel 5.2**Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga pada Misi 2 :**

Mendorong kehidupan masyarakat yang religius yang beriman dan bertakwa ke hadirat Allah SWT serta mengembangkan paham Kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan

Tujuan : Terwujudnya ketentraman, ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KINERJA EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya ketaatan terhadap Perda dan Perbup	Cakupan pelanggaran Perda yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2.	Menurunnya resiko bencana	Cakupan pelayanan korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen	31	35	40	45	50	55	60
3.	Meningkatnya paham dan wawasan kebangsaan	Partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persen	60	-	-	70	70	70	-

Tabel 5.3

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga pada Misi 3 :
 Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan Dan Papan Secara Layak

Tujuan 1 : Meningkatnya ketahanan pangan

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KINERJA EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya status pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	84	87	87	88	89	90	91
		Ketersediaan Pangan Utama	Kg/kap/th	163	165	166	168	170	173	175

Tujuan 2 : Meningkatnya ketersediaan dan kepemilikan rumah layak huni

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KINERJA EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak Huni	Cakupan rumah layak huni	persen	88,6	89,4	90,5	91,3	92,1	93	93,9
		Cakupan kepemilikan rumah	Persen	80,12	81,62	83,12	84,62	86,12	87,62	89,12

Tabel 5.4

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Misi 4 :
Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Utamanya Melalui Peningkatan Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat

Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KINERJA EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Harapan lama sekolah	Angka	11,78	11,9	12,1	12,3	12,5	12,7	12,9
		Rata2 lama sekolah	Tahun	6,85	6,96	7,15	7,33	7,61	7,76	7,92
		APK SD/Sederajat	Angka	109	109	109	109	110	110	110
		APK SMP/Sederajat	Angka	100	100	100	100	100	100	100
		APM SD/Sederajat	Angka	91	92	91	91	91	91	94
		APM SMP/ Sederajat	Angka	69	70	70	70	70	70	73
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,8	72,9	73	73,1	73,2	73,3	73,4
		Angka Kematian Ibu	Per 100 ribu KH	136	101	88	74	61	54	47
		Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	10	9	8	7	6	5	4
3.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	1,06	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
		Cakupan peserta KB aktif	Persen	88	90	90	90	92	93	95
		Cakupan PUS tak terlayani	Persen	51,99	11,75	11,5	11	10,5	10	9

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KINERJA EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Cakupan Keluarga Sejahtera	Persen	75,1	76	77	78	79	80	81
5.	Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS, korban bencana dan kelompok masyarakat rentan lain	Cakupan PMKS yang terlayani	Persen	24	30	40	50	60	70	80
6.	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Angka	63,43 *	> 64	> 64	> 65	> 65	> 66	> 66
		Cakupan kekerasan anak yg tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7.	Meningkatnya budaya gemar membaca	Cakupan perpustakaan desa	Persen	23	28	35	43	50	65	84
8.	Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian Benda Cagar Budaya serta Prestasi Seni	Jumlah pementasan seni budaya daerah	Kali	65	65	68	70	72	74	76
9.	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Jumlah prestasi Olahraga Tingkat regional dan Nasional	Kali	2	3	5	6	8	10	12

Tabel 5.5**Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Misi 5 :**

Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja

Tujuan 1 : Meningkatnya Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KINERJA EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat	Pertambahan nilai investasi baru	Juta rupiah	230.000	270.000	320.000	470.000	570.000	690.000	770.000
2.	Meningkatnya daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	orang	1.579	1.850	2.179	2.529	2.779	2.890	2.979
3.	Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri	Kontribusi PDRB Sektor Industri	Triliun rupiah	3,9	4,2	4,4	4,7	5,0	5,4	5,9
4.	Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,13	< 5	< 5	< 5	< 5	< 4	< 4
		Rasio Tenaga Kerja dengan upah sesuai UMK	Persen	79	80	85	90	92	93	95
5.	Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi, dan Usaha Kecil dan Mikro	Jumlah koperasi sehat	unit	105	110	115	120	125	130	135
		Jml usaha mikro bersertifikat / ijin	unit	268	293	473	653	833	1.013	1.193

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KINERJA EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sektor Pertanian	PDRB Sektor Pertanian	Triliun rupiah	4,9	5,2	5,5	5,9	6,2	6,6	6,9
		Produksi padi	Ton	249.691	252.189	254.711	257.258	259.830	262.429	269.053
		Produksi jagung	Ton	39.339	39.732	40.130	40.531	40.936	41.346	41.759
		Produksi kedele	Ton	221	223	225	228	230	232	235
		Produksi daging	Ton	14.346	14.490	14.634	14.781	14.929	15.078	15.229
7.	Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sub Sektor Perikanan	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	Miliar rupiah	282	295	308	320	333	347	360
		Produksi Ikan Konsumsi	ton	4.872	4.969	5.067	5.164	5.262	5.350	5.400
8.	Terdistribusinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata dan terjangkau	Jumlah pasar ber-SNI	unit	0	0	1	3	3	3	3
9	Meningkatnya Pelayanan Transmigrasi	Persentase calon transmigran dilatih	persen		100	100	100	100	100	100

Tabel 5.6**Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Misi 6 :**

Mewujudkan Kawasan Perkotaan Dan Perdesaan Yang Sehat Dan Menarik Untuk Melaksanakan Kegiatan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Melalui Gerakan Masyarakat, Yang Didukung Dengan Penyediaan Infrastruktur / Sarana Prasarana Wilayah Yang Memadai

Tujuan 1 : Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Handal dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang Aman Produktif dan Berkelanjutan

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KINERJA EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya akses dan konektivitas wilayah	Persentase jalan dalam kondisi baik	Persen	74,97	75,77	77,05	78,32	79,60	80,87	82,15
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persen	93,04	93,5	93,75	94	94,25	94,5	94,75
		Persentase lajur jalan minimal 5,5 M	Persen	7,05	10,04	12,75	15,94	19,13	22,31	25,5
2.	Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Sumberdaya Air yang memadai	Persentase bangunan pengairan dalam kondisi baik	Persen	38,56	40,8	42,3	43,8	45,2	46,7	48,2
		Ketersediaan air baku irigasi	Persen	87,5	88,5	89	89,5	90	90,5	91
3.	Meningkatnya Akses Aman Air Minum yang Berkelanjutan	Cakupan rumah tangga mengakses air bersih	Persen	78,55	83,06	88,57	94,25	100	100	100
4.	Meningkatnya akses air limbah domestik / RT	Cakupan rumah Tangga terlayani sistem air limbah	Persen	70	77,5	85	92,5	100	100	100

5.	Meningkatnya akses pelayanan persampahan	Rasio timbulan sampah terlayani	Persen	59,6	59,7	59,8	58,9	59	60	61
6.	Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yg efektif	Persentase ruang terbuka hijau publik	Persen	17,89	18,1	18,31	18,51	18,71	18,91	19,11

Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KINERJA EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Cakupan rumah layak huni	Persen	88,6	89,4	90,5	91,3	92,1	93	93,9
		Cakupan kepemilikan rumah	Persen	80,12	81,62	83,12	84,62	86,12	87,62	89,12

Tujuan 3 : Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Orang dan Barang

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KINERJA EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Angkutan Jalan dan Udara	Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	kasus	506	503	467	427	420	360	301

Tujuan 4 : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KINERJA EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya implementasi e government dan keterbukaan informasi publik	SKPD yang menerapkan SIM dan memiliki website aktif	unit	25	28	31	34	37	40	43

Tujuan 5 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Desa

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KINERJA EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan kualitas pemerintahan desa	Cakupan Desa dgn BUM Desa sehat	Persen	52	60	68	76	84	92	100

Tujuan 6 : Terwujudnya Tetib Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KINERJA EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya kapasitas status dan pemanfaatan tanah	Cakupan tanah pemerintah daerah bersertifikat	persen	60	65	70	80	90	95	100

Tabel 5.7
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga Misi 7 :
 Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Tujuan 1 : Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KINERJA EKSISTING (2015)	TARGET KINERJA SASARAN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	47,79	63,5	64	64,5	65,5	66,5	67

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021 pada prinsipnya merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan daerah melalui pentahapan pembangunan dan serangkaian kebijakan dan program dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan jangka menengah dan sasaran-sasaran jangka pendek yang telah ditetapkan. Strategi akan dilengkapi dengan arah kebijakan, yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar mengarah pada tujuan dan sasaran pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maka RPJMD disusun dengan berpedoman dan atau memperhatikan berbagai dokumen perencanaan antara lain sebagai berikut :

A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025

Sesuai dengan Visi Kabupaten Purbalingga, secara garis besar tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan Kabupaten Purbalingga yang mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlak mulia, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai ukuran terwujudnya Kabupaten Purbalingga yang mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlak mulia, pembangunan Kabupaten Purbalingga dalam kurun

waktu 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik, yang ditandai oleh:

- 1.1. Terwujudnya aparaturnegara yang profesional, bersih dan berwibawa agar dapat menjadi penggerak pembangunan daerah dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- 1.2. Terwujudnya kelembagaan pemerintah daerah yang mampu berfungsi secara efektif dan efisien serta senantiasa mampu menjawab tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan eksternal.
- 1.3. Terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, memiliki strategi yang jelas, mampu memberikan arahan dan supervisi dalam penyelenggaraan admisnitrase publik dan penyelenggaraan pembangunan; responsif terhadap berbagai permasalahan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat; mampu bersikap dan bertindak profesional; serta mampu menggerakkan partisipasi rakyat, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 1.4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sumberdaya pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Purbalingga, yang ditandai oleh:

- 2.1. Terpenuhinya kebutuhan hidup pokok berupa pangan, papan, dan sandang bagi seluruh masyarakat secara memadai baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya, serta tersedianya berbagai fasilitas kebutuhan penunjang seperti air bersih; prasarana mandi, cuci dan kakus (MCK); dan prasarana permukiman lainnya. Untuk itu, ketahanan dan kemandirian

pangan harus mampu dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai, serta tersedianya instrumen jaminan pangan sampai ke tingkat rumah tangga.

- 2.2. Meningkatnya kualitas manusia yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan, tingkat pendidikan, dan daya beli masyarakat, serta terwujudnya kesetaraan gender yang secara umum diukur dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
- 2.3. Meningkatnya pendapatan per kapita riil masyarakat yang semakin merata untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup secara memadai dengan tingkat pengangguran yang rendah dan penduduk miskin tidak lebih dari 5 (lima) persen melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, dan berkesinambungan.
- 2.4. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif Kabupaten Purbalingga di mana sektor pertanian dan pariwisata menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien dan menghasilkan produk berkualitas dengan nilai tambah dan daya saing yang tinggi; sementara peran sektor industri dan jasa terus meningkat dengan menghasilkan produk yang lebih berkualitas serta memiliki nilai tambah yang tinggi dan berdaya saing.
- 2.5. Meningkatnya investasi swasta yang mampu menyerap tenaga kerja dan ramah lingkungan baik investasi dalam negeri maupun investasi asing (*foreign direct investment*) dalam rangka menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah yang memadai sejalan dengan bertambahnya angkatan kerja serta untuk menanggulangi kemiskinan.
- 2.6. Tersedianya infrastruktur yang memadai dan terintegrasi satu sama lain sehingga mampu mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang meliputi prasarana perhubungan, irigasi, dan air bersih, terpenuhinya pasokan energi yang cukup untuk

memenuhi kebutuhan rumah tangga dan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi, serta terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan modern untuk mewujudkan masyarakat informasi.

- 2.7. Terwujudnya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk mewujudkan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah antara lain melalui penyediaan infrastruktur serta berbagai prasarana dan sarana sosial dan ekonomi untuk mendorong aksesibilitas dan perkembangan aktivitas sosial dan ekonomi di seluruh wilayah sehingga tidak muncul disparitas kesejahteraan dan kemajuan antar wilayah terutama antara wilayah perdesaan dan perkotaan.

3. Terwujudnya Purbalingga yang Aman, Damai dan Demokratis Berlandaskan Hukum, yang ditandai oleh :

- 3.1. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. di segala bidang, menurunnya angka pelanggaran hukum, rendahnya tindak kekerasan dan konflik dalam kehidupan masyarakat, meningkatnya kesadaran sosial masyarakat, serta meningkatnya pemahaman dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.
- 3.2. Tersusunnya produk-produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dinamika kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat serta meningkatkan akselerasi pembangunan.
- 3.3. Meningkatnya semangat dan wawasan kebangsaan.
- 3.4. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral,

serta terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri.

- 3.5. Terwujudnya kehidupan politik yang sehat, demokratis, dan dinamis, meningkatnya partisipasi politik rakyat, serta meningkatnya peran dan fungsi lembaga politik sehingga akan semakin mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 3.6. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

4. Terwujudnya Masyarakat Purbalingga yang Bermoral, Beretika, Berbudaya dan Memiliki Jatidiri, yang ditandai oleh :

- 4.1. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan meningkatnya kualitas intelektual, berkembangnya norma dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa dan nilai-nilai agama, berkembangnya budaya baca tulis, terwujudnya kesetaraan gender, meningkatnya toleransi dan kesetiakawanan sosial, serta berkembangnya semangat gotongroyong sehingga akan dapat terwujud harmoni dan dinamika dalam kehidupan sosial.
- 4.2. Semakin kokohnya jatidiri dan kepribadian masyarakat Purbalingga yang tercermin dengan berkembang dan meningkatnya apresiasi terhadap budaya yang sesuai dengan nilai kepribadian bangsa.

5. Terwujudnya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, ditandai oleh :

- 5.1. Tetap terjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup serta pulihnya kondisi dan fungsi lingkungan hidup yang mengalami degradasi akibat eksploitasi sumberdaya alam dan

dampak aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat melalui perbaikan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.

5.2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumberdaya alam.

5.3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. **Visi tersebut adalah "Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"**, yang dilakukan melalui **7 misi pembangunan** yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut **"Nawa Cita"**, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;

3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi

C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Visi RPJM Provinsi Jawa Tengah adalah **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI** "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*". Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*". Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

a) Sejahtera

Jawa Tengah Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan *tepo seliro*; serta tersedia prasarana dan sarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan

yang berkembang di masyarakat. Untuk itu prasarana dan sarana, supra dan infrastruktur dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat baik secara fisik maupun non-fisik serta sosial dan politik harus secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

b) Berdikari

Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengeksplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa Tengah, Nasional, maupun Internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat dalam kemitraan dengan para pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama yang saling menghormati.

Untuk mewujudkan Jawa Tengah Berdikari, tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu:

- 1) Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jawa Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal;
- 2) Mengeksplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri;
- 3) Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri, secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek maupun panjang.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi yaitu sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*"
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi dan agar lebih terarah, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang menurut misi berdasarkan pendekatan urusan/bidang sebagai berikut :

Misi ke-1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dari Misi ke - 1 adalah terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat, dengan sasaran berupa meningkatnya kapasitas pemerintah daerah.

Strategi yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, dilakukan melalui pengembangan dan pelaksanaan Agenda Intelektual, Agenda Managerial, Agenda Struktural, Agenda Behavioral dan Agenda Sosial, dengan beberapa arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi Kelembagaan Perangkat Daerah;
- 2) Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Aparatur;
- 3) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan;
- 4) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 5) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
- 6) Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
- 7) Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat;
- 8) Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola administrasi kependudukan.
- 9) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana persandian
- 10) Menyediakan data dan informasi pembangunan yang *reliable* dan *up to date*.
- 11) Meningkatkan kapasitas dan kualitas manajemen kearsipan.

Tabel 6.1.

Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi 1

No.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Misi 1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat			
1	Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah	Mengembangkan Agenda Intelektual, Managerial, Struktural, Behavioral dan Agenda Sosial	Optimalisasi Kelembagaan Perangkat Daerah Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Aparatur Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Peningkatan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola administrasi kependudukan Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana persandian Menyediakan data dan informasi pembangunan yang <i>reliable</i> dan <i>up to date</i> . Meningkatkan kapasitas dan kualitas manajemen kearsipan

Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.

Tujuan yang hendak dicapai dari Misi ke - 2 adalah terwujudnya ketentraman, ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat, dengan Sasaran : (1) meningkatnya kesadaran dan ketaatan terhadap peraturan perundangan termasuk peraturan daerah dan peraturan bupati; (2) menurunnya resiko bencana; dan (3) meningkatnya paham dan wawasan kebangsaan.

Strategi yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, adalah melalui :

1. Menyempurnakan sistem penegakan perda dengan arah kebijakan peningkatan kompetensi dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Meningkatkan kompetensi penanganan bencana dan kebakaran, dengan Arah Kebijakan melalui peningkatan kesiapsiagaan bencana dan penambahan pos pemadam kebakaran.
3. Meningkatkan wawasan kebangsaan untuk seluruh komponen masyarakat, dengan Arah Kebijakan melalui Peningkatan fasilitasi kehidupan beragama dan optimalisasi tim terpadu penanganan konflik sosial

Tabel 6.2.

Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi 2

No.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakat yang religius yang beriman dan bertakwa ke hadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan			
1	Meningkatnya ketaatan terhadap Perda dan Perbup	Menyempurnakan Sistem Penegakan Perda dan Perbup	Peningkatan Kompetensi dan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
2.	Menurunnya Indeks Resiko Bencana dan Kebakaran	Meningkatkan Kompetensi Penanganan Bencana dan Kebakaran	Peningkatan kesiapsiagaan bencana dan penambahan pos pemadam kebakaran
3.	Meningkatnya paham kebangsaan	Meningkatkan wawasan kebangsaan untuk seluruh komponen masyarakat	Penumbuhan wawasan kebangsaan dan peningkatan fasilitasi kehidupan beragama

Misi 3 : Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak

Tujuan yang hendak dicapai dari Misi ke - 3 adalah : (1) meningkatnya ketahanan pangan, dengan sasaran meningkatnya status pangan masyarakat; dan (2) meningkatnya ketersediaan dan kepemilikan rumah layak huni, dengan sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.

Strategi yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, adalah dengan :

1. Meningkatkan ketersediaan dan keragaman pangan, dengan arah kebijakan berupa upaya pemenuhan kebutuhan pangan utama masyarakat, khususnya bagi keluarga miskin dan penderita gizi buruk.
2. Rehabilitasi rumah tidak layak huni dan fasilitasi penyediaan perumahan, dengan arah kebijakan berupa peningkatan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin serta fasilitasi pembangunan perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Tabel 6.3.

Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi 3

No.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Misi 3 : Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya Pangan dan Papan secara layak			
1	Meningkatnya status pangan masyarakat	Meningkatkan Ketersediaan dan Keragaman Pangan	Pemenuhan Kebutuhan Pangan Utama Masyarakat
2	Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni	Meningkatkan Fasilitas pembangunan perumahan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni	Peningkatan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Fasilitas pembangunan perumahan swadaya

Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

Tujuan yang hendak dicapai dari Misi ke - 4 adalah Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan Sasaran (1) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat; (2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; (3) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk; (4) Meningkatnya kesejahteraan keluarga; (5) Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS, korban bencana dan kelompok masyarakat rentan lainnya; (6) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (7) Meningkatnya budaya gemar membaca; (8) Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian benda cagar budaya serta prestasi seni; dan (9) Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga.

Strategi yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, adalah dengan :

1. Meningkatkan akses pendidikan utamanya untuk keluarga miskin serta meningkatkan layanan pendidikan, dengan arah kebijakan berupa peningkatan sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta penguatan manajemen penyelenggaraan pendidikan.
2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan utamanya untuk Keluarga miskin serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dengan arah kebijakan berupa peningkatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan penguatan manajemen penyelenggaraan kesehatan.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana, dengan arah kebijakan berupa peningkatan kemitraan dalam pelayanan keluarga berencana dan mengembangkan pusat pelayanan keluarga berencana.
4. Mengembangkan usaha peningkatan keluarga sejahtera, dengan arah kebijakan pembangunan berupa peningkatan pemberdayaan keluarga.
5. Meningkatkan intensitas pelayanan terhadap PMKS, korban bencana dan kelompok masyarakat rentan lainnya, dengan arah kebijakan berupa

upaya peningkatan fasilitasi, pembinaan serta pemberdayaan PMKS dan kelembagaan kesejahteraan sosial.

6. Melaksanakan pengarusutamaan isu gender dan perlindungan anak, dengan arah kebijakan berupa pelaksanaan pembangunan responsif gender dan peduli anak.
7. Meningkatkan jumlah dan kualitas perpustakaan, dengan arah kebijakan berupa peningkatan pembinaan perpustakaan dan pengembangan perpustakaan digital.
8. Meningkatkan intensitas pembinaan dan pementasan kesenian dan kebudayaan, dengan arah kebijakan berupa peningkatan fasilitasi pementasan, pengiriman dan pelestarian seni budaya daerah.
9. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olah raga prestasi, dengan arah kebijakan berupa peningkatan fasilitasi serta pengembangan even kepemudaan dan kompetisi olahraga.

Tabel 6.4.

Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi 4

No.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat			
1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Meningkatkan Akses Pendidikan Utamanya untuk Keluarga Miskin serta meningkatkan layanan pendidikan	Peningkatan Sarpras, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, serta Penguatan Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Akses Pelayanan kesehatan utamanya untuk Keluarga Miskin serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan serta Penguatan Manajemen Penyelenggaraan Kesehatan
3	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	Peningkatan Kemitraan dalam Pelayanan KB dan mengembangkan pusat pelayanan KB
4	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Mengembangkan usaha peningkatan keluarga sejahtera	Peningkatan Pemberdayaan Keluarga
5	Meningkatnya Pelayanan PMKS, Korban Bencana dan kelompok masyarakat rentan lainnya	Meningkatkan intensitas pelayanan terhadap PMKS, Korban Bencana dan kelompok masyarakat rentan lainnya	Peningkatan fasilitasi, pembinaan serta pemberdayaan PMKS dan kelembagaan kesejahteraan sosial
6	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Melaksanakan pengarusutamaan Isu Gender dan Perlindungan Anak	Pelaksanaan Pembangunan Responsif Gender dan Perduli Anak
7	Meningkatnya Budaya Gemar Membaca	Meningkatkan jumlah dan Kualitas Perpustakaan	Peningkatan Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Perpustakaan digital
8	Meningkatnya Apresiasi Budaya Daerah, Pelestarian Benda Cagar Budaya serta Prestasi Seni	Meningkatkan Intensitas Pembinaan dan Pementasan Kesenian dan Kebudayaan	Peningkatan Fasilitasi pementasan, pengiriman dan pelestarian seni budaya daerah

No.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
9	Meningkatnya Prestasi Kepemudaan dan Olah Raga	Meningkatkan Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga Prestasi	Peningkatan Fasilitas serta Pengembangan Even Kepemudaan dan Kompetisi Olahraga

Misi 5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja

Tujuan yang hendak dicapai dari Misi ke - 5 adalah Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Purbalingga, dengan Sasaran sebagai berikut : (1) Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat; (2) Meningkatnya daya saing pariwisata; (3) Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri; (4) Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial; (5) Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi Usaha Kecil dan Mikro; (6) Meningkatnya kemandirian dan daya saing sektor pertanian; (7) Meningkatnya kemandirian dan daya saing sub sektor perikanan; (8) Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata dan terjangkau; dan (9) Meningkatnya pelayanan transmigrasi.

Strategi yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, adalah dengan :

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan arah kebijakan berupa peningkatan promosi serta kepastian dan kemudahan perijinan.
2. Mengembangkan destinasi wisata dan ekonomi kreatif, dengan arah kebijakan berupa pengembangan destinasi, promosi, dan penguatan kelembagaan wisata, serta pengembangan industri pariwisata.
3. Meningkatkan keunggulan kompetitif industri kecil dan menengah, dengan arah kebijakan melalui introduksi teknologi dan pengembangan industri utamanya yang berbahan baku lokal.
4. Meningkatkan penempatan dan perlindungan tenaga kerja, dengan Arah kebijakan : (1) peningkatan ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan (2) pengembangan hubungan industrial yang harmonis.

5. Meningkatkan kualifikasi usaha mikro, dengan arah kebijakan berupa peningkatan manajemen dan jejaring usaha bagi usaha mikro.
6. Fasilitasi pengembangan koperasi, dengan arah kebijakan berupa peningkatan pembinaan, pengembangan dan pengawasan koperasi.
7. Optimalisasi lahan untuk pengembangan komoditas pertanian bernilai tambah tinggi yang sesuai dengan karakteristik agro ekologi wilayah, dengan arah kebijakan berupa : (1) introduksi teknik dan teknologi budi daya pertanian tanaman pangan yang unggul; dan (2) pengembangan komoditas perkebunan dan hortikultura untuk substitusi impor.
8. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil peternakan, dengan arah kebijakan berupa penerapan teknologi budidaya, pakan dan genetik ternak, serta peningkatan daya saing produk peternakan.
9. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan, dengan arah kebijakan berupa penerapan teknologi budidaya, pakan dan genetik ikan, serta peningkatan daya saing produk perikanan.
10. Meningkatkan pemenuhan sarpras distribusi barang, dengan arah kebijakan berupa peningkatan manajemen dan revitalisasi pasar tradisional.
11. Meningkatkan fasilitasi terhadap usaha ekspor, dengan arah kebijakan berupa pembinaan administrasi dan persyaratan ekspor.
12. Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, dengan arah kebijakan berupa peningkatan pengawasan terhadap peredaran barang konsumsi masyarakat.
13. Meningkatkan upaya penyiapan calon transmigran, dengan Arah Kebijakan Peningkatan rekrutmen dan pelatihan calon transmigran.

Tabel 6.5.
Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi 5

No.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Misi 5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja			
1	Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat	Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif	Peningkatan Promosi dan Kepastian serta Kemudahan Perijinan
2	Meningkatnya daya saing pariwisata	Mengembangkan destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Destinasi, Promosi dan Industri Pariwisata
3	Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri	Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Industri Kecil dan Menengah	Introduksi Teknologi dan Pengembangan Industri Utamanya yang Berbahan baku Lokal
4	Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial	Meningkatkan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Meningkatkan Ketrampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja
			Mengembangkan Hubungan Industrial yang Harmonis
5	Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi Usaha Kecil dan Mikro (KUKM).	Meningkatkan Klasifikasi Usaha Mikro Fasilitasi Pengembangan Koperasi	Peningkatan Manajemen dan Jejaring Usaha bagi Usaha Mikro
			Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Koperasi
6	Meningkatnya produksi dan nilai tambah Sektor Pertanian	Optimalisasi lahan untuk pengembangan komoditas pertanian bernilai tambah tinggi yang sesuai dengan karakteristik agro ekologi wilayah	Introduksi teknik dan teknologi budi daya pertanian yang unggul

No.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			Pengembangan hortikultura / buah - buahan untuk substitusi impor
		Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan	Penerapan Teknologi Budidaya, Pakan dan Genetik Ternak
7	Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sub Sektor Perikanan	Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Perikanan	Penerapan Teknologi Budidaya, Pakan dan Genetik Ikan
8	Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata dan terjangkau	Meningkatkan Pemenuhan Sarpras Distribusi Barang	Peningkatan Manajemen dan Revitalisasi Pasar Tradisional
		Meningkatkan Fasilitas Terhadap Usaha Ekspor	Pembinaan Administrasi dan Persyaratan Ekspor
		Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen	Peningkatan pengawasan terhadap peredaran barang konsumsi masyarakat
9	Meningkatnya pelayanan transmigrasi	Meningkatkan upaya penyiapan calon transmigran	Peningkatan rekrutmen dan pelatihan calon transmigran

Misi 6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana kewilayahan yang memadai.

Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai dari Misi ke – 6 RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Terewujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Handal Dan Penyelenggaraan Penataan Ruang Yang Aman, Produktif Dan Berkelanjutan, dengan Sasaran : (1) Meningkatnya akses dan konektivitas wilayah; (2) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur sumberdaya air yang memadai; (3) Terewujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif; (4) Meningkatnya bangunan gedung laik fungsi; (5) Meningkatnya akses aman air minum yang berkelanjutan; (6) Meningkatnya akses air limbah domestik / rumah tangga; (7) Meningkatnya akses pelayanan persampahan; (8) Meningkatnya layanan sistem drainase perkotaan; dan (9) Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas jasa konstruksi.

Strategi yang diterapkan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, adalah dengan :

- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Jalan dan jembatan, dengan arah kebijakan berupa percepatan pembangunan, peningkatan kualitas, serta pemeliharaan jalan dan jembatan.
- b. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, dengan arah kebijakah melalui percepatan pembangunan serta optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana irigasi primer dan sekunder.
- c. Meningkatkan efektifitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan arah kebijakah berupa optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

- d. Pendataan, pengendalian dan pengawasan pembangunan gedung, dengan arah kebijakah berupa optimalisasi implementasi peraturan perundangan tentang bangunan gedung.
 - e. Meningkatkan ketersediaan dan distribusi air minum perkotaan dan perdesaan, dengan arah kebijakan berupa percepatan pembangunan serta optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air minum perkotaan dan perdesaan.
 - f. Mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik, dengan arah kebijakan berupa peningkatan fasilitasi pembangunan IPAL dan IPAL skala komunal.
 - g. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana persampahan, dengan arah kebijakan berupa peningkatan manajemen dan sarana prasarana pengelolaan sampah.
 - h. Mengurangi luas wilayah dan waktu genangan, dengan arah kebijakan berupa pembangunan dan peningkatan sistem drainase perkotaan.
 - i. Meningkatkan pembinaan jasa konstruksi, dengan arah kebijakah berupa pembangunan sistem informasi jasa konstruksi.
2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman, dengan sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman; Strategi yang digunakan dalam upaya pencapain tujuan dan sasaran yang telah dtetapkan diatas adalah dengan mengurangi luasan kawasan kumuh perkotaan, dengan arah kebijakan berupa upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana permukiman dan perumahan.
3. Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Orang Dan Barang, dengan sasaran meningkatnya manajemen, kapasitas dan kualitas angkutan jalan dan udara.
- Strategi yang digunakan dalam upaya pencapain tujuan dan sasaran yang telah dtetapkan diatas, adalah melalui pemenuhan sarana prasarana utama dan penunjang angkutan jalan serta mendukung pembukaan akses transportasi udara komersial, dengan arah kebijakan berupa penyempurnaan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan umum serta fasilitasi pengembangan bandara Wirasaba.

4. Meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik, dengan sasaran meningkatnya implementasi e-government dan keterbukaan informasi publik.

Strategi yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, adalah melalui upaya pengelolaan e-government serta meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, dengan arah kebijakan berupa optimalisasi pemanfaatan e-government serta pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

5. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kualitas pelayanan desa, dengan sasaran meningkatnya kualitas pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa.

Strategi yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, adalah dengan meningkatkan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa serta meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, dengan arah kebijakan berupa peningkatan pemberdayaan kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat desa.

6. Terwujudnya Tertib Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah, dengan sasaran Meningkatnya Kepastian Status Dan Pemanfaatan Tanah.

Strategi yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, adalah melalui upaya optimalisasi pemanfaatan tanah-tanah milik pemerintah daerah, dengan arah kebijakan berupa Peningkatan upaya pengelolaan tanah untuk kepentingan umum.

Tabel 6.6.
Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi 6

No.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Misi 6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana kewilayahan yang memadai			
1	Meningkatnya Akses dan Konektivitas Wilayah	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan jembatan	Percepatan pembangunan, peningkatan kapasitas dan kualitas, serta pemeliharaan jalan dan jembatan
2	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sumberdaya Air yang Memadai	Meningkatkan Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder	Percepatan pembangunan serta pemeliharaan sarana prasarana irigasi primer dan sekunder secara partisipatif
3	Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang efektif	Meningkatkan efektifitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang dan optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
4	Meningkatnya Bangunan Gedung Laik Fungsi	Meningkatkan pendataan, pengendalian dan pengawasan pembangunan gedung	Optimalisasi implementasi peraturan perundangan tentang bangunan gedung
5	Meningkatnya akses aman air minum yang berkelanjutan	Meningkatkan ketersediaan dan distribusi air minum perkotaan dan perdesaan	Percepatan pembangunan serta optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air minum perkotaan dan perdesaan
6	Meningkatnya akses air limbah domestik / rumah tangga	Mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik	Peningkatan fasilitas pembangunan IPAL dan IPAL skala komunal
7	Meningkatnya akses pelayanan persampahan	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan Sarpras persampahan	Peningkatan manajemen dan sarana prasarana pengelolaan sampah padat
8	Meningkatnya layanan sistem drainase perkotaan	Mengurangi luas wilayah dan lama genangan	Pembangunan dan peningkatan sistem drainase perkotaan

No.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
9	Meningkatnya kapasitas & pengendalian kualitas jasa konstruksi	Meningkatkan pembinaan jasa konstruksi	Pembangunan sistem informasi jasa konstruksi
10	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Mengurangi luasan kawasan kumuh perkotaan	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman dan perumahan
11	Meningkatnya kapasitas dan kualitas angkutan jalan dan udara	Melaksanakan pemenuhan sarana prasarana utama dan penunjang angkutan jalan serta mendukung pembukaan akses transportasi udara	Penyempurnaan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan umum serta fasilitasi pengembangan bandara wirasaba
12	Meningkatnya implementasi e-government dan keterbukaan informasi publik	Meningkatkan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah serta meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Optimalisasi pemanfaatan e-government serta pengelolaan informasi dan komunikasi publik
13	Meningkatnya kualitas pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa serta meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	Peningkatan pemberdayaan kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat desa
14	Meningkatnya kepastian status dan pemanfaatan tanah	Mengoptimalkan pemanfaatan tanah-tanah milik pemerintah daerah	Peningkatan upaya pengelolaan tanah untuk kepentingan umum

Misi 7 : Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tujuan yang hendak dicapai dari Misi ke – 7 Adalah Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati, dengan Sasaran Terkendalinya Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Strategi yang diterapkan dalam upaya pencapain tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, adalah melalui :

1. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan berupa pengurangan timbulan pencemaran lingkungan hidup.
2. Meningkatkan konservasi keaneka-ragaman hayati dan ekosistem, dengan arah kebijakan berupa peningkatan konservasi dan pemulihan Kerusakan lingkungan hidup.

Tabel 6.7.

Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi 7

No.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Misi 6 : Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup			
1	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan LH	Pengurangan timbulan pencemaran Lingkungan Hidup
		Meningkatkan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Peningkatan konservasi dan pemulihan Kerusakan LH

6.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah dapat diketahui dari Rencana Tata dan Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031 yang terdiri dari struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional sedangkan Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa dalam struktur ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu wilayah dalam bagian perwilayahan BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen) dimana Perkotaan Cilacap sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Perkotaan Purwokerto sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), sedangkan Kabupaten Purbalingga sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Dalam struktur ruang wilayah Kabupaten Purbalingga PKL merupakan Hirarki pertama dalam rencana struktur ruang Kabupaten Purbalingga yaitu wilayah yang memiliki skala pelayanan tingkat regional Kabupaten Purbalingga. Yang termasuk PKL adalah Ibukota Kabupaten Purbalingga dan Perkotaan Bobotsari. Hirarki kedua dalam rencana struktur kawasan perkotaan Kabupaten Purbalingga adalah Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yang ke depan dipromosikan berkembang menjadi PKL. PKLp diprediksi akan tumbuh sebagai PKL yang mampu melayani skala regional Kabupaten Purbalingga adalah Perkotaan Bukateja dan Perkotaan Rembang.

PKL yang telah ditetapkan sebagai hirarki dalam pengembangan wilayah memiliki berbagai potensi yang layak untuk dikembangkan maupun

permasalahan yang harus ditangani, konsep pengembangan wilayah pada masing masing PKL diorientasikan mampu mendukung dan menampung aktivitas masyarakat, mewujudkan keseimbangan antara perkembangan lingkungan terbangun dan ruang terbuka hijau, sehingga tercipta kawasan perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (ecodistrict).

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga

No	Struktur Kota	Keterangan	Kawasan Perkotaan
1	PKL Pusat Kegiatan Lokal	Kawasan yang dikembangkan menjadi hirarki pertama dan memiliki skala pelayanan untuk kegiatan tingkat regional Kabupaten Purbalingga.	Kawasan Perkotaan Purbalingga Kawasan Perkotaan Bobotsari
2	PKLp Pusat Kegiatan Lokal Promosi	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang diprediksi dan dipromosikan tumbuh sebagai PKL baru dengan skala pelayanan untuk beberapa wilayah kecamatan.	Kawasan Perkotaan Bukateja Kawasan Perkotaan Rembang
3	PPK Pusat Pelayanan Kawasan	Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.	Kawasan IKK Kertanegara, Kawasan IKK Kaligondang, Kawasan IKK Bojongsari, Kawasan IKK Karanganyar, Kawasan IKK Karangmoncol, Kawasan IKK Karangreja, Kawasan IKK Kemangkon, Kawasan IKK Kejobong, Kawasan IKK Kutasari, Kawasan IKK Padamara, Kawasan IKK Mrebet, Kawasan IKK Pengadegan, Kawasan IKK Karangjambu, Kawasan IKK Kalimanah.

RTRW Kabupaten Purbalingga

Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Sistem transportasi regional Kabupaten Purbalingga berada di jalur tengah Pulau Jawa. Keberadaan wilayah Kabupaten Purbalingga di wilayah regional Jawa Tengah memiliki peran dan fungsi sebagai salah satu kota yang mendukung perkembangan jalur tengah Pulau Jawa. Sistem transportasi yang membentuk pola linear memberikan dampak terhadap perkembangan aktivitas perkotaan yang juga mengikuti pola jaringan transportasi. Di samping itu peningkatan sistem jaringan transportasi juga diorientasikan untuk peningkatan konektivitas antar kawasan baik antar kawasan sebagai fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), maupun Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Jaringan transportasi yang ada di Kabupaten Purbalingga adalah jaringan transportasi darat khususnya jaringan jalan. Jaringan jalan dapat digolongkan berdasarkan status, sistem dan fungsi, serta kelas. Kabupaten Purbalingga merupakan jalur transportasi selatan yang cukup padat menghubungkan Purwokerto-Semarang. Berdasarkan statusnya, jaringan jalan yang ada kabupaten Purbalingga dibedakan menjadi jalan provinsi dan jalan kabupaten. Jalan Provinsi, adalah ruas jalan yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah, yaitu jalan yang menghubungkan Purbalingga-Banjarnegara/ Semarang, Purbalingga-Purwokerto/ Jakarta, Purbalingga-Pemalang. Jalan Kabupaten, adalah ruas jalan yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintahan kabupaten Purbalingga, yaitu seluruh jalan yang bukan jalan Provinsi.

Kabupaten Purbalingga mempunyai beberapa simpul terminal, yang dalam perkembangan ke depan akan direncanakan sebagai berikut:

- terminal Tipe A berfungsi untuk melayani Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) direncanakan di Kawasan Perkotaan Bobotsari;
- terminal Tipe B berfungsi untuk melayani Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) direncanakan di Kawasan Perkotaan Purbalingga;
- terminal tipe C berfungsi untuk melayani angkutan antar pusat kegiatan direncanakan di : Perkotaan Bukateja; Desa Kutabawa Kecamatan

Karangreja; Desa Kutasari Kecamatan Kutasari; Desa Kejobong Kecamatan Kejobong. dan Kecamatan Kaligondang.

- sub terminal berfungsi untuk melayani antar pusat pergerakan direncanakan di Desa Losari Kawasan Perkotaan Rembang, Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang, dan Desa Jompo Kecamatan Kalimanah.

Rencana Pemerintah yang ingin mengaktifkan kembali / reaktifasi jalur kereta api Purwokerto – Wonosobo diharapkan akan meningkatkan konektivitas wilayah Kabupaten Purbalingga dengan wilayah sekitarnya. Reaktifasi jalur kereta api ini diarahkan untuk pengembangan sistem kereta api antar kota yang menghubungkan Perkotaan Purwokerto dengan wilayah Kabupaten Wonosobo, di wilayah Kabupaten Purbalingga meliputi Perkotaan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Kemangkon.

Disamping pengembangan jalur transportasi darat, untuk meningkatkan konektivitas wilayah Kabupaten-kabupaten di BARLINGMASAKEB dengan wilayah lain, pengembangan Pangkalan Udara Wirasaba menjadi bandara untuk penerbangan umum sipil/ komersial menjadi hal yang sangat mendesak untuk direalisasikan. Adapun hirarki penerbangan yang dikembangkan akan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Bandara ini terletak di Kecamatan Bukateja dan Kecamatan Kemangkon, tepatnya di Desa Wirasaba, Desa Kemangkon, Desa Kedunglegok dan Desa Penican.

Bandara Wirasaba berdasarkan hirarki bandar udara saat ini termasuk Bandar Udara Bukan Pusat Penyeberangan. Bandara ini berperan melayani penumpang dalam jumlah kecil. Berdasarkan wilayah pelayanan penerbangan termasuk bandar udara domestik. Untuk lebih menunjang pengembangan bandara Wirasaba menjadi Bandara Komersil sebagai bandara pengumpan melalui penambahan landasan pacu, taxiway, pembangunan apron, pembangunan hanggar, pengembangan pengelolaan komersial dan interkoneksi dengan sistem jaringan penerbangan nasional.

Potensi pengembangan wilayah juga dapat diketahui dari potensi kawasan budidaya sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Purbalingga tahun 2011-2031. Kawasan budidaya terdiri atas: (1) kawasan

peruntukan hutan produksi; (2) kawasan hutan rakyat; (3) kawasan peruntukan pertanian; (4) kawasan peruntukan perikanan; (5) kawasan peruntukan pertambangan; (6) kawasan peruntukan industri; (6) kawasan peruntukan pariwisata; (8) kawasan peruntukan permukiman; dan (9) kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi: hutan produksi dan hutan produksi terbatas. Hutan produksi di Kabupaten Purbalingga seluas kurang lebih 629 hektar yang meliputi wilayah Kecamatan Bobotsari, Karanganyar, Karangjambu, Kertanegara, dan Karangreja. Hutan produksi terbatas di Kabupaten Purbalingga memiliki luas kurang lebih 4.727 hektar yang meliputi wilayah Kecamatan Bobotsari, Karanganyar, Karangjambu, Karangmoncol, Kertanegara, Kutasari, Mrebet, dan Karangreja.

Kawasan hutan rakyat di Kabupaten Purbalingga memiliki luas kurang lebih 30.536 hektar meliputi wilayah Kecamatan Bobotsari, Bojongsari, Bukateja, Kaligondang, Karanganyar, Karangjambu, Karangmoncol, Karangreja, Kejobong, Kemangkon, Kertanegara, Kutasari, Mrebet, Pengadegan, dan Rembang.

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 20.976 hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 16.030 hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 4.946 hektar, meliputi wilayah Kecamatan Bobotsari, Bojongsari, Bukateja, Kaligondang, Karangjambu, Karanganyar, Karangmoncol, Karangreja, Kejobong, Kemangkon, Kalimanah, Kertanegara, Kutasari, Mrebet, Padamara, Pengadegan, Purbalingga, dan Rembang.

Sementara kawasan Pertanian hortikultura seluas kurang lebih 172.887 hektar meliputi Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kemangkon, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kertanegara, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Bobotsari, dan Kecamatan Padamara.

Adapun potensi Perkebunan meliputi Kelapa deres, kopi robusta, lada, kapulaga, mlinjo, melati gambir, tebu, glagah arjuna, nilam, teh, karet, cengkeh kakao, panili, kapuk randu, casieavera, dan pandan. Potensi peternakan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Purbalingga terdiri atas ternak hewan besar berupa sapi, kerbau, dan kuda; ternak hewan kecil berupa kambing dan domba; ternak unggas berupa ayam, itik, dan angsa.

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas (1) kawasan budidaya perikanan darat seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar yang meliputi kawasan pembenihan yang berada di Kecamatan Kutasari; kawasan pembesaran yang berada di Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Bojongsari, dan Kecamatan Padamara; kawasan pemasaran yang berada di Kecamatan Purbalingga dan Kecamatan Kutasari; dan kawasan produksi pakan yang berada di Kecamatan Purbalingga dan Kecamatan Kutasari. Sementara itu kawasan pengolahan ikan berada di Kecamatan Purbalingga.

Kawasan peruntukan pertambangan berupa pertambangan mineral non logam dan batuan seluas kurang lebih 15 hektar berada di Desa Gunungwuled Kecamatan Rembang.

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga diarahkan pengembangannya ke luar wilayah perkotaan Purbalingga, utamanya adalah Kecamatan Bukateja; Kecamatan Kemangkong; Kecamatan Bobotsari; Kecamatan Kalimanah; Kecamatan Karangmoncol; Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Karangreja; Kecamatan Bojongsari; Kecamatan Kaligondang; Kecamatan Rembang dan Kecamatan Padamara. Kawasan peruntukan industri tersebut berupa zona-zona industri untuk industri menengah dan industri besar, sementara itu industri kecil dan mikro menyebar di kawasan permukiman.

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Purbalingga diarahkan pengembangannya kepada wisata alam dan wisata minat khusus sesuai dengan potensinya. Pariwisata yang sudah ada dan berkembang di Kabupaten Purbalingga antara lain:

1. Pariwisata alam meliputi Pendakian Gunung Slamet, Goa Lawa, Bumi Perkemahan Munjul Luhur, Agrowisata Serang, Desa wisata Panusupan, Desa Wisata Siwarak, Desa Wisata Kedungbenda, Desa Wisata Tanalum, dan desa-desa wisata lainnya yang sedang berkembang.
2. Pariwisata budaya meliputi :
 - a. Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman berada di Kecamatan Rembang;
 - b. Situs Bandagai yang berada di Kecamatan Karangjambu;
 - c. Situs Mujan yang berada di Kecamatan Bobotsari;
 - d. Wisata Batu Menhir yang berada di Kecamatan Karanganyar;
 - e. Wisata Batu Gilang yang berada di Kecamatan Kertanegara;
 - f. Museum Profesor Soegardha Poerbakawatja dan Masjid Agung Darussalam yang berada di Kecamatan Purbalingga;
 - g. Wisata Batu Putin, Situs Onje, dan Situs Batu Tulis yang berada di Kecamatan Mrebet; dan
 - h. Desa-desa Wisata.
3. Pariwisata buatan meliputi:
 - a. Obyek Wisata Air Bojongsari yang berada di Kecamatan Bojongsari;
 - b. Kolam Renang Tirta Asri yang berada di Kecamatan Kutasari;
 - c. Akuarium Air Tawar Purbasari Pancuran Mas yang berada di Kecamatan Padamara; dan
 - d. Sanggaluri *Park* yang berada di Desa Kutasari Kecamatan Kutasari.

Kawasan peruntukan permukiman yang terdapat di Kabupaten Purbalingga terdiri atas kawasan permukiman perkotaan diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Perkotaan Purbalingga dan Perkotaan Bobotsari, Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) di Perkotaan Bukateja dan Perkotaan Rembang, serta Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di ibu kota kecamatan. Disamping permukiman perkotaan dikembangkan juga kawasan permukiman perdesaan yang tersebar di seluruh Kabupaten di luar PKL, PKLp, dan PPK dengan prioritas memanfaatkan lahan yang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan pertahanan dan keamanan. meliputi: Pangkalan Udara Wirasaba yang meliputi Kecamatan Bukateja dan Kecamatan Kemangkon; Bataliyon Infantri 406 Candrakusuma yang berada di Kecamatan Purbalingga; instalasi militer yang berada di Kecamatan Bojongsari; dan medan latihan militer yang berada di Kecamatan Kutasari.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Kebijakan Pembangunan

Berdasarkan data dan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan, masih terdapat permasalahan strategis yang dipandang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pembangunan Kabupaten Purbalingga, antara lain meliputi : penyelenggaraan pemerintahan yang belum sepenuhnya efektif; masih adanya pengangguran dan kemiskinan; belum baiknya kualitas hidup masyarakat; pertumbuhan ekonomi yang *seret*; kondisi infrastruktur wilayah yang masih belum memadai; dan makin tingginya tingkat kerusakan lingkungan; serta sumberdaya keuangan yang masih terbatas.

Mengacu pada situasi dan kondisi tersebut diatas, maka penyusunan Kebijakan Pembangunan Purbalingga dikelompokkan ke dalam Prioritas Pembangunan sebagai berikut :

- A. Penciptaan landasan yang kokoh untuk pelaksanaan pembangunan, melalui :
 - 1. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik / *good governance*.
 - 2. Mendorong terciptanya kehidupan yang religius, serta mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat.
 - 3. Pemenuhan kecukupan kebutuhan pokok manusia.
- B. Penegakkan dan Pelaksanaan Empat Pilar Pembangunan, yaitu :
 - 1. Pembangunan Kualitas Manusia
 - 2. Pembangunan Perdesaan.
 - 3. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan.
 - 4. Penyediaan Infrastruktur yang Memadai.
- C. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan.
- D. Dukungan Sektor Lain Secara Sinergis.

Secara lebih rinci, Prioritas dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Penciptaan Landasan yang Kokoh untuk Pelaksanaan Pembangunan.

Guna mendorong terwujudnya landasan yang kokoh untuk pelaksanaan pembangunan, ditempuh melalui 3 (tiga) strategi pembangunan, yaitu :

1. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan utamanya adalah agar pemerintah daerah mampu mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Kebijakan dan langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah antara lain dilakukan melalui : (1) meningkatkan kompetensi dan intelektualitas aparatur; (2) penyusunan struktur organisasi dan kelembagan yang sesuai dengan fungsi dan beban kerja; (3) perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan pemerintahan; dan (4) meningkatkan integritas dan sikap positif utamanya bagi aparatur pemerintah daerah.
2. Mendorong terciptanya kehidupan yang religius, serta mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat. Tujuannya utamanya adalah mewujudkan tatanan kehidupan dan lingkungan sosial kemasyarakatan yang religius, aman, tentram dan harmonis.
3. Pemenuhan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia. Tujuannya utamanya adalah untuk menjamin kecukupan kebutuhan pokok manusia khususnya pangan dan papan bagi seluruh masyarakat, utamanya bagi keluarga miskin.

B. Pengutamaan Pelaksanaan Empat Pilar Pembangunan

1. Pembangunan Kualitas Manusia. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Purbalingga. Kualitas hidup manusia menyangkut dimensi fisik dan mental spiritual, sehingga selain harus sehat dan cerdas, juga harus memiliki mental serta karakter yang

tanggung dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia utamanya dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

2. Pembangunan Perdesaan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Purbalingga merupakan wilayah perdesaan yang terdiri atas 224 desa dan 15 kelurahan. Oleh karena itu, tingkat keberhasilan pembangunan di Purbalingga dapat dilihat dari tingkat kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perdesaan. Saat ini masih dirasa adanya disparitas antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Tujuan pembangunan perdesaan adalah mendorong agar wilayah perdesaan menjadi tempat yang nyaman, menarik dan produktif untuk permukiman tempat tinggal serta tempat bekerja dan melaksanakan kegiatan usaha, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu :
3. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. Tujuan pembangunan ekonomi kerakyatan antara lain adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat diharapkan dapat mendongkrak daya beli dalam memenuhi kebutuhan hidup serta peningkatan kapasitas dan kualitas hidup manusia.
4. Pembangunan Infrastruktur. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk menyediakan sarana prasarana wilayah yang memadai dan terintegrasi sebagai penunjang perwujudan kesejahteraan masyarakat. Fokus pembangunan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan prasarana penunjang aktifitas masyarakat secara merata.

C. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam pelaksanaan pembangunan, haruslah didasarkan pada filosofi yang sangat penting dan harus melandasi setiap pelaksanaan pembangunan yaitu filosofi pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan diupayakan seminimal mungkin mengganggu fungsi dan kelestarian lingkungan hidup.

D. Dukungan Sektor Lainnya secara Sinergis

Permasalahan pembangunan merupakan permasalahan yang multi kompleks dan menyangkut berbagai aspek kehidupan yang oleh karena itu tidak dapat diatasi melalui pembangunan satu bidang atau sektor, melainkan harus didukung oleh berbagai bidang, program, dan kegiatan pembangunan secara simultan dan bersinergi.

Di samping hal-hal tersebut diatas, adanya keterbatasan sumberdaya pembangunan terutama yang berupa dana mengharuskan adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Sehingga diperlukan adanya ketepatan alokasi investasi pembangunan dan dihindari adanya *overlapping*, duplikasi, atau bahkan kontradiksi dalam pelaksanaan kebijakan, program, atau kegiatan pembangunan dalam satu bidang maupun antara bidang pembangunan. Sebaliknya dibutuhkan adanya keterpaduan dan sinergi antar kebijakan, program, dan kegiatan maupun antar bidang pembangunan.

7.2. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah dalam RPJMD pada hakekatnya merupakan kumpulan program prioritas yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, serta fungsi penunjang pemerintahan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Penetapan program pembangunan disusun dan dikelompokkan berdasarkan Misi dan urusan pembangunan sebagai berikut.

Misi 1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat

Program untuk mendukung misi ini adalah :

1. Fungsi Penunjang Pemerintahan

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- c. Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- d. Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah.
- e. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
- f. Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- g. Program Fasilitasi dan Pengembangan Kepegawaian Daerah.
- h. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
- i. Program Koordinasi dan Penatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.
- j. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.
- k. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah.

2. Urusan Kependudukan dan Pencatatan sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan.

3. Urusan Persandian

Program Pengelolaan Persandian.

4. Urusan Statistik

Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah.

5. Urusan Kearsipan

Program Pengelolaan Arsip.

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Purbalingga pada Misi 1

Misi 1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN	SKPD Utama
				AWAL	AKHIR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah	Opini audit BPK	opini	WDP	WTP	Pengembangan Agenda Intelektual, Managerial, Struktural, Behavioral dan Agenda Sosial	Optimalisasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Program Koordinasi dan Penatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Fungsi Penunjang	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	77,6	80,5			Program Pengelolaan Kearsipan	Kearsipan	
	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah							Fungsi Penunjang		
	Program Penataan Administrasi Kependudukan							Adminduk Capil		
	Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Aparatur	Program Fasilitasi dan Pengembangan Kepegawaian Daerah	Fungsi Penunjang							
	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi Penunjang							
		Program Pengendalian dan Evaluasi	Fungsi Penunjang							

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN	SKPD Utama
				AWAL	AKHIR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Perencanaan Pembangunan Daerah		
								Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Fungsi Penunjang	
								Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah	Statistik	
							Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi Penunjang	
							Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Fungsi Penunjang	
							Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Fungsi Penunjang	
							Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Fungsi Penunjang	

Misi 2 : Mendorong kehidupan masarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan

Program untuk mendukung misi ini adalah :

1. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik.
- b. Program Pengembangan Wawasan kebangsaan.
- c. Program Pembinaan Kehidupan Beragama.
- d. Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.
- e. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
- f. Program Penanggulangan Bencana Kebakaran

Tabel 7.2
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Purbalingga pada Misi 2

Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakat yang religius yang beriman dan bertakwa ke hadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN	SKPD Utama
				Awal	Akhir					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya paham kebangsaan	Partisipasi masyarakat dalam Pemilu	persen	60	70	Meningkatkan wawasan kebangsaan untuk seluruh komponen masyarakat	Meningkatkan Peningkatan kehidupan beragama dan Optimalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik Program Pengembangan Wawasan kebangsaan Program Pembinaan Kehidupan Beragama	Trantibum dan Linmas	
2.	Meningkatnya ketaatan terhadap Perda dan Perbup	Cakupan pelanggaran Perda yang ditangani	persen	100	100	Penyempurnaan Sistem Penegakan Perda	Meningkatkan Kompetensi dan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Trantibum dan Linmas	
3.	Menurunnya Indeks Resiko Bencana dan Kebakaran	Cakupan pelayanan korban bencana	persen	100	100	Meningkatkan Kompetensi Penanganan Bencana dan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana dan penambahan pos	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	Trantibum dan Linmas	

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN	SKPD Utama
				Awal	Akhir					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran	persen	31	60	Kebakaran	pemadam kebakaran	Program Penanggulangan Bencana Kebakaran	Trantibum dan Linmas	

Misi 3 : Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak

Program untuk mendukung misi ini adalah :

1. Urusan Pangan

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pangan Pemerintah dan Masyarakat.

2. Urusan Perumahan Rakyat

Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan.

Tabel 7.3
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Purbalingga pada Misi 3

Misi 3 : Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya Pangan dan Papan secara layak

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN	SKPD Utama
				Awal	Akhir					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya status pangan masyarakat	Pola Pangan Harapan	Skor	84	91	Meningkatkan Ketersediaan dan Keragaman Pangan	Pemenuhan Kebutuhan Pangan Utama Masyarakat	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pangan	
		Ketersediaan Pangan utama	Kg/kap/thn	163	175			Program Penguatan Kelembagaan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	pangan	
2	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	Cakupan rumah layak huni	persen	88,59	93,78	Meningkatkan Fasilitasi pembangunan perumahan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Fasilitasi Pembangunan Perumahan Swadaya	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Perumahan dan Permukiman	
		Cakupan kepemilikan rumah	Persen	80,12	89,12					

Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

Program untuk mendukung misi ini adalah :

1. Urusan Pendidikan

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Program Wajar Dikdas 9 tahun.
- c. Program Pendidikan Menengah.
- d. Program Pendidikan Non Formal.
- e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- f. Program Manajemen Pelayanan Kependidikan.
- g. Program Fasilitasi Akses Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Tinggi.

2. Urusan Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

3. Urusan Kesehatan

- a. Program Pelayanan KIA, Remaja, dan Usia.
- b. Program Pengelolaan Farmasi Publik dan Perbekalan Kesehatan.
- c. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan
- d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
- e. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan serta Penyehatan Lingkungan.
- f. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Kesehatan Matra.
- g. Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Kesehatan.
- h. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- i. Program Pengawasan Obat dan Makanan.
- j. Program Pemantapan Fungsi Managemen Kesehatan.

4. Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

- a. Program Peningkatan Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan Kepesertaan KB.
- b. Program Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja.
- c. Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Institusi KB.
- d. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

5. Urusan Sosial

- a. Program Pelayanan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
- c. Program Fasilitasi, Penanganan dan Rehabilitasi Korban Bencana.

6. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda.
- b. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga.
- c. Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

7. Urusan Kebudayaan

- a. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah.
- b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 7.4
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Purbalingga pada Misi 4

Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN	SKPD Utama
				Awal	Akhir					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	tahun	11,78	12,9	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta akses pendidikan utamanya untuk Keluarga Miskin	Peningkatan Sarpras, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, serta Penguatan Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	
		Rata-rata Lama sekolah	tahun	6,85	7,92			Program Wajar Dikdas 9 tahun		
		APK SD/ sederajat	angka	109	110			Program Pendidikan Non Formal		
								Program Pendidikan Menengah		
		APK SMP/ sederajat	angka	100	100			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
		APM SD/ sederajat	angka	91	94					
		APM SMP/ sederajat	angka	60	70			Program Manajemen Pelayanan Kependidikan		

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN	SKPD Utama
				Awal	Akhir					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Program Fasilitas Akses Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Tinggi		
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	tahun	72,8	73,4	Meningkatkan Akses Pelayanan kesehatan utamanya untuk Keluarga Miskin serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan serta Penguatan Manajemen Penyelenggaraan Kesehatan	Program Pelayanan KIA, Remaja, dan Usia	Kesehatan	
		Angka kematian ibu	Per 100 ribu KH	136	47			Program Pengelolaan Farmasi Publik dan Perbekalan Kesehatan		
		Angka kematian bayi	Per 10 ribu KH	10	4			Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan		
								Program Perbaikan Gizi Masyarakat		

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN	SKPD Utama
				Awal	Akhir					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan serta Penyehatan Lingkungan		
								Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Kesehatan Matra.		
								Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Kesehatan		
								Program Jaminan Kesehatan Masyarakat		
								Program Pengawasan Obat dan Makanan		
								Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan		
3.	Terkendalinya laju pertumbuhan	Laju Pertumbuhan penduduk	persen	1,06	< 1	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan	Peningkatan Kemitraan dalam Pelayanan KB dan pengembangan	Program Peningkatan Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan	Pengendalian pnddk dan KB	

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN	SKPD Utama
				Awal	Akhir					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	penduduk					Keluarga Berencana	pusat pelayanan KB	Kepesertaan KB		
		Cakupan peserta KB aktif	persen	88	95			Program Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja	Pengendalian pnddk dan KB	
		Cakupan PUS tak terlayani	persen	51	9			Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Institusi KB	Pengendalian pnddk dan KB	
4.	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Cakupan Keluarga Sejahtera	persen	75,1	81	Mengembangkn usaha peningkatan keluarga sejahtera	Peningkatan Pemberdayaan Keluarga	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Pengendalian pnddk dan KB	
5.	Meningkatnya Pelayanan PMKS, Korban Bencana dan kelompok masyarakat rentan lainnya	Cakupan PMKS yang terlayani	persen	24	80	Meningkatkan intensitas pelayanan terhadap PMKS, Korban Bencana dan kelompok masyarakat rentan lainnya	Peningkatan fasilitasi, pembinaan serta pemberdayaan PMKS dan kelembagaan kesejahteraan sosial	Program Pelayanan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Sosial	
								Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	Sosial	
								Program Fasilitasi, Penanganan dan Rehabilitasi Korban Bencana	Sosial	
6.	Meningkatnya	Indeks	angka	63,4	66	Mengarus	Pelaksanaan	Program	Pemberda-	

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN	SKPD Utama
				Awal	Akhir					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Keberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pmbangunan Gender				utamakan Isu Gender dan Perlindungan Anak	Pembangunan Responsif Gender dan Perduli Anak	Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	yaan perempuan dan perлинд anak	
		Cakupan kekerasan anak yang tertangani	persen	100	100					
7.	Meningkatnya Budaya Gemar Membaca	Cakupan perpustakaan desa	persen	23	84	Meningkatkan jumlah dan Kualitas Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Perpustakaan digital	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	
8.	Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian Benda Cagar Budaya (BCG) serta Prestasi Seni	Jumlah gedung/ tempat gelar seni	unit	11	12	Meningkatkan Intensitas Pembinaan dan Pementasan Kesenian dan Kebudayaan	Fasilitasi pementasan, pengiriman dan pelestarian seni budaya daerah	Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah	Kebudayaan	
		Jumlah pementasan kesenian daerah	kali	65	76			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kebudayaan	
9.	Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Jumlah prestasi Olahraga Tk. regional dan Nasional	Ke-juaraan	2	12	Meningkatkan Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga Prestasi	Peningkatan Fasilitasi serta Pengembangan Even Kepemudaan dan Kompetisi	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda	Kepemudaan dan Olahraga	
								Program Pembinaan dan Pemasarakatan	Kepemudaan dan	

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN	SKPD Utama
				Awal	Akhir					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Olahraga	Olahraga	Olahraga	
								Program Pencegahan penyalahgunaan narkoba	Kepemudaan dan Olahraga	

Misi 5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja

Program untuk mendukung misi ini adalah :

1. Urusan Tenaga Kerja

- a. Program Pembinaan, Peningkatan Keterampilan dan Penempatan Tenaga Kerja.
- b. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial.

2. Urusan Koperasi dan UMKM

- a. Program Penumbuhan, Pengembangan, dan Peningkatan Kualitas Manajemen Koperasi.
- b. Program Pengembangan, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk UMKM.
- c. Program Kemitraan, Promosi dan Pemasaran Produk UMKM.

3. Urusan Penanaman Modal,

- a. Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi.
- b. Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu.

4. Urusan Pariwisata

- a. Program Pengembangan Destinasi Wisata.
- b. Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata.
- c. Program peningkatan kapasitas dan kelembagaan wisata

5. Urusan Perdagangan

- a. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan.

- b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan.
- c. Program Standarisasi, Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

6. Urusan Perindustrian

Program Peningkatan dan Pengembangan Industri.

7. Urusan Pertanian

- a. Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan
- b. Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Pertanian Hortikultura
- c. Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perkebunan
- d. Program Pengembangan Budidaya Peternakan.
- e. Program Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Peternakan.
- f. Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinair.

8. Urusan Perikanan dan Kelautan

- a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
- b. Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- c. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

9. Urusan Transmigrasi

Program Ketransmigrasian.

Tabel 7.5
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Purbalingga pada Misi 5

Misi 5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN	SKPD Utama
				Awal	Akhir					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat	Pertambahan nilai investasi baru	Miliar rupiah	230	270	Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif	Peningkatan Promosi dan Kepastian serta Kemudahan Perijinan	Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi	Penanaman Modal	
								Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu	Penanaman Modal	
2	Meningkatnya daya saing pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	Ribuan orang	1.579	2.929	Mengembangkn destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Destinasi, Promosi dan Industri Pariwisata	Program Pengembangan destinasi wisata	Pariwisata	
								Program peningkatan kapasitas dan kelembagaan wisata		
								Program promosi dan pemasaran wisata		
3	Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri	Kontribusi PDRB Sektor Industri	Triliun rupiah	3,9	5,9	Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Industri Kecil dan Menengah	Introduksi teknologi dan Pengembangan Industri terutama yang berbahan baku lokal	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Industri	

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN	SKPD Utama
				Awal	Akhir					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Meningkatnya kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,13	< 4	Meningkatkan Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja	Meningkatkan Ketrampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja	Program Pembinaan, Peningkatan Keterampilan dan Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	
		Rasio Tenaga Kerja dengan upah sesuai UMK	persen	79	95		Mengembangkan Hubungan Industrial yang harmonis	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Tenaga Kerja	
5	Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi Usaha Kecil dan Mikro (KUKM).	Jumlah koperasi sehat	unit	105	135	Meningkatkan Klasifikasi Usaha Mikro serta Meningkatkan Fasilitasi Pengembangan Koperasi	Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Koperasi	Program Penumbuhan, Pengembangan, dan Peningkatan Kualitas Manajemen Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Jumlah usaha mikro bersertifikat/berijin	unit	268	1193		Peningkatan Manajemen dan Jejaring Usaha bagi Usaha Mikro	Program Pengembangan, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk UMKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
								Program Kemitraan, Promosi dan Pemasaran Produk UMKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
6	Meningkatnya produksi dan nilai tambah	PDRB Sektor Pertanian	Triliun rupiah	4,9	6,9	Optimalisasi lahan untuk pengembangan	Introduksi teknik dan teknologi budi daya	Program Pengembangan Budidaya dan	Pertanian	

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN	SKPD Utama
				Awal	Akhir					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sektor Pertanian					komoditas pertanian bernilai tambah tinggi yang sesuai dengan karakteristik agro ekologi wilayah	pertanian yang unggul dan Pengembangan hortikultura / buah - buahan untuk substitusi impor	Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan		
		Produksi padi	Ton	249.69	269.05			Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Hortikultura	Pertanian	
							Program Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perkebunan	Pertanian		
		Produksi jagung	ton	39.339	41.759	Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan	Penerapan Teknologi Budidaya, Pakan dan Genetik Ternak	Program Pengembangan Budidaya Peternakan	Pertanian	
	Produksi kedele	ton	221	235	Program Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Peternakan			Pertanian		
	Produksi daging	ton	14.346	15.229	Program Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterinair			Pertanian		
7	Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sub	PDRB sub sektor perikanan	Miliar rupiah	282	360	Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah	Penerapan Teknologi Budidaya, Pakan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kelautan dan Perikanan	

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN	SKPD Utama
				Awal	Akhir					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sektor Perikanan	Produksi ikan konsumsi	Ton	4.873	5.293	Hasil Perikanan dan Genetik Ikan		Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelautan dan Perikanan	
8	Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata dan terjangkau	Jumlah pasar ber-SNI	unit	0	3	Meningkatkan Pemenuhan Sarpras Distribusi Barang		Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan	Perdagangan	
						Meningkatkan Fasilitas Terhadap Usaha Ekspor		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan		
						Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen		Program Standarisasi, Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		

Misi 6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana kewilayahan yang memadai

Program untuk mendukung misi ini adalah :

1. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Prasarana Permukiman.

2. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

- a. Program Penataan Ruang Daerah.
- b. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- c. Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah.
- d. Program Pengelolaan Pertamanan dan Kawasan Perkotaan.
- e. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- f. Program Pembangunan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Irigasi dan Sumberdaya Air.
- g. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Pemerintahan.

3. Urusan Perhubungan,

- a. Program Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas.
- b. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

4. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi.
- b. Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik.

5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa.
- b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa.

6. Urusan Pertanahan

- a. Program Pengelolaan Pertanahan

Tabel 7.6
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Purbalingga pada Misi 6

Misi 6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana kewilayahan yang memadai

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN	SKPD Utama
				Awal	Akhir					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Akses dan Konektivitas Wilayah	Persentase jalan dalam kondisi baik	Persen	74,9	82,15	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan jembatan	Percepatan pembangunan, peningkatan kualitas, serta pemeliharaan jalan dan jembatan	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persen	93	94,75					
		Persentase lajur jalan minimal 5,5 meter	Persen	7,0	25,5					
2	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sumberdaya Air yang Memadai	Persentase bangunan pengairan dalam kondisi baik	Persen	38,5	48,2	Meningkatkan Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder	Percepatan pembangunan serta pemeliharaan sarpras irigasi primer dan sekunder	Program Pembangunan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Irigasi dan Sumberdaya Air	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN	SKPD Utama
				Awal	Akhir					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ketersediaan air baku irigasi	Persen	87,5	91					
3	Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan & Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang efektif	Ruang Terbuka Hijau Publik	Persen	18,1	19,1	Meningkatkan efektifitas perencanaan, pemanfaatan & pengendalian pemanfaatan ruang	Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Program Penataan Ruang Daerah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4						Pendataan, pengendalian & pengawasan pembangunan gedung	Optimalisasi implementasi peraturan perundangan tentang bangunan gedung	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
5						Meningkatkan pembinaan Jasa Konstruksi	Pembangunan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Program Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
6	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Luasan kawasan kumuh perkotaan	Persen	78,5	100	Mengurangi luasan kawasan kumuh perkotaan	Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana permukiman	Program Pengelolaan Pertamanan dan Kawasan Perkotaan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
7	Meningkatnya akses aman air	Cakupan Rumah	Persen	78,5	100	Meningkatkan ketersediaan	Percepatan pembangunan	Program Pengelolaan air bersih	Perumahan Rakyat dan	

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN	SKPD Utama
				Awal	Akhir					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	minum yang berkelanjutan	tangga mengakses air bersih				dan distribusi air minum perkotaan dan perdesaan	serta pemeliharaan sarpras air minum perkotaan dan perdesaan		Kawasan Permukiman	
8	Meningkatnya akses air limbah domestik / Rumah Tangga	Cakupan Rumah Tangga terlayani sistem air limbah	Persen	70	100	Mengelola dan mengembangk Sistem air limbah domestik	Peningkatan fasilitas pembangunan IPAL skala komunal	Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
9	Meningkatnya akses pelayanan persampahan	Rasio timbulan sampah terlayani	Persen	59,6	61	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan Sarpras persampahan	Peningkatan manajemen dan Sarana Prasarana pengelolaan sampah padat			
10	Meningkatnya layanan sistem drainase perkotaan	Cakupan drainase perkotaan	Persen			Mengurangi luas wilayah genangan	Pembangunan sistem drainase perkotaan		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
11	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Angkutan Jalan dan Udara	Penurunan angka kecelakaan lalu lintas	kasus	506	301	Pemenuhan sapras utama dan penunjang angkutan jalan	Penyempurnaan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan umum	Program Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas	Perhubungan	
								Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Perhubungan	
12	Meningkatnya Implementasi	SKPD yang menerapkan	unit	25	43	Pengelolaan e-government di	Optimalisasi pemanfaatan e-	Program Pengembangan	Komunikasi dan	

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN	SKPD Utama
				Awal	Akhir					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	e-Government dan Keterbukaan Informasi Publik	SIM dan memiliki website aktif				lingkup pemerintah daerah	government serta pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi	Informatika	
						Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik		Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Komunikasi dan Informatika	
13	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa	Cakupan Desa dengan BUMDes yang sehat	persen	52	100	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa serta meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	Peningkatan pemberdayaan kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat desa	Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa	Pemberdayaan masyarakat dan desa	
						Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa		Pemberdayaan masyarakat dan desa		
14	Meningkatnya kepastian status dan pemanfaatan tanah	Cakupan tanah milik pemda yang bersertifikat	persen	60	100	Mengoptimalkan pemanfaatan tanah-tanah milik pemerintah daerah	Peningkatan pengelolaan tanah untuk kepentingan umum	Program Pengelolaan Pertanahan	Pertanahan	

Misi 7 : Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

Program untuk mendukung misi ini adalah :

Urusan Lingkungan Hidup

- a. Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- c. Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3.
- d. Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

Tabel 7.7
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Purbalingga pada Misi 7

Misi 7 : Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN	SKPD Utama
				Awal	Akhir					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas lingkungan hidup	indeks	47,79	67	Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan LH	Pengurangan timbulan pencemaran Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Ton co2 ekuivalen	9.182	59.185			Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3		
								Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup		
						Meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem	Peningkatan konservasi dan pemulihan kerusakan LH	Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem		

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam bab ini diuraikan hubungan antara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan tugas dan fungsi SKPD beserta program yang menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD. Selain itu, disajikan pula target kinerja masing-masing indikator pada setiap tahun sampai dengan akhir periode perencanaan. Evaluasi kinerja RPJMD dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target kinerja selama periode perencanaan (lima tahun). Bagian ini merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas.

Perumusan program prioritas dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah pada periode sebelumnya serta berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan yang mencakup seluruh urusan pemerintah daerah, baik urusan wajib, urusan pilihan, dan fungsi penunjang. Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan		
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020			Tahun 2021	
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR															
Pendidikan															
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini			5.030.000		5.030.000		5.030.000		5.030.000		5.030.000		5.030.000	
	APK PAUD	57,57%	67,70%		82,70%		92,70%		97,70%		100%		100%		
	Cakupan guru PAUD memenuhi kualifikasi	58,84	34,50		36,90		38,60		42,00		43,00		43,00		
2	Program Wajar Dikdas 9 tahun			24.228.532		39.228.532		24.228.532		24.228.532		24.228.532		24.228.532	
	APK SD/ sederajat	108,89%	108%		109,12		109,39		109,59		109,99		110		
	APM SD/ sederajat	90,98	91,5		91,25		91,3		91,35		91,4		93,5		
	APK SMP/ sederajat	99,71	100,15		100,2		100,24		100,26		100,3		100,3		
	APM SMP/ sederajat	69,3	69,8		69,9		69,95		69,99		70,14		72,5		
3	Program Pendidikan Menengah														
4	Program Pendidikan Non Formal			711.680		711.680		711.680		711.680		711.680		711.680	
	Cakupan lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi	40%	52,0%		64,0%		76,0%		88,0%		100,0%		100,0%		
	Cakupan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terakreditasi	11%	22%		39%		56%		72%		89%		100%		
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			9.337.493		9.337.493		9.337.493		9.337.493		9.337.493		9.337.493	
	Jumlah pendidik/tenaga kependidikan berprestasi tingkat provinsi dan nasional	1	2		3		5		7		8		8		
	Cakupan tingkat kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan	74,93	80,5		90		95		100		100		100		
	Cakupan sertifikasi pendidik	56,93	78,5		85		90		100		100		100		
	Cakupan pendidik lulus uji kompetensi guru (UKG)	75,84	80		85		90		95		100		100		
6	Program Manajemen Pelayanan Kependidikan														
	Cakupan satuan pendidikan yang menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	100	100	1.397.978	100	1.397.978	100	1.397.978	100	1.397.978	100	1.397.978	100	1.397.978	
	Cakupan akreditasi:														
	-PAUD	30	35		37		39		42		45		45		
	-SD/ sederajat	22	25		27		30		42		45		45		
	-SMP/ sederajat	80	81		82		83		84		85		85		
	Cakupan capaian SPM:														
	-SD/ sederajat	83,96	84		84,5		89,55		93,44		98,04		98,04		
	-SMP/ sederajat	76,84	77		74,54		79,24		83,65		90,52		90,52		
	Cakupan angka kelulusan:														

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan			
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
	-SD/ sederajat -SMP/ sederajat Cakupan angka melanjutkan: -SD/ sederajat -SMP/ sederajat Cakupan angka putus sekolah: -SD/ sederajat -SMP/ sederajat Cakupan angka mengulang: -SD/ sederajat -SMP/ sederajat Indeks integritas UN	99,75 99,96 98,2 96,98 0,24 0,61 3,76 0,21 90	99,9 99,96 86,21 81,39 0,21 0,9 5,30 0,24 91		100 100 87,15 84,29 0,20 0,87 5,20 0,23 92		100 100 87,60 85,49 0,19 0,79 5,00 0,22 93		100 100 86,25 84,39 0,18 0,71 4,96 0,21 94		100 100 86,07 84,29 0,17 0,69 4,80 0,20 95		100 100 86,07 84,29 0,17 0,69 4,80 0,20 96					
7 Program Fasilitasi Akses Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Tinggi	Cakupan fasilitasi akses pendidikan luar biasa Persentase fasilitasi akses pendidikan tinggi anak keluarga miskin berprestasi	249 NA	249 100	11.860.125	250 100	2.000.000	252 100	- 100	2.200.000	252 100	- 100	2.420.000	254 100	- 100	2.662.000	256 100	2.928.200	
Kesehatan 1 Program Pelayanan KIA, Remaja, dan Usia.	Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita	135,78 10,06 11,81	130 10 11,81	279.492	128 9,6 11,8	279.492	125 9,5 11,7	279.492	120 9,3 11,68	279.492	115 9,3 11,66	279.492	110 9,2 11,65	279.492				
2 Program Pengelolaan Farmasi Publik dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar Cakupan ketersediaan obat generik dan esensial sesuai standar dan kebutuhan	60% 80%	70% 85%	3.582.085	80% 85%	3.582.085	90% 90%	3.582.085	100% 90%	3.582.085	100% 95%	3.582.085	100% 95%	3.582.085				
3 Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas Perawatan Jumlah Puskesmas mampu bersalin Jumlah Puskesmas Poned Jumlah RS Ponek Jumlah Puskesmas Terakreditasi Jumlah Rumah sakit Terakreditasi	11 12 5 1 0 0	11 12 5 1 7 1	63.069.106	12 17 7 1 15 1	58.069.106	12 20 7 2 20 2	53.069.106	13 22 7 2 22 3	53.069.106	13 22 7 2 22 3	53.069.106	13 22 7 2 22 3	48.069.106				
4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat.	Prevalensi balita gizi buruk Prevalensi balita gizi kurang Cakupan bayi dengan BBLR Cakupan kecamatan bebas rawan gizi Cakupan desa/kelurahan dengan konsumsi garam beryodium baik	0,11% 3% 5,3% 100% 100%	0,11% 3% 5,3% 100% 100%	177.220	0,11% 3% 5,2% 100% 100%	177.220	0,11% 2,5% 5,2% 100% 100%	177.220	0,1% 2,5% 5,1% 100% 100%	177.220	0,1% 2,5% 5% 100% 100%	177.220	0,1% 2,5% 5% 100% 100%	177.220				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan serta penyehatan lingkungan	Cakupan desa siaga aktif	100%	100	5.204.768	100	5.204.768	100	5.204.768	100	5.204.768	100	5.204.768	100	5.204.768	
	Cakupan kepemilikan jamban keluarga	74,1%	80%		81%		82%		83%		85%		90%		
	Cakupan akses jamban keluarga	64,85%	80%		90%		95%		100%		100%		100%		
	Cakupan desa memenuhi syarat kesehatan lingkungan	74,06%	80%		90%		95%		100%		100%		100%		
	Cakupan sarana air minum yang dilakukan pengawasan	67,8%	70%		75%		80%		90%		95%		100%		
	Cakupan desa Open Defecation Free (ODF)	14 ds	32		50		68		76		82				
	Cakupan rumah tangga ber-PHBS	74,8%	75%		87%		89%		90%		92%		93%		
	Cakupan Posyandu Mandiri	57,54%	60%		65%		67%		70%						
	Cakupan kepesertaan KB aktif	88,07%	90%		90%		90%		92%		93%		95%		
	Cakupan rumah sehat	69,87%	70%		75%		80%		82%		85%		87%		
	Cakupan desa/kelurahan melakukan STBM	74,06%	80%		90%		95%		100%		100%		100%		
	Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal	90,54	91%		92%		93%		95%		97%		100%		
	Proporsi Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM) yang memenuhi syarat	53,17%	60%		65%		70%		75%		80%		85%		
6 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta kesehatan mata	Cakupan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
	Prevalensi malaria	0,04/oo	0,04/oo		0,04/oo		0,04/oo		0,04/oo		0,04/oo				
	Case Notification Rate (CNR) TBC	121,24/oooo	121,24/oooo		121,24/oooo		121,24/oooo		121,24/oooo		121,24/oooo				
	Prevalensi HIV/AIDS	0,001%	0,001%		0,001%		0,001%		0,001%		0,001%				
	Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani	5,45%	5,45%		5,45%		5,45%		5,45%		5,45%				
	Angka penemuan kasus baru kusta	24 ks	24 ks		24 ks		24 ks		24 ks		24 ks				
	Accute Flacid Paralysis (AFP)	4 ks	4 ks		4 ks		4 ks		4 ks		4 ks				
	Incident Rate DBD	27,4/oooo	27,4/oooo		27,4/oooo		27,4/oooo		27,4/oooo		27,4/oooo				
	Case Fatality Rate (CFR) DBD	2% (5 ks)	2% (5 ks)		2% (5 ks)		2% (5 ks)		2% (5 ks)		2% (5 ks)				
	Cakupan balita diare yang ditangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
	Jumlah desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam	nihil	nihil		nihil		nihil		nihil		nihil				
	7 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi	100	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000
		Cakupan pelatihan tenaga kesehatan	100	100		100		100		100		100		100	
Rasio dokter umum per jumlah penduduk		10,51	10,51								40		40		
Rasio dokter spesialis per jumlah penduduk		4,92	4,92		4,92		5		6		6		6		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	Rasio tenaga paramedis per jumlah penduduk	83,66	83,66		83,66		84		85		100		118		
	Rasio bidan per jumlah penduduk	51,45	51,45		55		56		60		65		77		
8 Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	11.144.442	100	16.144.442	100	16.144.442	100	16.144.442	100	16.144.442	100	16.144.442	
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan	72,12	80		90		95		100		100		100		
9 Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pengawasan peredaran obat	100	100	36.630	100	36.630	100	36.630	100	36.630	100	36.630	100	36.630	
	Cakupan pemeriksaan makanan dan minuman yang diperdagangkan	100	100		100		100		100		100		100		
11 Program Pemantapan Fungsi Managemen Kesehatan.	Cakupan BLUD pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah	1		1.476.698		1.476.698		1.476.698		1.476.698		1.476.698		1.476.698	
	Cakupan Puskesmas terakreditasi	0	7		15		20		22		22		22		
	Cakupan Rumah Sakit terakreditasi	0	1		1		2		3		3		3		
	Cakupan pelayanan perijinan/regiistrasi kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Cakupan pemanfaatan SIM pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah	0	1		1		1		1		1		1		
12 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	a. Pelayanan kesehatan dasar :			156.302.491		156.302.491		156.302.491		156.302.491		156.302.491		156.302.491	
	Jumlah layanan rawat jalan Puskesmas	91 or/hr							125 or/hr						
	Bed Occupancy Ratio (BOR)	50,97	55		60		65		80		80		80		
	Net Death Rate (NDR)	0,7	1		2		5		10		10		10		
	Gross Death Rate (GDR)	0,6	1		1		2		20		20		20		
	Length Of Stay (LOS)	0	1		2		3		9		9		9		
	Turn Over Interval (TOI)	2,69	3		3		3		3		3		3		
	Bed Turn Over (BTO)	66,6	50		50		50		50		50		50		
	a. Pelayanan kesehatan rujukan :														
	Jumlah layanan rawat jalan Rumah Sakit	119 or/hr	200 or/hr		225 or/hr		240 or/hr		250/or/hr		250/or/hr		250/or/hr		
	Bed Occupancy Ratio (BOR)	80,09	80		80		80		80		80		80		
	Net Death Rate (NDR)	17,7	17		15		13		10		10		10		
	Gross Death Rate (GDR)	29	29		24		23		20		20		20		
	Length Of Stay (LOS)	0							9		9		9		
	Turn Over Interval (TOI)	2,11	2		2		2		3		3		3		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	Bed Turn Over (BTO)	68,94	65	60	55	50	50	50	50	50	50	50			
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
1	Program Penataan Ruang Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang daerah	1 dokumen	410.000	510.000	410.000	310.000	310.000	310.000	310.000	410.000	410.000			
		Cakupan rekomendasi kesesuaian ruang yang diterbitkan (persen)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Cakupan pemeliharaan bangunan cagar budaya	100%	100%	230.000	230.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000			
		Tersedianya produk hukum penataan bangunan dan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			
4	Program Pengelolaan Pertamanan dan Kawasan Perkotaan	Jumlah taman kota	10	10	13.500.973	13.500.973	13.500.973	13.500.973	13.500.973	13.500.973	13.500.973	13.500.973			
		Luas taman (ha)	4,57	4,57	4,57	4,57	4,97	4,97	5,37	5,37	5,37	5,37			
5	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Penambahan jalan	784,233	790,393	136.092.403	136.092.403	804,663	136.092.403	813,866	136.092.403	820,026	136.092.403			
		Jumlah jembatan (unit)	273	273	274	274	274	275	275	275	275	275			
6	Program Pembangunan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Irigasi dan Sumberdaya Air	Persentase bendung dan irigasi kondisi baik	38,50%	38,70%	56.263.636	56.263.636	41.263.636	41.263.636	39%	41.263.636	39,50%	41.263.636			
		Jumlah bendung	179	180	180	180	181	182	183	183	184	184			
		Jumlah irigasi	253	256	256	256	256	256	256	256	256	256			
7	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Pemerintahan	Persentase bangunan pemerintah kondisi baik			23.449.755	23.449.755	23.449.755	23.449.755	23.449.755	23.449.755	23.449.755	23.449.755			
Sosial															
1	Program Pelayanan, Pemberdayaan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Cakupan PMKS yang terlayani			1.281.664	1.281.664	1.281.664	1.281.664	1.281.664	1.281.664	1.281.664	1.281.664			
		Cakupan penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial													
2	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan LKS yang dibina			186.086	186.086	186.086	186.086	186.086	186.086	186.086	186.086			
		Cakupan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terlibat dalam penanganan masalah sosial													
3	Program Fasilitasi, Penanganan dan Rehabilitasi Korban Bencana	Cakupan korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap			8.689	8.689	8.689	8.689	8.689	8.689	8.689	8.689			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	Cakupan korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat														
4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam	Cakupan pelayanan korban bencana Cakupan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana			1.583.217		1.583.217		1.583.217		1.583.217		1.583.217		1.583.217	
5 Program Penanggulangan bencana kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Tingkat waktu tanggap Presentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 - 5000 liter nada WMK			2.750.000		2.750.000		2.750.000		2.750.000		2.750.000		2.750.000	
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															
1 Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	Penurunan jumlah rumah tidak layak huni			800.000		800.000		800.000		800.000		800.000		800.000	
2 Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Prasarana Permukiman	Cakupan penanganan prasarana air bersih Cakupan penanganan prasarana sanitasi	90% 80,25%	92% 85%	7.782.533	94% 88%	7.782.533	95,50% 91%	7.782.533	97% 94%	7.782.533	98% 97%	7.782.533	100% 100%	7.782.533	
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat															
1 Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilpres			306.110		306.110		306.110		306.110		306.110		306.110	
2 Program Pengembangan Wawasan kebangsaan	Penurunan kegiatan aksi massa bernuansa SARA			1.948.058		1.948.058		1.948.058		1.948.058		1.948.058		1.948.058	
3 Program Pembinaan Kehidupan Beragama	Tingkat fasilitasi kegiatan keagamaan	130 kgt	175 kgt	4.017.726	215 kgt	4.017.726	215 kgt	4.017.726	215 kgt	4.017.726	215 kgt	4.017.726	215 kgt	4.017.726	
4 Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.	Angka Kriminalitas Cakupan penanganan pelanggaran K3			2.574.449		2.574.449		2.574.449		2.574.449		2.574.449		2.574.449	
3 Program Pencegahan	Intensitas sosialisasi pencegahan			25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
Penyalahgunaan Narkoba	penyalahgunaan narkoba														
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR															
Tenaga Kerja															
1 Program Pembinaan, Peningkatan Keterampilan dan Penempatan Tenaga Kerja.	Cakupan pencari kerja yang ditempatkan	48%	51%	1.438.716	58%	1.438.716	62%	1.438.716	66%	1.438.716	70%	1.438.716	75%	1.438.716	
	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja	1,60%	2%		2%		2%		2%		2%		2%		
2 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial.	Rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama	85%	90%	169.418	90%	169.418	90%	169.418	95%	169.418	95%	169.418	95%	169.418	
	Cakupan tenaga kerja yang mengikuti jaminan sosial	70%	75%		77%		80%		83%		86		90%		
	Rasio UMK terhadap upah di atas UMK	79%	80%		85%		90%		92%		93%		95%		
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
1 Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah pekerja dibawah umur	2.079	213	1.078.680	192	1.078.680	173	1.078.680	156	1.078.680	141	1.078.680	127	1.078.680	
	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	8	13		11		10		8		6		4		
	Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	5.219	4.373		4.416		4.460		4.505		4.555		4.600		
	Tingkat partisipasi perempuan di lembaga swasta	31.991	35.319		37.084		38.938		40.884		42.738		44.592		
	Tingkat partisipasi perempuan di lembaga politik	9	15		15		15		15		15		15		
Pangan															
1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Angka konsumsi energi (kkal/cap/th)	1.997,10	2.096,96	483.485	2.155,00	483.485	2.200,00	483.485	2.200,00	483.485	2.200,00	483.485	2.200,00	483.485	
	Angka konsumsi protein (kkal/cap/th)	55,19	57,96		60,73		63,50		66,27		69,04		71,81		
	cakupan kecamatan pangan yang tertangani	0	0		0		0		0		0		0		
	Cakupan desa rawan pangan yang tertangani	0	0		0		0		0		0		0		
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,33	86,86		89,39		91,92		94,45		96,98		99,51		
	Persentase pangan aman yang beredar di masyarakat	87,00	89,00		91,00		93,00		95,00		97,00		99,00		
	Persentase pangan segar bersertifikat Prima 3	2,00	3,00		4,00		5,00		6,00		7,00		8,00		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
2 Program Penguatan Kelembagaan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	Cakupan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	25,10	25,94%	216.200	26,78%	216.200	27,62%	216.200	28,45%	216.200	29,29%	216.200	30,13%	216.200	
	Cakupan desa mandiri pangan Jumlah ketersediaan cadangan pangan pemerintah	7,84	10 ton SB		12,5 ton SB		15 ton SB		17,5 ton SB		20 ton SB		22,5 ton SB		
Pertanahan															
1 Program Pengelolaan Pertanahan				842.449		842.449		842.449		842.449		842.449		842.449	
	Rasio tanah aset pemerintah daerah yang bersertifikat	50%	50%		60%		70%		80%		90%		100%		
	Cakupan penandaan tanah-tanah milik Pemerintah Daerah	50%	50%		70%		80%		90%		100%		100%		
	Cakupan penyelesaian proses pengadaan tanah pemerintah daerah	50%	80%		80%		85%		90%		90%		90%		
Lingkungan Hidup															
1 Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	Jumlah mata air yang dilindungi	8	8	301.588	9	301.588	10	301.588	11	301.588	12	301.588	13	301.588	
	Jumlah wilayah/desa yang telah memiliki kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	2 desa	3		4		5		6		7		8		
2 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.	Cakupan perusahaan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	20	22	983.675	24	983.675	26	983.675	28	983.675	30	983.675	32	983.675	
	Cakupan perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran air sesuai persyaratan teknis	10	11		12		13		14		15		16		
	Cakupan perusahaan yang melaksanakan pengendalian pencemaran udara sesuai persyaratan teknis	41,37	81		81,5		82		83		84		85		
	Indek Kualitas Udara (minimal 84)	64,29	52		52,5		53		54		55		56		
	Indek Kualitas Air (minimal 55)	40,23	59		59,5		60		61		62		63		
	Indek Tutupan lahan (minimal 62)	16	16		17		18		19		20		21		
	Jumlah kelompok masyarakat yang berperan aktif dan berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	9	9		10		11		12		13		14		
	Jumlah perusahaan yang memiliki IPAL			3.823.900		3.823.900		3.823.900		3.823.900		3.823.900		3.823.900	
3 Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	Cakupan pengelolaan air limbah														

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
4 Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	rumah tangga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Cakupan industri yang memiliki TPS B3														
	Persentase pengurangan timbulan sampah melalui bank sampah														
	Cakupan aduan kasus lingkungan yang tertangani	100%	80%	75.500	90%	75.500	100%	75.500	100%	75.500	100%	75.500	100%	75.500	
	Jumlah sanksi administrasi terhadap perusahaan yang melanggar peraturan perundangan bidang lingkungan	NA													
	Cakupan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan	NA													
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
1 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan kepemilikan KK Cakupan kepemilikan akta kelahiran Tersedianya profil Kependudukan			1.389.388		1.139.388		1.139.388		1.139.388		1.139.388		1.139.388	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
1 Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan musrenbangdes tepat waktu	100%	100%	224.000	100%	224.000	100%	224.000	100%	224.000	100%	224.000	100%	224.000	
	Cakupan desa/kelurahan yang menyusun profil desa secara tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Cakupan desa yang memiliki BUMDes yang sehat	17 desa	18 desa		18 desa		18 desa		18 desa		18 desa		18 desa		
	Rasio lembaga Rukun Tetangga (RT) yang aktif	5.081 RT	5.081 RT		5.081 RT		5.081 RT		5.081 RT		5.081 RT		5.081 RT		
	Jumlah pasar desa yang dibina	34 pasar	44 pasar		54 pasar		64 pasar		74 pasar		84 pasar		94 pasar		
	Cakupan desa yang menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Cakupan Posyandu aktif	1194 unit	1194 unit		1194 unit		1194 unit		1194 unit		1194 unit		1194 unit		
	Cakupan lumbung desa sehat	70 unit	12 unit		12 unit		12 unit		12 unit		12 unit		12 unit		
	Rasio Karang Taruna aktif	224 ds 15 kel	224 ds 15 kel		224 ds 15 kel		224 ds 15 kel		224 ds 15 kel		224 ds 15 kel		224 ds 15 kel		
	Rasio PKK Desa/Kelurahan aktif	224 ds 15 kel	224 ds 15 kel		224 ds 15 kel		224 ds 15 kel		224 ds 15 kel		224 ds 15 kel		224 ds 15 kel		
	Cakupan BP-SPAM aktif	30 klp	10 klp		10 klp		10 klp		10 klp		10 klp		10 klp		
	Cakupan KPP Sanitasi Lingkungan	60 klp	60 klp		60 klp		60 klp		60 klp		60 klp		60 klp		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	aktif														
Pengendalian Penduduk dan KB															
1 Program Peningkatan Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan Kependudukan KB.															
	Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need KB)	51,99%	11,75%		11,50%		11%		10,50%		10%		9%		
	Drop Out KB	25%	24%		23%		21%		19%		17%		15%		
	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Jumlah penanganan kasus terkait layanan KB	24	20		20		15		15		10		10		
	Jumlah peserta KB aktif pria	5.720	5.125		5.150		5.175		5.200		5.225		5.250		
2 Program Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja	Cakupan jumlah kelompok PIK Remaja yang dibina	100%	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000	
3 Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Institusi KB.	Rasio petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) dibanding jumlah desa/kelurahan	1 : 6	1 : 2	77.110	1 : 2	77.110	1 : 2	77.110	1 : 2	77.110	1 : 2	77.110	1 : 1	77.110	
	Rasio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD) dibanding jumlah desa/ kelurahan	1 : 1	1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		
	Rasio Sub PPKBD dibanding jumlah desa/kelurahan	1 : 1	1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		
	Cakupan kelompok Prio Utomo yang dibina	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
4 Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Jumlah NKKBS	4	3,6	291.488	3,6	291.488	3,6	291.488	3,6	291.488	3,6	291.488	3,6	291.488	
	Cakupan keluarga mengikuti UPPKS	8,01%	13,61%		13,61%		13,61%		13,61%		13,61%		13,61%		
	Cakupan anggota UPPKS yang mengikuti KB	77,19%	77,19%		77,19%		77,19%		77,20%		77,20%		77,20%		
	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Sejahtera :														
	- Bina Keluarga Balita	12.553	34,34%		34,45%		34,50%		34,60%		34,65%		34,70%		
	- Bina Keluarga Remaja	9.959	24,60%		24,65%		24,70%		24,75%		24,80%		25,00%		
	- Bina Keluarga Lansia	9.159	25,61%		25,65%		25,70%		25,75%		25,80%		26,00%		
	Cakupan anggota BKB ber-KB	84,39%	86,70%		86,75%		86,80%		86,85%		86,90%		86,95%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
Perhubungan															
1 Program Peningkatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Cakupan ruas jalan kolektor primer bermarka Cakupan ketersediaan fasilitas lalu lintas : - Traffic light - Warning light - Rambu penunjuk arah - Rambu standar - Guardraill - Paku Marka - Traffic cone	161 m2	2025	4.045.818	3.150	4.045.818	1.665	4.045.818	1.035	4.045.818	810	4.045.818	1.170	4.045.818	
		24	1 unit		1 Unit				2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit
		37	6 unit		2 Unit				2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit
		156	6 buah		4 Buah		4 Buah		4 Buah		4 Buah		4 Buah		4 Buah
		995	100 buah		100 bh		100 bh		100 bh		100 bh		100 bh		100 bh
		3428	500 m		500 m		500 m		500 m		500 m		500 m		500 m
		460	NA		1000bh		300bh		200bh		200bh		200bh		100bh
		95	NA		100 bh		100 bh		100 bh		100 bh		100 bh		100 bh
2 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Cakupan kendaraan angkutan umum yang laik operasi (lulus uji KIR) Persentase kendaraan angkutan umum masuk terminal Jumlah penumpang terlayani angkutan	9471	12100	16.353.058	12.200	6.353.058	12.300	6.353.058	12.400	6.353.058	12.500	6.353.058	12.600	6.353.058	
		NA	110.000		121.000		133.000		146.310		160.941		177.035		
		NA	NA												
Komunikasi dan Informatika															
1 Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informatika.	Persentase SKPD yang memiliki website Intensitas updating informasi pada website Pemerintah Daerah Cakupan sistem informasi manajemen (SIM) milik Pemerintahan Daerah yang berfungsi dan aktif Jumlah pelayanan publik secara online	25%	28%	682.276	31 SKPD	682.276	34 SKPD	682.276	37 SKPD	682.276	40 SKPD	682.276	43 SKPD	682.276	
		Setiap Hari	Setiap Hari		Setiap Hari		Setiap Hari		Setiap Hari		Setiap Hari		Setiap Hari		
		26 SKPD	28 SKPD		31		34		37		40		43		
		1	2		4		6		9		12		15		
2 Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Cakupan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terpublikasi Cakupan wilayah yang terjangkau oleh siaran radio Pemerintah Daerah Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan Cakupan kegiatan penyebaran informasi dan dialog melalui TV dan radio Cakupan kegiatan komunikasi kehumasan antar SKPD dan instansi vertikal Cakupan komunikasi dan kerjasama dengan media massa (cetak dan online)	500	600	1.150.356	700	1.150.356	800	1.150.356	900	1.150.356	100.000	1.150.356	100	1.150.356	
		10 kec	18		25 (streaming)		35 (streaming)		45 (streaming)		55 (streaming)		65 (streaming)		
		7 kec	9		11		13		15		17		18		
		12 kali	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali
		2 kali	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali
		6 kali	18 kali		30 kali		30 kali		30 kali		30 kali		30 kali		30 kali

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan		
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
Koperasi dan UKM 1 Program Penumbuhan, Pengembangan, dan Peningkatan Kualitas Manajemen Koperasi. 2 Program Pengembangan, Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk UMKM. 3 Program Kemitraan, Promosi dan Pemasaran Produk UMKM	Cakupan kegiatan desiminasi informasi ke masyarakat melalui media massa	20 media	20 media		20 media		20 media		20 media		20 media		20 media				
	Cakupan penyusunan naskah kebijakan Pemda	250 naskah	250 naskah		250 naskah		250 naskah		250 naskah		250 naskah		250 naskah				
Penanaman Modal 1 Program Promosi, Pemasaran Potensi dan Fasilitasi Investasi 2 Program Pelayanan Perijinan Satu Pintu	Jumlah koperasi sehat	105	110		115		120		125		130		135				
	Jumlah anggota koperasi	52.328	52.428		52.528		52.628		52.708		52.828		52.928				
Kepemudaan dan Olahraga 1 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda 2 Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Pertumbuhan jumlah UMKM berorientasi ekspor	NA	NA	766.500		766.500		766.500		766.500		766.500		766.500			
1 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda	Cakupan organisasi kepemudaan yang difasilitasi	6 organisasi		545.654		545.654		545.654		545.654		545.654		545.654			
	Cakupan kegiatan kepemudaan yang difasilitasi	6 organisasi															
2 Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional/Provinsi	NA		1.343.036		1.343.036		1.343.036		1.343.036		1.343.036		1.343.036			
	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional	6															
	Cakupan kelompok/organisasi	26															

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	olah raga yang difasilitasi	26													
Statistik															
1 Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah	Cakupan ketersediaan data dasar pembangunan	100%	100%	397.500	100%	397.500	100%	397.500	100%	397.500	100%	397.500	100%	397.500	
Persandian															
1 Program Pengelolaan Persandian	Cakupan informasi pemerintah daerah melalui SANTEL yang tersampaikan kepada pihak terkait	100%	100%	54.108	100%	108.216	100%	108.216	100%	108.216	100%	108.216	100%	108.216	
Kebudayaan															
1 Program Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	Cakupan kajian seni	68	68	2.405.657	68	2.405.657	68	2.405.657	68	2.405.657	68	2.405.657	68	2.405.657	
	Cakupan fasilitasi seni	143	143		143		143		143		143		143		
	Cakupan gelar seni	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan misi kesenian	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan sumber daya manusia kesenian	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan tempat gelar seni	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan organisasi kesenian yang aktif	307	307		307		307		307		307		307		
2 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan jumlah juru pelihara cagar budaya	40 jupel	40 jupel	159.547		159.547		159.547		159.547		159.547		159.547	
	Jumlah kunjungan museum dan monumen	200.807	200.807		220.000		240.000		260.000		280.000		300.000		
	Jumlah cagar budaya	298 bh	298 bh												
	Cakupan cagar budaya yang dikonservasi	1 situs	1 situs		1 situs		1 situs		1 situs		1 situs		1 situs		
Perpustakaan															
1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				1.120.000		1.120.000		1.120.000		1.120.000		1.120.000		1.120.000	
	Jumlah perpustakaan :														
	- Umum	2	2		2		2		2		2		2		
	- Desa/ kelurahan	56	66		84		102		120		156		239		
	- Sekolah/ Madrasah	811	811		811		811		811		811		811		
	- Pondok pesantren	2	3		6		9		12		15		18		
	- Rumah ibadah	4	4		8		12		18		27		50		
	- Khusus	2	3		4		6		8		10		12		
	Rasio perpustakaan per jumlah penduduk	0,00109625	0,00111125		0,00114375		0,0011775		0,00121375		0,00127625		0,001415		
	Rasio pengujung pepustakaan per jumlah penduduk	0,044858125	0,05		0,0625		0,075		0,0875		0,1		0,125		
	Jumlah perpustakaan yang dibina :														
	- Umum	18	27		36		54		72		90		108		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
	- Desa/ kelurahan	38	57		83		124		186		279		518		
	- Sekolah/ Madrasah	1	3		4		5		6		7		8		
	- Pondok pesantren	2	4		6		8		10		12		14		
	- Rumah ibadah	1	3		4		5		6		7		8		
	- Khusus	60	94		133		196		280		395		656		
	Jumlah perpustakaan yang memenuhi standar :														
	- Umum	1	1		1		1		1		1		1		
	- Desa/ kelurahan	16	60		66		72		78		84		90		
	- Sekolah/ Madrasah	424	442		478		514		550		586		622		
	- Pondok pesantren	2	3		6		9		12		15		18		
	- Rumah ibadah	2	4		6		8		10		12		14		
	- Khusus	2	3		4		5		6		7		8		
	Jumlah koleksi buku perpustakaan	49283	53283		62.283		71283		80283		89283		98283		
	Jumlah judul buku perpustakaan	26857	28057		29857		32857		35857		38857		41857		
	Jumlah anggota perpustakaan berkartu	10090	15000		20000		25000		30000		35000		40000		
	Jumlah layanan perpustakaan keliling	160	370		400		430		460		490		520		
	Jumlah SDM perpustakaan yang telah mengikuti bintek perpustakaan	380	500		540		600		700		800		900		
	Jumlah pustakawan bersertifikat kompetensi perpustakaan	1	2		3		4		5		6		7		
Kearsipan															
1	Program Pengelolaan Arsip	240	242	675.450	482	675.450	552	675.450	577	675.450	602	675.450	622	675.450	
	Cakupan SKPD/ormas/BUMD/ lembaga desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku														
	Jumlah arsip daerah yang telah didokumentasikan dalam bentuk elektronik (berkas)	8.000	8.500		20.000		25.000		30.000		40.000		50.000		
	Alih media Sistem Informasi Dokumen Masyarakat (SIDOMAS)	289.295 KK	0		59.659 KK		59.659 KK		59.659 KK		59.659 KK		59.659 KK		
URUSAN PILIHAN															
Kelautan dan Perikanan															
1	Program Pengembangan Perikanan Budidaya		587.430		587.430		587.430		587.430		587.430		587.430	587.430	
	Produksi ikan konsumsi (ton)	4.873	4.943		5.013		5.083		5.153		5.223		5.293		
	Produksi benih ikan (ribu ekor)	122,5	125		127,5		130		132,5		135		137		
	Produksi ikan hias (ribu ekor)	689	739		789		839		889		939		980		
2	Program Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		640.033		640.033		640.033		640.033		640.033		640.033	640.033	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
Perikanan 3 Program Pengembangan Perikanan Tangkap	produksi olahan hasil perikanan (ton)	2.500	2.850	2900	2950	3000	3100	3200							
	Tingkat konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	10,5	10,8	11,1	11,4	11,7									
	Produksi ikan sungai (ton)	240	240	240	235	235	235	230							
Pariwisata															
1 Program Pengembangan Destinasi Wisata	Jumlah Destinasi Wisata yang difasilitasi/dikembangkan	4 paket	4 paket												
2 Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Jumlah desa wisata yang dikembangkan														
3 Program Peningkatan kapasitas dan kelembagaan wisata	Angka kunjungan wisatawan (orang)	1.579.000	1.850.000	2.179.000	2.529.000	2.779.000	2.890.000	2.979.000							
	Jumlah/event pameran pariwisata yang diikuti														
	Jumlah Pokdarwis yang dibina														
Pertanian															
1 Program Pengembangan Budidaya Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Produksi pangan (ton) :														
	- Padi	249.691	252.189	254.711	257.258	259.830	262.429	265.053							
	- Jagung	39.339	39.732	40.130	40.531	40.936	41.346	41.759							
	- Kedelai	221	223	225	228	230	232	235							
	- Ubi Kayu	74.159	74.901	75.650	76.406	77.170	77.942	78.721							
	- Kentang	3.855	3.893	3.932	3.972	4.011	4.051	4.092							
	- Kobis	3.223	3.255	3.288	3.321	3.354	3.387	3.421							
	- Wortel	1.990	2.010	2.030	2.051	2.071	2.062	2.113							
	- Stroberi	458	462	467	472	476	481	486							
	- Cabai besar	719	726	734	741	749	756	764							
	- Cabai rawit	572	578	583	589	595	601	607							
	- Duku	7.567	7.643	7.719	7.796	7.874	7.953	8.033							
	- Durian	3.771	3.809	3.847	3.886	3.924	3.964	4.003							
	- Pisang	14.048	14.189	14.331	14.474	14.619	14.765	14.912							
	- Nanas	408	412	416	420	425	429	433							
	- Pepaya	4.777	4.825	4.873	4.922	4.971	5.021	5.071							
	- Manggis	716	723	730	738	745	753	760							
	- Kapulaga	12,16	12,28	12,40	12,53	12,65	12,78	12,91							
	- Kopi	578	584	590	596	601	607	614							
	- Lada	175	177	179	180	182	184	186							
	- Kelapa dalam	12.654	12.781	12.908	13.037	13.168	13.299	13.432							
	- Kelapa deres	53.130	53.661	54.198	54.740	55.287	55.840	56.399							
	- Cengkeh	56	57	57	58	58	59	59							
	- Glagah Arjuna	698	705	712	719	726	734	741							
	- Nilam	710	717	724	732,00	739	746	754							

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan	Cakupan Pedagang Kaki Lima yang ditata dan diberdayakan	6	6		8		10		12		14		16		
	Cakupan pemantauan terhadap distribusi barang penting dan strategis			275.000		275.000		275.000		275.000		275.000		275.000	
3 Program Standarisasi, Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.	Cakupan pengawasan terhadap komoditas barang yang peredarannya diawasi	NA		104.305		104.305		104.305		104.305		104.305		104.305	
	Cakupan pengawasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus	NA													
4 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Cakupan jumlah sengketa konsumen yang diselesaikan oleh BPSK	NA	3		5		10		15		20		25		
	Cakupan UTTP yang ditera dan ditera ulang	NA	24.066	4.000	25.000	4.000	26.000	4.000	28.000	4.000	30.000	4.000	32.000	4.000	
	Cakupan pasar tertib ukur	NA	1		1		1		2		2		2		
	Jumlah eksportir Jumlah/jenis barang yang diekspor Nilai ekspor	33	40	200.000	50	200.000	55	200.000	60	200.000	75	200.000	80	200.000	
Perindustrian															
1 Program Peningkatan Kapasitas Iptek dalam Sistem Produksi Industri Rakyat				1.934.000		1.934.000		1.934.000		1.934.000		1.934.000		1.934.000	
	Cakupan fasilitasi HKI	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Cakupan penerapan standarisasi produk industri	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Cakupan fasilitasi sertifikasi halal	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Transmigrasi															
1 Program Ketransmigrasian	Jumlah calon transmigran yang difasilitasi	2	15	226.579	15	226.579	15	226.579	15	226.579	15	226.579	15	226.579	
FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH															
1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah				884.954		734.954		734.954		734.954		734.954		884.954	
	Persentase Keselarasan RKPD terhadap RPJMD	83,30%	100		100		100		100		100		100		
	Tingkat Keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	81,4 persn	100		100		100		100		100		100		
	Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang teakomodir dalam dokumen penganggaran	60 persen	65 persen		70 persen		75 persen		76 persen		77 persen		78 persen		
2 Program Pengendalian dan	Tingkat Pencapaian Target Kinerja	80 persen	100 persen	1.664.544	100 persen	1.664.544	100 persen	1.664.544	100 persen	1.264.544	100 persen	1.414.544	100 persen	1.264.544	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
2	Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Jumlah jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga iptek	7 lembaga	7 lembaga	471.000	471.000	7 lembaga	471.000	7 lembaga	471.000	7 lembaga	471.000	7 lembaga	471.000	
		Frekuensi diseminasi hasil litbang	2 desiminasi	4 desiminasi			4 desiminasi	4 desiminasi	4 desiminasi	4 desiminasi	4 desiminasi	4 desiminasi	4 desiminasi	4 desiminasi	
3	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa	105	108	1.281.724	1.281.724		1.281.724		1.281.724		1.281.724		1.281.724	
		Cakupan penanganan kasus/khusus	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Cakupan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	85%	85%		85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
		Level kapabilitas APIP	2	2		3	3	4	5	5	5	5	5	5	
4	Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				2.872.359	2.872.359		2.872.359		2.872.359		2.872.359		2.872.359	
		Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	97%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Cakupan SKPD yang melaksanakan penatausahaan aset sesuai ketentuan	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Ketepatan waktu pengiriman Laporan Keuangan sesuai ketentuan	90%	92%		94%	94%	96%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Ketepatan waktu pengiriman Laporan Aset sesuai ketentuan	87%	92%		97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Program Fasilitasi dan Pengembangan Kepegawaian Daerah				3.359.397	3.359.397		3.359.397		3.359.397		3.359.397		3.359.397	
		Cakupan ASN yang mengikuti Diklat sesuai standar	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Cakupan penempatan SDM Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Cakupan administrasi file kepegawaian yang terupdate	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase usulan Raperda yang disetujui	100%	100%	13.157.683	13.157.683	100%	13.157.683	100%	13.157.683	100%	13.157.683	100%	13.157.683	
7	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD			74.516.129	74.516.129		74.516.129		74.516.129		74.516.129		74.516.129	seluruh SKPD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
8 Program Koordinasi dan Penatalaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan				10.299.972		10.299.972		10.299.972		10.299.972		10.299.972		10.299.972	
	Jumlah SKPD yang dievaluasi SOTK	60	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	50,5	52	53	58	60	62	65							
	Tingkat kesesuaian produk hukum daerah dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi	70%	80%	85%	90%	95%	100%	100%							
	Tingkat keberhasilan lelang pekerjaan pada ULP	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	Tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	Tingkat efisiensi pelaksanaan e procurement	0,50%	3%	3%	3%	3%	3%	3%							
	Tingkat capaian target laba Perusda (ribu rupiah)	25.521.680	28.073.848	30.881.233	33.969.356	37.366.292	41.102.922	45.213.213							
	Tingkat capaian target deviden perusda	12.299.895	13.868.136	15.254.950	16.780.445	18.458.489	20.304.338	22.334.772							
	Jumlah LKM berbadan hukum (unit)	4	7	14	28	56	112	224							
	Tingkat kesuaian Perdes dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%							
	Tingkat Keberhasilan pelaksanaan Pilkades	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
	Cakupan kecamatan yang menerapkan standar Paten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
Cakupan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang terdokumentasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
9 Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah				2.627.214		2.627.214		2.627.214		2.627.214		2.627.214		2.627.214	
	Persentase PBB yang terbayar oleh wajib pajak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10 Program Penguatan Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan				7.239.731		7.239.731		7.239.731		7.239.731		7.239.731		7.239.731	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan (18 Kecamatan)														
11															

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	

773.230.616

728.124.599

728.324.599

728.044.599

713.436.599

693.802.799

masuk Renstra |

| 9.337.493 |

masuk Renstra

|

|

282.306

|















masuk Renstra









masuk Renstra







masuk Renstra



masuk Renstra







8.2. Kesimpulan dan Rekomendasi KLHS

Berdasarkan hasil proses KLHS Penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 secara umum telah menggunakan pedoman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Meskipun demikian, pedoman tidak dapat menjawab semua kebutuhan sesuai dengan tahapan terutama saat melakukan kajian pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup Kabupaten Purbalingga. Atas dasar pemahaman tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian mengeluarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SE/04/Menlhk-II/2015 tentang Pelaksanaan KLHS yang kemudian menjadi acuan dalam pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.
2. Tidak tersedianya data dan informasi yang memadai untuk digunakan dalam proses pengkajian merupakan kelemahan utama dari proses pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.
3. Isu strategis yang dihasilkan dari proses KLHS terdiri dari 7 (tujuh) isu strategis, yaitu: (1) Alih Fungsi Lahan; (2) Kerusakan lingkungan; (3) Belum Optimalnya Pelayanan Publik dan Profesionalisme Aparatur; (4) Belum Terpenuhinya Standar Kualitas Pendidikan; (5) Belum Meratanya Pelayanan Kesehatan; (6) Belum Memanfaatkan Secara Optimal Potensi Ekonomi dan UMKM; dan (7) Terbatasnya Infrastruktur Wilayah.
4. Secara umum rumusan visi, misi, strategi dan arah kebijakan dalam rancangan awal RPJMD, sudah memenuhi sebagian besar prinsip pembangunan berkelanjutan, namun ada beberapa catatan penekanan yang perlu menjadi perhatian Tim penyusun RPJMD yaitu menjadikan kota metropolitan berwawasan lingkungan. Meskipun misi sudah memperhatikan pembangunan berkelanjutan tetapi aspek lingkungan yang

dapat berimplikasi pada tidak terjaminnya keadilan antarkelompok dan antargenerasi harus mendapatkan perhatian.

5. Dari hasil kajian pengaruh didapatkan 5 (lima) program prioritas yang diperkirakan memiliki pengaruh/dampak negatif terhadap isu strategis, terutama program-program yang terkait dengan pembangunan fisik.
6. Untuk meminimalkan pengaruh/dampak negatif tersebut dirumuskan mitigasi dan alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
7. Rekomendasi KLHS sudah dipaparkan kepada pemangku kepentingan dan tim penyusun RPJMD untuk diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.
8. Pokja Pengendalian Lingkungan masih harus memastikan pengintegrasian KLHS ke dalam RPJMD dan menyampaikan hasilnya kepada pemangku kepentingan.

Saran tindak lanjut untuk perbaikan proses KLHS adalah:

1. Pemerintah daerah harus menyediakan program updating data dan informasi daerah agar dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan KLHS.
2. Isu yang ada masih sangat banyak, sehingga pada kesempatan lain perlu untuk melakukan identifikasi isu dengan lebih tajam baik yang dilakukan Pokja PL maupun Tim Penyusun RPJMD.
3. Perlunya penguatan kapasitas pemerintah daerah dan universitas setempat untuk melakukan analisis baseline dan pengkajian agar hasilnya kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
4. Pokja Pengendalian Lingkungan wajib mengawal proses pengintegrasian hasil KLHS ke dalam Rancangan Akhir RPJMD.
5. Pokja Pengendalian Lingkungan wajib menyampaikan laporan akhir yang telah menyertakan hasil pengintegrasian kepada pemangku kepentingan yang telah mengikuti proses KLHS.

6. Pokja Pengendalian Lingkungan mendampingi SKPD yang akan melaksanakan KLHS Renstra SKPD untuk memastikan pengintegrasian hasil KLHS dibiayai.
7. Setelah Pokja PL habis masa tugasnya pada saat di-PERDA-kannya RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 harus melakukan monitoring pelaksanaan hasil integrasi rekomendasi KLHS dalam RPJMD akan dilakukan oleh SKPD yang terkait dengan Lingkungan Hidup
8. Monitoring dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan pada saat setiap penyusunan dokumen RKPD untuk memastikan integrasi KLHS dilaksanakan dan dibiayai.

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Visi Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga sebagaimana tertuang pada Tabel 9.1 berikut.

Tabel 9.1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PURBALINGGA

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Pertumbuhan PDRB (ADHK)	Persen	5,6	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6
2	PDRB Per kapita	Juta rupiah	16,6	17,4	18,5	19,6	20,8	22	23,3
3	Laju Inflasi	Persen	< 5	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6	< 6
4	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	67,02	> 67	> 68	> 68	> 69	> 69	> 70
	a. Angka Harapan Hidup	Tahun	72,8	72,9	73	73,1	73,2	73,3	73,4
	b. Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,78	11,9	12,1	12,3	12,5	12,7	12,9
	c. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,85	6,96	7,15	7,33	7,61	7,76	7,92
	d. Pengeluaran Per Kapita	Ribu rupiah	8.938	9.000	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
5	Angka Kemiskinan	Persen	20,05	18-20	17-19	16-18	15-17	14-16	13-15
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,13 *	< 5	< 5	< 5	< 5	< 4	< 4
7	Indeks Pembangunan Gender	Angka	63,43 *	> 64	> 64	> 65	> 65	> 66	> 66
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,06	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.	ASPEK LAYANAN UMUM								
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
1.	Urusan Pendidikan								
	APK SD/ sederajat	angka	109	109	109	109	110	110	110
	APK SMP sederajat	angka	100	100	100	100	100	100	100
	APM SD/ sederajat	angka	91	92	91	91	91	91	94
	APM SMP/ sederajat	angka	60	70	70	70	70	70	70
2	Urusan Kesehatan								
	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kh	136	101	88	74	61	54	47
	Angka Kematian Bayi	Per 1000 kh	10	9	8	7	6	5	4
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	Persentase jalan dalam kondisi baik	Persen	74,97	75,77	77,05	78,32	79,60	80,87	82,15
	Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persen	93,04	93,5	93,75	94	94,25	94,5	94,75
	Persentase lajur jalan minimal 5,5 meter	Persen	7,05	10,04	12,75	15,94	19,13	22,31	25,5
	Persentase bangunan pengairan dalam kondisi baik	Persen	38,56	40,8	42,3	43,8	45,2	46,7	48,2

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ketersediaan air baku irigasi	Persen	87,5	88,5	89	89,5	90	90,5	91
	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	Persen	17,89	18,1	18,31	18,51	18,71	18,91	19,11
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
	Cakupan rumah layak huni	Persen	88,6	89,4	90,5	91,3	92,1	93	93,9
	Cakupan kepemilikan rumah	Persen	80,12	81,62	83,12	84,62	86,12	87,62	89,12
	Luasan kawasan kumuh perkotaan	hektar	32,39	26,9	21,5	16,2	10,8	5,4	0
	Cakupan Rumah tangga mengakses air bersih	Persen	78,55	83,06	88,57	94,25	100	100	100
	Cakupan Rumah Tangga terlayani sistem air limbah di perkotaan	Persen	70	77,5	85	92,5	100	100	100
	Rasio timbulan sampah terlayani di perkotaan	Persen	59,6	59,7	59,8	58,9	59	60	61
	Cakupan drainase perkotaan	Persen	20,20	21,41	22,56	23,75	24,19	24,98	25,16
5	Urusan Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	60	-	-	70	70	70	-
	Cakupan pelanggaran perda yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Cakupan pelayanan korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen	31	35	40	45	50	55	60
6	Urusan Sosial								
	Cakupan PMKS yang terlayani	Persen	24	30	40	50	60	70	80
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
1	Urusan Tenaga Kerja								
	Rasio tenaga kerja dengan upah sesuai UMK	Persen	79	80	85	90	92	93	95
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	Cakupan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Urusan Pangan								
	Pola Pangan Harapan	Skor	84,33	86,86	89,39	91,92	94,45	96,98	99,51
	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/kap/th	162,6	164,5	166	168	170	173	175

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Urusan Lingkungan Hidup								
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	angka	47,79	63,5	64	64,5	65,5	66,5	67
	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Ton co2 ekuivalen		9.182	19.263	31.877	43.415	53.951	59.815
5	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
	Cakupan kepemilikan KTP	Persen	91,93	92	92,5	93	93,5	94	95
	Cakupan kepemilikan Akte	Persen	81,63	82	83	84	85	86	87
6	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	Cakupan Desa dengan BUMDes yang sehat	Persen	52	60	68	76	84	92	100
7	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB								
	Persentase peserta KB aktif	Persen	88	90	90	90	92	93	95
	Cakupan PUS tak terlayani	Persen	51,99	11,75	11,5	11	10,5	10	9
	Cakupan Keluarga Sejahtera	Persen	75,1	76	77	78	79	80	81

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Urusan Perhubungan								
	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	kasus	506	503	467	427	420	360	301
9	Urusan Komunikasi dan Informatika								
	Jumlah SKPD yang menerapkan SIM dan memiliki website aktif	unit	25	28	31	34	37	40	43
10	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
	Jumlah koperasi sehat	Unit	105	110	115	120	125	130	135
	Jumlah usaha mikro bersertifikat/berijin	Unit	268	293	473	653	883	1013	1193
11	Urusan Penanaman Modal								
	Pertambahan nilai investasi baru	Juta rupiah	230.000	270.000	320.000	470.000	570.000	690.000	770.000
12	Urusan Kepemudaan dan Olahraga								
	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional dan nasional	kejuaraan	2	3	5	6	8	10	12

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Urusan Kebudayaan								
	Jumlah pementasan seni budaya daerah	kali	65	65	68	70	72	74	76
	Jumlah tempat/gedung pementasan kesenian	unit	11	11	11	11	11	11	12
14	Urusan Perpustakaan								
	Cakupan perpustakaan desa	Persen	23	28	35	43	50	65	84
	URUSAN PILIHAN								
1.	Urusan Kelautan dan Perikanan								
	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	Miliar rupiah	282	295	308	320	333	347	360
	Produksi ikan konsumsi	Ton	4.873	4.943	5.013	5.083	5.153	5.223	5.293
2	Urusan Pariwisata								
	Jumlah kunjungan wisata	Ribuan orang	1.579	1.850	2.179	2.529	2.779	2.890	2.979
3	Urusan Pertanian								
	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Triliun rupiah	4,9	5,2	5,5	5,9	6,2	6,6	6,9
	Produksi Padi	Ton	249.691	252.189	254.711	257.258	259.830	262.429	269.053
	Produksi Jagung	Ton	39.339	39.732	40.130	40.531	40.936	41.346	41.759
	Produksi kedede	Ton	221	223	225	228	230	232	235

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	KINERJA AWAL RPJMD (2015)	TARGET KINERJA					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Produksi daging	Ton	14.346	14.490	14.634	14.781	14.929	15.078	15.229
4	Urusan Perdagangan								
	Jumlah pasar ber-SNI	unit	0	0	1	3	3	3	3
5	Urusan Perindustrian								
	Nilai PDRB Sektor Industri	Triliun rupiah	3,9	4,2	4,4	4,7	5,0	5,4	5,9
	Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan								
	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	77,6	78	78,5	79	79,5	80	80,5
	Opini audit BPK	opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
	Lama waktu perijinan investasi	hari	6	5,6	5,2	5	4,8	4,6	4,2

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Pembangunan daerah merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah harus selaras dan sinergis serta menunjang perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi. Oleh karena itu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009. Guna mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan, RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 juga merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga.

Mengingat RPJMD merupakan dokumen induk dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga, maka dengan sendirinya harus menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lainnya baik yang bersifat jangka menengah maupun tahunan. RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu lima tahun ke depan. Di samping itu, RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 juga akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan di tingkat SKPD. Selanjutnya Renstra PD akan dijabarkan lebih lanjut

dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan di tingkat SKPD.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Purbalingga berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 dalam bentuk Renstra-PD dan Renja-PD.
2. Renstra-PD memuat tujuan, sasaran, program dan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD selama kurun waktu lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Guna mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, setiap SKPD berkewajiban mencapai target kinerja yang telah ditentukan melalui implementasi Renstra dan Renja PD.
4. Untuk mengetahui kinerja pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 dilakukan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terhadap capaian kinerja sasaran sesuai indikator yang telah ditetapkan.
5. Capaian kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 akan digunakan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga periode 2016-2021.
6. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, maka RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2010 dinyatakan tidak berlaku lagi.
7. RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sampai dengan tahun 2021. Namun untuk menghindari kekosongan acuan

dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan pada masa peralihan periode kepemimpinan di Kabupaten Purbalingga, maka RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan Bupati-Wakil Bupati Purbalingga periode 2021-2026 dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2022 sebelum tersusunnya RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2027.

BAB XI

PENUTUP

Sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan, implementasi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan Kabupaten Purbalingga pada kurun waktu 2016-2021. Terwujudnya Visi pembangunan Kabupaten Purbalingga akan sangat ditentukan oleh sejauh mana efektifitas pelaksanaan Misi yang dilihat dari terwujudnya tujuan-tujuan pada setiap bidang pembangunan. Sedangkan untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, terlebih dahulu harus dapat dicapai sasaran-sasaran pembangunan. Dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 ini, sasaran-sasaran pembangunan telah dijabarkan dalam bentuk indikator-indikator kinerja yang bersifat kuantitatif sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Untuk dapat mencapai sasaran-sasaran pembangunan sesuai indikator-indikator yang telah ditetapkan tersebut, di samping melalui pelaksanaan seluruh program pembangunan yang ada dalam RPJMD oleh seluruh SKPD, yang lebih penting adalah sejauh mana efektivitas pelaksanaan program yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan bukan hanya diukur dari tingkat pencapaian *output* dibandingkan dengan *input* yang digunakan, tetapi lebih dari itu diukur juga dari sejauh mana pencapaian *outcome* dan *benefit* serta dampak dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Di tengah terbatasnya kemampuan keuangan daerah dan semakin meningkatnya beban kebutuhan belanja pemerintah daerah serta semakin kompleksnya kebutuhan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi, maka semakin dirasakan perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sebagai sebuah perencanaan pembangunan, RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 tidak serta merta menentukan keberhasilan pembangunan Kabupaten Purbalingga pada kurun waktu lima tahun yang akan datang. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Purbalingga di samping ditentukan oleh konsistensi dalam mengimplementasikan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, juga ditentukan oleh sejauh mana semangat, dedikasi, dan integritas seluruh aparatur Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan serta dukungan dari pemangku kepentingan lainnya.

BUPATI PURBALINGGA

H. TASDI, SH, MM